

TERNAK SAPI DI ATAS LAHAN REKLAMASI

THE INDONESIA ENERGY & MINING MAGAZINE

TAMBANG

Volume 10 No. 125/November 2015

JEMBATAN SOLUSI

www.tambang.co.id



FREEPORT DI ANTARA JOKOWI, SUDIRMAN SAID, DAN JIM MOFFETT

SIUPP:

No. 149/SK/Menpen/SIUPP/1999

Pemimpin Umum:

Herman Afif Kusumo

Wakil Pemimpin Umum:

Juangga Mangasi

Dewan Redaksi:

Dr. Ir. S. Witoro Soelarno

Ali Rahman

Suyartono

Yusuf

A. Nugraha Juanda

Pemimpin Perusahaan:

Atep Abdurrofiq

Direktur Bisnis & Pengembangan:

Rakhmadi A. Kusumo

Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab:

Iwan Qodar Himawan

Reporter:

Alamsyah Pua Saba

Subkhan Agung Sulistio

Egenius Soda

Vicharius Dian Jiwa

Fotografer:

Taufiequrrohman

Ruslan Ishak Azhari

Produksi:

Rajil K Wibowo

Irfan Maulana

Iklan & Promosi:

Hilal Fakhruddin (Manager)

Indah Wahyu Wati

Ika Yeyet

Wulan Destiningsih

Tambang Online:

Esti Widayarsi

Sirkulasi & Distribusi:

Amiludin

Anne M. Soleh

Keuangan:

Anna Diana

English Editor:

Jim Maulana Ichsan

• • • •

Penerbit:

PT Media Bakti Tambang

Rekening:

a.n PT. Media Bakti Tambang

Bank Mandiri KCP JKT Mampang Prapatan

A.C. 070-00-05573055

Alamat Redaksi:

Graha TAMBANG d/h Wisma Eka Karma

Jl. Kapten Tendeau No. 15

Jakarta Selatan 12790

Telp.: 021 - 7998823

Fax.: 021 - 7992616

E-mail: redaksi@majalahtambang.com

iklan@majalahtambang.com

sirkulasi@majalahtambang.com

mtambang@yahoo.com

iklan.tambang@yahoo.com

Website:

www.tambang.co.id

tambang.majalah

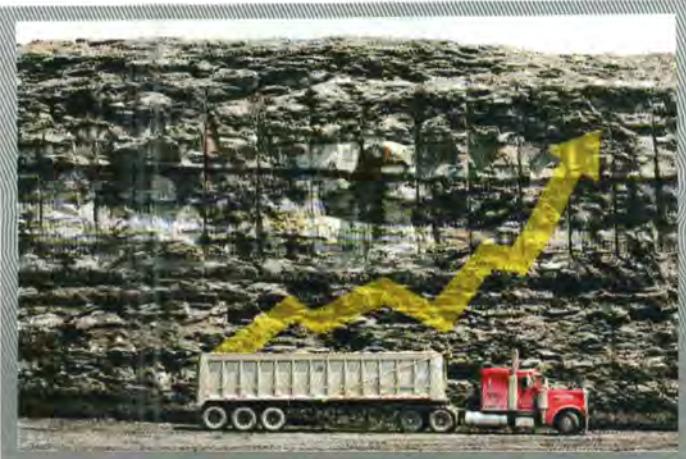
MajalahTambang

• • • •

Percetakan: Enka Parahiyangan

Redaksi menerima artikel dan foto kegiatan seputar dunia pertambangan dan hal yang berkaitan, maksimal 5.000 karakter

Dari Redaksi



NILAI TAMBAH BATU BARA

Sekarang eranya nilai tambah di sektor tambang. Jika selama ini yang lebih banyak dibicarakan nilai tambah di sektor tambang mineral, bukan berarti sektor batu bara tidak ada kegiatan nilai tambah. Majalah TAMBANG beberapa kali mengangkat topik tentang nilai tambah, mulai dari peningkatan kalori, gasifikasi dan pencairan batu bara. Sayangnya selama ini nilai tambah batu bara masih dalam tahapan uji coba. Kalaupun masuk tahapan komersial masih dengan skala kecil.

Di edisi kali ini Majalah TAMBANG kembali mengangkat nilai tambah batu bara secara khusus briket. Briket batu bara sebenarnya bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia karena jauh sebelum muncul ide hilirisasi batu bara, BUMN tambang, PT Bukit Asam sudah memulainya di tahun 1990-an. Kala itu Bukit Asam diperintahkan Presiden Soeharto untuk membangun pabrik dan memproduksi briket batu bara di berbagai daerah.

Sayangnya tidak ada keberlanjutan malah lebih memilih pegembangan sumber energi lain seperti gas. Padahal peningkatan nilai tambah batu bara bakal diperoleh dengan menjadikannya sebagai briket. Ini akan membantu memanfaatkan sumber daya batu bara kalori rendah yang dimiliki Indonesia.

Di saat banyak perusahaan tambang batu bara khusus kalori yang harus menghentikan produksi karena tidak ada pasar yang menyerap, briket bisa menjadi pilihan. Apalagi proses menghasilkan briket tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan investasi besar. Tinggal sekarang bagaimana keberpihakan pemerintah dalam mendorong nilai tambah batu bara dalam bentuk briket ini bisa berkembang. Karena ketika bisnis berjalan, perusahaan beroperasi dan negara mendapatkan pemasukannya.

Tulisan panjang mengenai briket kami sandingkan dengan laporan utama soal perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sebagaimana Anda tahu, ini merupakan isu panas, dan menjadi makin ramai karena masalah sosial, ekonomi, politik, hingga industri berpadu menjadi satu.

Saat ini yang penting tidak lagi paada apakah akan diperpanjang atau tidak pasca 2021. Hal yang lebih utama adalah bagaimana kontribusi perusahaan ini ke depan bisa lebih besar lagi bagi Indonesia. ■



DIVESTASI SAHAM DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN KONTRAK KARYA

Aakhir-akhir ini, pembicaraan terkait divestasi saham mulai banyak dibicarakan dan menghiasi pemberitaan media massa. Isu ini kembali marak menjadi pembicaraan, terutama terkait dengan divestasi saham milik PT Freeport Indonesia. Sebelum soal divestasi, isu terkait PTFI juga menjadi perhatian terutama terkait perpanjangan kontrak karya (KK) perusahaan asal Amerika tersebut.

Dalam ketentuan perundangan, PTFI yang akan berakhir kontraknya pada 2021, baru boleh mengajukan perpanjangan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak, yakni pada 2019. Mereka menginginkan agar ada keleluasan waktu perpanjangan untuk memberikan kepastian hukum. Waktu 10 tahun diusulkan.

Isu ini kemudian redam, setelah Presiden Joko Widodo angkat suara dan mengatakan, tidak ada perpanjangan kontrak untuk Freeport saat ini dan ketentuan perpanjangan harus dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir sebagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014.

Kemudian muncul isu divestasi. Karena sesuai ketentuan dalam PP tersebut juga, bahwa sampai 2015, PTFI harus melakukan divestasi sahamnya sebesar 10 persen. Kemudian pada 2019, saham Freeport yang harus didivestasikan sebesar 30 persen. Sampai saat ini, saham Freeport yang sudah didivestasikan sebesar 9,36 persen.

Polemik soal divestasi saham ini, terutama terkait cara yang paling efektif untuk melakukan divestasi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014, ketika saham perusahaan tambang dilepas, maka Pemerintah Pusat mendapatkan opsi pertama untuk ditawarkan. Jika tidak, tawaran berikutnya diberikan kepada BUMN, BUMD atau diberikan penawaran kepada swasta nasional.

Kemudian muncul opsi lain terkait divestasi tersebut yakni melalui pelepasan saham di Bursa efek

(*Initial Public Offering*). Pilihan melalui bursa dilakukan, karena dianggap lebih transparan. Hanya saja, ketentuan tersebut tidak diatur dalam PP nomor 77 tahun 2014.

Namun apabila saham dilepas melalui IPO, maka tentu tujuan divestasi yaitu agar peran serta perusahaan-perusahaan nasional untuk mendapatkan bagianya, tidaklah mungkin akan tercapai.

Pada dasarnya tidak ada masalah siapapun pemilik saham PTFI, baik pemerintah, BUMN atau swasta nasional, sepanjang dia memiliki integritas nasional dan tidak menjadi kepanjangan tangan pihak asing.

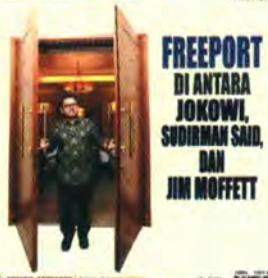
Partisipasi kepemilikan saham oleh korporasi nasional, merupakan suatu keniscayaan, tetapi lain halnya dengan pelaksanaan operasional di lapangan atau yang kita kenal dengan manajemen operator, tidak akan menjadi masalah seandainya PTFI masih tetap secara penuh sebagai operator pelaksana di tambang. Karena di dunia usaha pertambangan, hal ini secara umum bisa terjadi.

Oleh sebab itu, yang harus menjadi perhatian bersama adalah pada aspek pengawasan, bagaimana perusahaan berkontrak dengan pemerintah, apakah kerjasama yang saling menguntungkan dan berkeadilan, sehingga kegiatan pertambangan berjalan dengan baik dan benar serta tidak berdampak negatif pada pengelolaan lingkungan yang dapat saja membuat ditutupnya kegiatan pertambangan itu sendiri.

Sudah seyogyanya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, harus selalu bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945. Jayalah pertambangan Indonesia! ■

Herman Afif Kusumo

TERNAK SAPI DI ATAS LAHAN REKLAMASI

THE INDONESIA ENERGY & MINING MAGAZINE
TAMBANG

FREEPORT
DI ANTARA
JOKOWI,
SUDIRMAN SAID,
DAN
JIM MOFFETT

Judul Cover :
FREEPORT di antara Jokowi,
Sudirman Said, dan
Jim Moffett
Design :
Tim Artistik Majalah TAMBANG
Sumber: Ilustrasi Berbagai
Sumber

Dari Redaksi	4
Visi	5
Bingkai	8-9
Surat Pembaca	10
Arsip	11
Luar Negeri	18-20
Lintas Tambang	21
Korporaksi	78-81
Kolom	82-83
Perjalanan	84-87
Logbook	88-89
Personal	90-93
Esai Foto	94-97
English Section	100-113



74
CEO
Bing Tobing
PT Baramutia Prima

LAPORAN UTAMA**Janji Investasi Dari Arizona
Untuk Papua**

Pemerintah sejauh ini telah memastikan bahwa pembahasan perpanjangan izin operasi pasca 2021. Apa pun keputusan diambil tentu ada konsekwensinya.

**34****Jalur Lobi Sebuah Kontrak**

Freeport McMoran
Papua, Afrika, Dan New Mexico

Wawancara Khusus: Sudirman Said - Menteri ESDM
Saya Harus Memutus Mata Rantai Korupsi

Kolom: Anang Rizkani Noor
Freeport, What's Next?

38**41****44****50****22 NASIONAL****Kembang Kempis Smelter Nikel**

Anjloknya harga nikel menjadi hambatan pengusaha pabrik pengolahan dan pemurnian. Pabrik-pabrik yang hampir berdiri memilih mundur beroperasi.

26 Melibatkan Bule Di Proyek 35 GW**30 Tambang Sulam Di Blok Lama****52****LAPORAN KHUSUS****Briket Batu Bara, Menghidupkan Kembali Yang Mati Suri**

Program pengembangan hilir batu bara melalui pembuatan briket sudah lama ada namun keberadaannya nyaris tak terdengar. Hampir satu dekade briket seperti mati suri. Kini mulai diperhitungkan kembali untuk membangkitkan industri batu bara nasional.

**Bisnis Briket Di Bawah
Ancaman Gas Bersubsidi****56**

Wawancara: Supriatna Suhala - Direktur Eksekutif APBI
Jangan Bunuh Pengembangan Briket Batu Bara

60

Wawancara: Tria Suprajeni - PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
Akan Lebih Rugi Jika Tidak Diproduksi Briket

62**KOMODI****Duet Demi Proyek Mempawah****12****LINGKUNGAN****Merawat Elang Menjaga Ekosistem****64****Memagari Peternakan Di Lahan Bekas Tambang****68**

ENERGI GELOMBANG LAUT

Energi gelombang Selat Irish.



Bendera Isle Of Man

MANXA Tidal Energy Ltd., sebuah perusahaan pengembang energi terbarukan,

mendapatkan izin dari pemerintah Inggris dan pemerintah Isle of Man untuk mendalami kemungkinan pendirian pembangkit listrik dari energi gelombang laut. Isle of Man adalah daerah otonomi di bawah Inggris, terletak di Selat Irish, antara Kepulauan Britania Raya dan Irlandia.

Selama tujuh tahun, Manxa diberi waktu untuk melakukan survei kelayakan. Listrik yang dihasilkan kelak akan dijual seluruhnya ke pemerintah Inggris. Pemerintah Isle of Man mengincar pemasukan £5 juta setahun, dan lapangan kerja untuk 60 orang, dari listrik energi gelombang ini.

Isle of Man memiliki daratan 572 km² dan laut seluas 4.000 km².



Turbin energi pasang surut.



Peta Isle Of Man.

Pembangkit Kepler 30 MW.

Agustus lalu, Kepler Energy mengumumkan rencana untuk membangun pembangkit tenaga gelombang berkapasitas 30 MW. Kepler didirikan pada 2010, sebagai pemegang paten tiga ilmuwan senior



Pagar penguat energi pasang surut, temuan ilmuwan Universitas Oxford.

Fakultas Teknik Universitas Oxford, yang sukses membangkitkan listrik gelombang. Pembangkitnya terletak di Kanal Bristol, Inggris.



Merakit pagar penguat.



Kapasitas : 240 MW
Dibangun : 1994
Biaya : US\$ 293 juta.
Luas waduk : 43 km²

Sihwa sang Juara.

Inilah waduk serbaguna, yang fungsi utamanya untuk pertanian dan mencegah banjir, namun belakangan terkenal di dunia sebagai penghasil listrik berkapasitas 254 MW. Stasiun pembangkit listrik tenaga gelombang danau Sihwa dioperasikan oleh Perusahaan Sumber Daya Air Korea.

Pembangkit listrik Sihwa.



pengunjung di pembangkit listrik Sihwa.



Memasang bilah.



Bilah kincir pembangkit pasang surut.

Dari Lingkungan Hingga Karat.

Pembangkit listrik tenaga pasang surut tak seluruhnya punya nilai plus, meski termasuk kelompok energi terbarukan. Kekhawatiran utama adalah efek yang muncul akibat putaran bilah kincir. Kecepatan putaran, hantaman, plus suaranya dikhawatirkan berdampak terhadap organisme.

Rentetan pasang surut yang berlebihan dikhawatirkan mengubah garis pantai, dan mempengaruhi ekosistem yang biasa hidup pada air laut yang tenang. Dikhawatirkan jumlah ikan menyusut drastis akibat organisme kecil yang biasa untuk makanan ikan, berkurang.

Kandungan garam pada air laut akan membuat suku cadang dari logam berkarat. Tanpa pemeliharaan yang cukup, kerusakan suku cadang bisa menimbulkan kebocoran minyak pelumas, yang bisa turut mencemari laut. **T**

Dari Swansea.

Pemerintah Inggris segera membangun danau buatan di kota Welsh, Swansea, Inggris.

Dalam konsep ini, garis pantai diubah dengan konstruksi beton sekitar 10 kilometer, agar bisa mendapatkan efek gelombang yang optimal. Konstruksi beton ini mendatangkan manfaat ganda. Di atasnya bisa digunakan untuk berekreasi, sekaligus melindungi warga dari kemungkinan hantaman gelombang. Ujungnya menjadi semacam pintu keluar masuk air. Pergerakan arus inilah yang menggerakkan 26 turbin. Listriknya bisa menerangi 155.000 rumah.

Bila proyek ini berhasil, pemerintah Inggris akan membuat proyek serupa di tempat lain.

en.wikipedia.org



Proyek Swansea.



Ruang tamu-kompleks pembangkit Swansea.

Ada sejumlah pembangkit listrik energi pasang surut yang sudah beroperasi.

Stasiun	Kapasitas (MW)	Negara	Awal beroperasi
Annapolis Royal	20	Kanada	1984
Jiangxiā	3.2	Cina	1980
Kislaya Guba	1.7	Rusia	1968
Rance	240	Perancis	1966
Danau Sihwa	254	Korea Selatan	2011
Strangford Lough SeaGen	1.2	Inggris	2006
Uldolmok	1.5	Korea Selatan	2009



PEMUDA DI PUCUK

Anak muda selalu hadir pada setiap catatan perubahan dan sejarah. Darah muda yang mengalir di dadanya membuat ide-ide cerdas dan inovatif selalu muncul. Lihat saja, kini sejumlah perusahaan energi dipimpin kalangan muda. Mereka mampu menunjukkan kemampuannya dan menjawab keraguan dan tantangan zaman.

Saya terkesan pada majalah TAMBANG edisi bulan lalu, yang menyuguhkan beberapa tokoh muda yang tampil menjadi pemimpin di perusahaan energi. Pemuda tidak lagi sebatas sebagai pengikut, namun sudah menjelma sebagai pemimpin. Di tangan mereka, ekspansi dan pengembangan bisnis terus dilakukan.

Ini menunjukkan anak muda mampu menjadi seorang pemimpin di perusahaan energi. Ketika sebagian kalangan melihat anak muda lebih diidentikkan dengan senang-senang dan hura-hura, mereka justru memilih jalur profesional dengan sibuk mengurus soal energi.

Sebagian di antara mereka telah sukses membesarkan dan meneruskan perusahaan keluarga. Beberapa lainnya sukses merintis perusahaan dari nol. Ada yang di bidang minyak gas, alat berat, atau kelistrikan.

Baik merintis dari mula maupun meneruskan rintisan orangtuanya, sama-sama mengandung risiko besar. Berbisnis di sektor energi memiliki risiko besar, melibatkan modal kakap.

Sentuhan tangan muda memang diperlukan untuk kondisi saat ini yang serba cepat dan tepat. Unsur pemuda mau tidak mau harus dilibatkan dalam dunia bisnis saat ini. Meski mereka bisa jadi perlu waktu untuk beradaptasi dan butuh motivasi.

Angelina Rahim, Setiabudi-Jakarta

Mencetak Pengusaha Muda

Di zaman yang serba canggih saat ini, kita dihadapkan pada situasi sulit. Kemajuan teknologi seringkali ber mata dua. Bila digunakan secara negatif akan menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi kecanggihan teknologi dan cepatnya informasi bila dimanfaatkan secara positif akan banyak manfaatnya bagi kita.

Pepatah mengatakan, baik atau tidaknya masa depan bangsa itu dilihat dari pemudanya. Apabila pemudanya baik, masa depan bangsa ini akan baik. Begitu juga di dunia usaha kita. Bila kita memiliki pengusaha muda yang handal, tangguh, dan baik, maka bisa jadi masa depan industri kita juga akan baik.

Pemerintah harus turun tangan dalam memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha muda kita untuk berperan memajukan bangsanya.

Bila perlu pemerintah mendorong dan membuka seluas-luasnya peluang keterlibatan pengusaha muda nasional dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Dengan melibatkan pengusaha lokal, peluang tenaga kerja pun akan terbuka lebar bagi putra-putri kita.

Jihan Maheswari, Bumi Serpong Damai

Pengusaha Muda dan Energi Bersih

Harga berbagai komoditi saat ini sedang turun cukup signifikan. Harga minyak dan komoditi tambang menipis. Industri andalan kita sudah jatuh ke titik rendah.

Di tengah melambatnya ekonomi global, Indonesia dihadapi dengan tantangan-tantangan ekonomi baru.

HIPMI sebagai pengusaha pejuang, pejuang pengusaha yg cinta tanah air, harus memimpin reorientasi arah ekonomi Indonesia, dan menciptakan sumber pendapatan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan kedepannya.

Indonesia adalah negara yang mempunyai segala-

nya, dengan tanah yang subur dan klimat yang tropis. Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang cukup besar. Di antaranya, mini/mikrohidro, biomassa, energi surya, energi angin, dan energi nuklir.

Dengan bekal pemberian Tuhan yang begitu berlimbah, dengan tanah yang subur dan alam yang mendukung sebagai keunggulan komparatif dibandingkan ekonomi lain, Indonesia sudah selayaknya berdaulat di sektor energi maupun pangan.

Saat ini pengembangan EBT mengacu kepada Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dalam Perpres itu disebutkan, kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17%. Total investasi yang diserap pengembangan EBT sampai tahun 2025 diproyeksikan sebesar US\$13.197 juta.

Dengan tingkat bauran 17-25 persen dan terus meningkat, diharapkan Indonesia akan melepas ketergantungan bauran energinya dari bahan bakar fosil, dan mungkin saja setelah itu dari batu bara. Energi fosil adalah komoditas yang dapat habis dan mempunyai dampak lingkungan yang besar, yaitu efek rumah kaca yang besar dan emisi karbon.

HIPMI sebagai pengusaha muda yang berwawasan kebangsaan sudah saatnya mengambil peran yang lebih besar dalam peningkatan penggunaan energi bersih di Indonesia. Selain mendukung program elektrifikasi pemerintah 35.000 MW, HIPMI diharapkan menjadi katalis pertumbuhan energi bersih yang ramah lingkungan. Kecukupan elektrifikasi nasional diharapkan akan memberikan efek berganda terhadap ekonomi nasional, pertumbuhan industrialisasi, dan ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

**M. Aaron Annar Sampetoding,
Ketua Umum Hipmi BPC Jakarta Pusat.**

LOGO SEMEN PADANG DARI MASA KE MASA

VICHARIUS DIAN JIWA
vichariusdianjiwa@tambang.co.id



Sejak 1910

BILA bicara soal semen di Indonesia, ada dua perusahaan yang merajai bisnis semen nasional, PT Semen Gresik dan PT Semen Padang. Semen Padang hadir lebih dahulu. Pada 18 Maret 1910 pabrik semen itu berdiri di Indarung, sekitar 15 kilometer di timur kota Padang dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NIPCM).

Saat pertama kali beroperasi, logo perusahaan berbentuk bulat, terdiri atas dua lingkaran, besar dan kecil, dengan posisi lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar. Di antara kedua lingkaran tersebut terdapat tulisan "Sumatra Portland Cement Works". Logo itu hanya berumur tiga tahun karena pada 1913 dibuat sebuah logo baru, meski bentuk bulat dengan dua garis lingkaran dan kata-katanya tetap dipertahankan. Hanya saja, NIPCM ditambah dengan NV.

Pada logo baru itu ada gambar seekor kerbau jantan, binatang yang akrab dengan hikayat Minangkabau, dalam lingkaran kecil tampak sedang berdiri menghadap ke arah kiri dengan latar panorama alam Minangkabau. Gambar ini menggantikan posisi huruf NIPCM sebelumnya. Namun pada 1928 logo itu berubah lagi.

Tak hanya itu, kata *Nederlandsch Indische* diubah menjadi Padang. Tulisan di antara kedua lingkaran tersebut adalah *N.V. Padang Portland Cement Maatschappij*. Di bagian bawahnya tertulis Fabrik di Indarung Dekat Padang, Sumatera Tengah, yang ditulis dengan huruf yang lebih kecil.

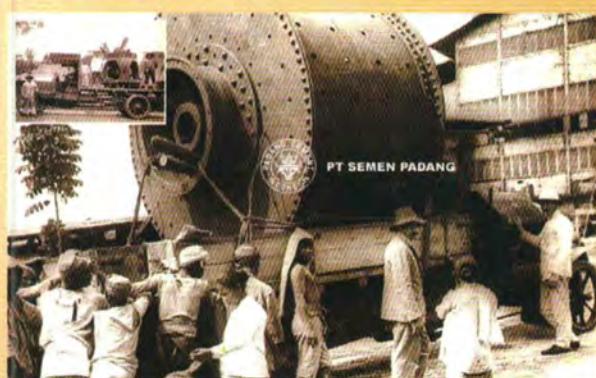
Penggunaan bahasa Melayu pada logo perusahaan kemungkinan dipengaruhi kondisi politik di Hindia Belanda pasca dideklarasikannya Sumpah Pernuda pada Oktober 1928. Dalam lingkaran kecil, selain ada gambar kerbau, juga terdapat gambar seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan sebelah kanan kerbau sambil memegang tali kerbaunya. Gambar sebuah rumah adat terlihat pula di sana, diletakkan di belakang sebelah kanan kerbau. Panorama di latar belakang ditambah dengan lukisan Gunung Merapi, lambang sumarak ranah Minang.

Ketika Jepang datang, logo perusahaan kembali berubah. NV PPCM diganti dengan Semen Indarung. Logonya tidak diubah, cuma ada perubahan tulisan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Gambar itu tetap dipakai sampai Perang Kemerdekaan berlangsung pada 1945-1949 dengan sedikit revisi tulisan. Semen Indarung berganti jadi Kilang Semen Indarung. Namun, saat Belanda kembali pada 1950, nama NVPPCM muncul kembali.

Pada 1958 logo Semen Padang berubah lagi seiring dengan kebijakan pemerintah pusat tentang nasionalisasi perusahaan asing. Bentuk bulat tetap dipertahankan tapi tulisan NV PPCM diganti dengan Semen Padang Pabrik Indarung. Gambar kerbau tetap ada. Namun gambar seorang laki-laki, rumah adat, dan gambar panorama Gunung Merapi dihilangkan. Sebagai gantinya para desainer logo menambahkan gambar atap rumah gadang dengan lima gonjong di atas gambar kerbau.

Logo perusahaan lagi-lagi mengalami pembaruan pada 1970. Dua lingkaran dihilangkan, sehingga tulisan Padang Portland Cement Indonesia dibuat melingkar sekaligus menjadi pembatasnya. Gambar kerbau hanya menampilkan kepalaanya saja dengan posisi menghadap ke depan. Di atas kepala kerbau dibuat pula gambar atap (5 buah) rumah adat. Muncul pula moto PTSP yang berbunyi "Kami Telah Berbuat Sebelum yang Lain Memikirkan". Namun, pada 1972 logo tersebut dimodifikasi dengan memunculkan dua garis lingkaran: besar dan kecil. Perubahan terjadi lagi pada 1991, saat tulisan Padang Portland Cement menjadi Padang Cement Indonesia.

Pada 2012 Semen Padang kembali mengubah logo. Pergantian ini dilakukan dengan pertimbangan, logo yang dipakai sebelumnya memiliki ciri tanduk kerbau, kecil dan rumit. Mata kerbau kelihatan tua, gonjong dominan, dan telinga terlihat kecil. Pada logo baru disempurnakan menjadi, tanduk kerbau menjadi besar dan kokoh, mata kelihatan tajam, gonjong menjadi sederhana, dan telinga pada selalu mendengar. **T**





www.imgur.com

DUET DEMI PROYEK MEMPAWAH

NOVA FARIDA

nova.farida@tambang.co.id

Merosotnya harga aluminium akibat kondisi ekonomi dunia yang kurang stabil tidak membuat Inalum berubah haluan. Perusahaan pelat merah itu, terus melakukan ekspansi untuk memperkuat lini usaha.

PERTENGAHAN Oktober lalu, salah satu ruang pertemuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tampak ramai. Beberapa pejabat penting terlibat sebuah perbincangan sepias. Hari itu merupakan agenda penting bagi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum untuk mempersiapkan pembangunan pabrik *smelter grade* alumina-alumina untuk keperluan pembuatan logam aluminium. Rencananya, smelter itu dibangun di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Direktur Utama Inalum, Winardi Sunoto, 51 tahun, mengatakan, pembangunan pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina itu untuk memperkuat lini bisnis perusahaan pelat merah itu di industri hulu aluminium di Indonesia. Pengoperasian pabrik bahan baku logam aluminium bisa mengurangi ketergantungan impor alumina, yang selama ini dilakukan Inalum untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk memperkuat ekspansi bisnis tersebut Inalum mengandeng PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Kedua BUMN itu sudah memasuki tahap pembuatan skema kerjasama, dituangkan dalam perjanjian antar-pemegang saham. Langkah itu diperlukan sebelum mendirikan perusahaan patungan dengan mitra strategis. Saat ini beberapa calon yang akan diajak menjadi mitra di antaranya perusahaan terkemuka dari Tiongkok, Rusia, dan Uni Emirat Arab.

"Kerjasama ini diperlukan, karena Inalum terus mendiversifikasi produknya untuk mendapat laba lebih besar. Ekspansi bisnis yang terintegrasi seperti ini dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk aluminium kami," ungkapnya kepada Majalah TAMBANG di kantor perwakilan Inalum, Jakarta.



Inalum dan Antam meneken nota kesepahaman untuk bekerjasama, Juli lalu, yang kemudian diikuti dengan penandatangan perjanjian induk. Direktur Utama Antam, Tedy Badrujaman mengatakan, pembangunan smelter itu merupakan bagian dari kegiatan hilirisasi yang bisa meningkatkan nilai cadangan bauksit milik Antam.

Pabrik pengolahan berkapasitas 2 juta ton per tahun itu ditargetkan mulai dibangun pada 2016, dan beroperasi pada akhir 2019. Untuk memenuhi kapasitas tersebut, bijih bauksit yang diperlukan bisa mencapai 6 juta *wet metric tons* (wmt) per tahun. "Rencananya dibangun bertahap. Tahap awal, kapasitasnya satu juta ton dulu," terang alumni ITB itu.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik pabrik pengolahan tersebut, Inalum tengah membangun pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 1.050 megawatt (MW). Pembangunannya dilakukan bertahap. Tahap pertama, 750 MW. Sisanya setelah 2025.

Dengan begitu, ujar Winardi, langkah tersebut bisa memuluskan rencana Inalum menambah kapasitas produksi aluminium menjadi 500 ribu ton per tahun pada 2020. Selain meningkatkan produksi, Inalum bisa mengurangi impor alumina.

Mantan direktur operasi PT Antam itu mengakui, sejauh ini pasokan bahan baku masih bergantung pada Australia. Memang belum ada satu pun pabrik pengolahan alumina di tanah air. Pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina yang sudah dibangun baru milik Harita Grup, pembangunannya sudah mencapai 40%.

"Kami impor bahan baku dari Australia. Saat ini juga sedang menjajaki India untuk kerjasama itu," akunya. India juga menjual alumina dengan kualitas tinggi dan harga jual yang kompetitif.

Winardi menyatakan, kontrak dengan Australia dilakukan dua tahun sekali, dengan harga yang sudah disepakati. Dalam setahun, untuk memenuhi produksi batangan aluminium siap olah (*ingot*) sebanyak 260 ribu ton, alumina yang dibutuhkan bisa mencapai 520 ribu ton. "Banyaknya bahan baku bisa dua kali lipat dari total produksi," jabar pria yang sejak 7 April 2014 menduduki jabatan sebagai direktur utama Inalum itu. Dalam sebulan, ia merinci, Inalum bisa mendapat kiriman alumina sebanyak dua kali dengan jumlah yang sudah disepakati.

Sejauh ini, sekitar 70% batangan aluminiumnya dipasarkan untuk dalam negeri. Sisanya diekspor.

Mengacu data dari Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Aplindo), kebutuhan aluminium ingot di tahun ini bakal meningkat 15% dari tahun 2014 yang mencapai 800 ribu ton.

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan, konsumsi aluminium ingot primer dan sekunder hingga kuartal I 2015, sebesar 208,9 ribu ton. Sementara, produksi dalam negeri baru bisa mencapai 153,9 ribu ton. "Produk aluminium dalam negeri yang diekspor sebanyak 2.500 ton," kata Budi Irmawan, Direktur Industri Material Dasar Logam Kementerian Perindustrian.

Sedangkan untuk aluminium ekstrusi, aluminium yang dibentuk dengan bentuk dan ukuran tertentu, konsumsinya mencapai 18.600 ton setahun. Konsumsi lembaran aluminium mencapai 39.200 ton. Budi mengatakan, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan pasar, Indonesia masih mengimpor aluminium ingot dari beberapa negara.

Di sisi lain, ujar Winardi, fakta itu menjadi peluang besar bagi Inalum. Sebagai satu-satunya perusahaan aluminium di Indonesia, Inalum memiliki hasrat besar untuk menguasai industri aluminium di dalam negeri. Saat ini, Inalum terus berupaya meningkatkan jumlah produksi secara bertahap. "Saat ini diusahakan bergerak ke level 300 ribu ton," ujar Winardi.

Pada semester I 2015, Inalum baru menjual aluminium batangan siap olah sebanyak 80 ribu ton. Dengan target penjualan 260 ribu ton hingga akhir tahun artinya masih ada 180 ribu ton aluminium ingot yang harus dikejar. "Saya tidak khawatir. Saat ini penjualan masih di angka rata-rata," kilahnya. Tahun lalu saja, produksi aluminium ingot mencapai 199.692 ton, naik 41% dari 2013.

Setelah devaluasi yuan, harga aluminium langsung tersungkur. Akhir September lalu bahkan mencapai US\$1.549 per metrik ton, terendah sejak 2009, sebagai akibat loyonya perekonomian Cina. Malahan beberapa analis meramalkan, permintaan akan aluminium dipastikan belum bisa meningkat dalam waktu dekat.

Winardi sudah meminta manajemen Inalum melakukan beberapa langkah antisipasi. Di antaranya dengan memaksimalkan penjualan, meningkatkan kinerja pemasaran, serta efisiensi operasional.



PASOKAN DAN KONSUMSI PRODUK INDUSTRI LOGAM

Produk Industri Material Dasar Logam Bukan Besi



No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 trw. 1	Trend (%) (2009-2014)
1 Aluminium Ingot primer Dan Sekunder (Alloy Ingot)										
Produksi	441.7	484.8	503.0	530.8	552.2	583.5	611.6	153.9	153.9	
Eksport	153.9	160.9	160.9	40.2	153.8	151.0	106.6	2.5	2.5	
Impor	222.7	277.9	295.2	379.1	440.7	386.4	249.4	57.5	57.5	
Konsumsi	477.4	517.2	539.7	769.7	839.0	819.0	754.5	208.9	208.9	
Kapasitas	492.6	502.6	509.6	539.6	594.4	594.4	594.4	148.6	148.6	
Utilitas (%)	89.7	96.4	98.7	98.4	92.9	98.2	102.9	103.6	103.6	



No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 trw. 1	Trend (%) (2009-2014)
2 Aluminium Ekstrusi										
Produksi	49.3	52.5	56.0	59.3	62.7	69.6	76.5	18.8	7.69	
Eksport	11.2	10.7	9.5	11.2	12.9	15.4	21.8	5.3	15.82	
Impor	9.9	9.6	13.4	16.8	6.3	13.5	22.6	5.1	12.99	
Konsumsi	48.0	51.3	59.9	64.9	66.1	67.6	77.2	18.6	7.19	
Kapasitas	100.0	00.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	25.0		
Utilitas (%)	49.3	52.5	56.0	59.3	62.7	69.6	76.5	75.2		



No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 trw. 1	Trend (%) (2009-2014)
3 Aluminum Sheet										
Produksi	61.9	65.7	67.2	70.3	72.3	76.3	80.3	20.2	4.10	
Eksport	45.0	33.4	79.8	91.3	87.0	67.5	72.5	20.9	9.97	
Impor	140.0	62.2	95.5	143.8	114.7	124.7	174.0	39.9	17.75	
Konsumsi	56.9	94.5	83.0	122.8	100.0	133.5	181.8	39.2	13.69	
Kapasitas	116.0	116.0	116.0	16.0	116.0	116.0	116.0	29.0		
Utilitas (%)	53.4	56.7	57.9	60.6	62.3	65.8	69.2	69.5		

Ribuan Ton

"Salah satunya ya itu, mencari bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Negosiasi bisnis juga patut dilakukan untuk mendapatkan harga yang bagus," sambungnya

Selain itu, dengan memiliki pembangkit listrik sendiri Inalum bisa menekan biaya produksi. Untuk menggerakkan pabriknya, terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Inalum memanfaatkan air Danau Toba.

Ada dua PLTA yang beroperasi, yaitu PLTA Siguraga dan Tangga. Tenaga listrik yang dihasilkan kedua PLTA tersebut disalurkan ke pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung melalui 271 unit menara yang menyangga jaringan transmisi sepanjang 120 km. "Dari total listrik yang mencapai 603 MW, sebanyak 90 MW dijual ke PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara," jelasnya.

Saat ini selain serius membangun smelter alumina, Inalum juga tengah mendirikan pabrik *aluminum alloy* (campuran) dan *billet* (batangan), yang targetnya kelar akhir 2016. Meski proses pembangunan pabrik tersebut baru berjalan 20%, Winardi optimistis akhir tahun depan kedua pabrik itu sudah bisa beroperasi. "Ekspansi bisnis ini tinggal menambah dan memperluas pabrik yang sudah ada. Tinggal tambah mesin. Tidak perlu tambahan operator," jabarnya.

Bahkan, katanya, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil tender untuk menentukan siapa pengembang produk *alumunium alloy* dan *billet*. "Sebenarnya sudah ada obrolan lebih lanjut sih, kemungkinan pemenangnya dari Eropa salah satunya dari Swiss," detailnya.

Kapasitas produksi alumunium *alloy* dan *billet* ditargetkan masing-masing 30 ribu ton dan 90 ribu ton per tahun. Tetapi untuk tahap awal, pabrik itu baru bisa produksi alumunium alloy sebanyak 2.000 ton dan 3.000 ton untuk billet. "Mernang produksi terbesar masih berupa aluminium ingot, tetapi tiap tahun jumlah *alloy* dan *billet* akan bertambah," tambahnya.

Ia optimistis penyerapan kedua produk tersebut bakal lancar lantaran banyaknya proyek konstruksi yang sedang berjalan, dan berkembangnya industri otomotif. Meskipun ia menyayangkan di Indonesia belum ada pengembang yang bisa mengolah *alumunium alloy* dan billet keluaran Inalum menjadi produk jadi. "Terpaksa kami ekspor dulu, di Indonesia belum ada," katanya.

Bahkan pada 2017 akan ada produk lain berupa slab, rod, otoparts, dan ekstrusi. Penambahan produk turunan ini, katanya, membuat produksi Ingot berkurang. Ia mencontohkan, pada 2020 dengan rencana total produksi sebanyak 500.000 ton, produk Ingot hanya 180.000 ton dari total produksi alumunium ingot tahun ini. ■

BAJA LATERIT

SIAP MASUK PASAR

NOVA FARIDA

nova.farida@tumbang.co.id

Kebutuhan baja konstruksi di tahun 2020 diprediksi mencapai 20 juta ton. Untuk menjawab kebutuhan itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggagas produksi baja laterit, baja dengan kadar nikel rendah atau dikenal dengan istilah nikel limonit.

Kepala LIPI Iskandar Zurkarnain menerangkan, Indonesia memiliki nikel laterit dalam jumlah cukup banyak. Indonesia tidak memiliki bijih besi berkadar nikel tinggi dengan jumlah yang memadai sebagai bahan baku baja. "Untuk mengatasinya, kita bisa memanfaatkan nikel limonit," ujarnya pada acara Seminar Material Metalurgi 2015, 20 Oktober lalu, di Jakarta.

Iskandar menjelaskan, program itu digagas untuk mendukung Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang salah satunya mengunggulkan sektor kemanufakturan. Bijih besi laterit ini

digadang-gadang bisa membangun industri baja nasional untuk lebih mandiri, unggul, dan siap bersaing di pasar global. Jika dibandingkan dengan baja lainnya, baja laterit dinilai lebih kuat, tahan korosi, dan mudah dilas.

Peneliti senior di Pusat Metalurgi dan Material LIPI, Yusuf, mengatakan, pengembangan baja laterit oleh Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengolahan Mineral LIPI Tanjung Bintang Lampung itu rencananya dibagi menjadi tiga tahapan. Dalam waktu dekat, uji coba produksi akan dilakukan di angka 100 ton, selanjutnya jumlah produksi naik menjadi 100 ribu ton per tahun. Jika tahap tersebut terbilang sukses, produksi komersial bakal menyentuh angka 2 juta ton per tahun.

Produksi komersial itu disiapkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan baja di tahun 2020 sebanyak 20 juta ton. Lalu pada 2025 disiapkan sebanyak 26 juta ton, dan 2030 dengan jumlah 35 juta ton. Selain pasar dalam negeri, industri baja laterit itu juga disiapkan untuk masuk ke pasar besar ASEAN. Permintaan baja Indonesia pada









GROWING TOGETHER

bkt-tires.com

EARTHMAX
RADIAL OTR TYRES

Power & Force in motion....

BKT INDUSTRIAL & OTR TYRES. AMAZING QUALITY.



PT. Bumi Ban Mandiri
Komplek Ruko Puri Mutiara
Jl. Griya Utama Blok A 33
Sunter Griya, Jakarta 14350 - Indonesia

Tel : +62 21 6531 0782, 6531 0784.
Fax : +62 21 6531 0785
Email : inquiry@bumibanmandiri.com



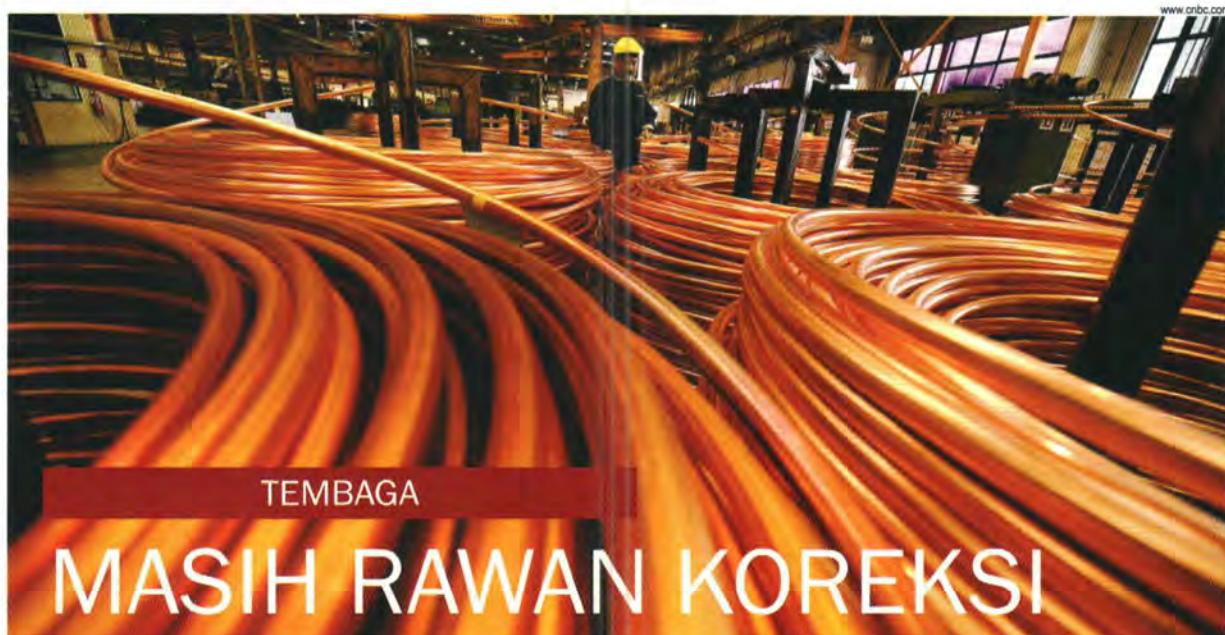
2030 diperkirakan 40 hingga 45 juta ton setahun, dengan kapasitas produksi 50 juta ton. Sementara pasar ASEAN 120 - 130 juta ton.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) juga

ikut mendorong agar pembangunan dan pasar industri baja bisa memenuhi pasar domestik. IISIA memprediksi, konsumsi baja pada 2020 akan meningkat dari 51 kg/kapita menjadi 84 kg-100 kg/kapita.

Kementerian Perindustrian pun membenarkan adanya peningkatan konsumsi baja, seiring dengan peningkatan produk domestik bruto. Menurut penghitungan Kemenperin, pada 2012, GDP per kapitanya di bawah US\$ 10 ribu dengan konsumsi 29,6 kg. Sedang untuk 2020, bakal naik mendekati US\$ 10 ribu dengan konsumsi 55,9 kg. Padat 2025, GDP-nya mencapai US\$ 15 ribu dengan konsumsi sebanyak 70 kg.

Lipi akan menggandeng PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Krakatau Steel Tbk untuk memproduksi baja laterit. Antam memiliki tambang nikel berkarbon rendah di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Sementara, Krakatau Steel dikenal sebagai salah satu produsen baja terbesar di Indonesia. ■



Awal bulan lalu, harga tembaga terdeteksi naik. Meski begitu, beberapa analis masih meramalkan menjelang akhir tahun harga tembaga kemungkinan besar kembali tersungkur akibat ancaman kenaikan suku bunga oleh The Fed, diperkirakan Desember mendatang, bisa terjadi.

Analis PT Equilibrium Komoditi Berjangka, Ibrahim mengatakan penurunan harga tembaga juga bisa didorong oleh naiknya nilai tukar dolar. Selain itu ada beberapa pemicu lain seperti data manufaktur Tiongkok dan Eropa yang masih di bawah level 50.

Pasalnya, jika kedua negara tersebut masih mengurangi konsumsi tembaga, itu artinya pasokan tembaga akan membanjir. Tiongkok dan Eropa merupakan pemain tembaga yang cukup menentukan. Melansir data dari International Copper Study Group, hingga pertengahan tahun pasokan tembaga surplus 15.000 ton.

Ibrahim memperkirakan, besar kemungkinan ke naikan suku bunga The Fed terealisasi di bulan depan. Walaupun banyak pengamat yang menilai tidak akan terjadi terlebih setelah adanya intervensi dari *International Monetary fund* (IMF) yang telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 7% hingga 6,8%.

Jika kenaikan The Fed terealisasi, pria yang juga menjabat sebagai Direktur PT Equilibrium Komoditi Berjangka itu menegaskan harga tembaga tergerus di angka US\$4.200 per metrik ton. Tetapi jika sebaliknya, maka harga tembaga bisa tergerek ke level US\$5.500 per metrik ton.

Yang jelas, kata Ibrahim, turunnya harga tembaga sudah berimbas banyak pada industri. Beberapa perusahaan terpaksa menyetop aktivitas produksinya lantaran tak seimbangnya harga produksi dan nilai jual. Hingga Oktober, produksi tembaga dunia dipangkas 780 ribu ton. ■



INDONESIA MINING CONFERENCE

SIMELTER DAN PERTAMBANGAN BERKESINAMBUNGAN

Kamis, 3 Desember 2015

Pukul 8:30 – 13.00 WIB

Kalimantan - Maluku Room
Hotel Shangri-La Jakarta
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1 Wisma 46,
Jakarta Pusat



KEYNOTE SPEAKER

Sudirman Said, MBA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



SPEAKERS

Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M

Dirjen Mineral dan Batubara - Kementerian ESDM



Dr. Ir. Sukhyar

Ketua Asosiasi Smelter Indonesia



Ir. Winardi Sunoto, M.M

Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)



Dr. Ir. S. Witoro Soelarno

Pakar Lingkungan



RUKMI HAPSARI
rukmi.hapsari@tambang.co.id

Sam Pa. Seorang yang tidak diketahui jelas latar belakangnya, tapi begitu besar jaringan bisnis dan pengaruhnya, bahkan di Indonesia.

Sam Pa, seorang pengusaha jetset tapi masa lalunya tidak banyak yang tahu. Ia hanya diketahui lahir di Cina daratan pada tahun 1958 kemudian pindah ke Hong Kong saat masih kanak-kanak. Ia mempunyai kewarganegaraan ganda, yaitu Cina dan Angola. Sebagai pengusaha tajir, namanya juga ada beberapa. Kongres Amerika mendapatkan namanya ada beberapa: Sam Pa, Sampa, Samo, Sam King, Sa Muxu, Xu Songhua, Xu Jinghua, Ghui Ka Leung.

Di Indonesia, nama Sam Pa memang tidak begitu terkenal. Tetapi Anda mungkin masih ingat, di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan bahwa Indonesia akan mengimpor minyak langsung dari Angola melalui perusahaan bernama Sonangol. Hingga kini belum jelas nasib perniagaan minyak mentah itu. Sam Pa adalah pemilik Sonangol.

Kehadiran Sonangol di Indonesia juga bisa dilacak pada Mei lalu. Ketika itu Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan gedung Indonesia 1 di Jalan Thamrin, kawasan super mahal di Jakarta. Gedung itu

merupakan investasi bersama antara kelompok Media Group yang dipimpin Surya Paloh dengan Sonangol Land, yang dipimpin Sam Pa.

Meroketnya bisnis Sam Pa bermula saat ia bertemu Presiden Angola, Jose Eduardo Dos Santos. Seperti dila-porkan Majalah Ekonomi *Financial Times*, setelah tiga de-kade perang saudara yang dipicu perebutan minyak, berlian, dan persaingan negara adidaya, Angola berada dalam keruntuhannya dan membutuhkan dana untuk membantu rekonstruksi.

Namun saat itu donor dari Barat sedang mewaspada untuk menyalurkan dana kepada rezim dengan re-putasi korupsi. Dos Santos pun melirik ke timur. Sam Pa mengulurkan tangannya. Ia datang pada saat dan waktu yang tepat. Pada akhir perang sipil Angola itu, pada tahun 2002, utusan Dos Santos melakukan kerjasama megadeal pertama antara Cina dan Afrika bernilai miliaran dolar.

Dari hasil hubungannya dengan Presiden Dos Santos, Sam Pa berhasil memonopoli proyek rekonstruksi usai perang di Angola. Ia akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya.

Sam Pa berhasil membawa rombongan pengusaha dari Cina, bahkan mendatangkan biaya berbunga rendah. Kredit murah dari Cina tersebut dipakai untuk mendanai jalan, kereta api, dan perumahan, dan dilunasi dalam bentuk minyak. Tawar-menawar antara sumber daya alam dengan infrastruktur ini disebut oleh ahli dengan "Angola Mode" seperti yang ditiru di tempat lain. Angola akan menjadi pemasok minyak mentah terbesar Cina setelah Arab Saudi.

Kesepakatan Cina dengan Angola dijadikan sebagai pakta antara dua negara. Tapi dibayang-bayangi bentuk kesepakatan paralel, perpaduan kepentingan pribadi dengan kekuasaan negara.

Sam Pa membuat dirinya semakin dikenal sebagai perantara yang membantu China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), perusahaan kilang minyak besar di Cina, memenangkan kontrak di Angola pada tahun 2003. Saat itu, perusahaan minyak Cina tengah berusaha keras berekspansi ke luar negeri.

Lama-kelamaan, Sam Pa mulai lihai dalam berbisnis, hingga ia bisa menjadi pemilik bisnis dari sejumlah perusahaan China yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaannya, di antaranya, China Steel 20 (Zhongtie 20), Guanxi Construction and Engineering, Guanxi Water and Electric, Sichuan Nanchong, Sichuan Uingshan, Fuikan-Ningde, Jinghend International dan banyak lagi.

Sam Pa mempunyai mitra bernama Hekder Bataglia. Ia merupakan penduduk Angola namun lahir di Portugal. Terkesan dengan kemampuan Sam Pa untuk membuka pintu bisnis bagi Cina, Bataglia sepakat untuk membentuk kemitraan. Setelah mencari proyek energi dan infrastruktur di Amerika Selatan, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Angola.

Meski demikian, Bataglia tidak terlalu mengerti akan masa lalu Sam Pa. Bataglia pernah mengatakan bahwa ia mengira Sam Pa bekerja untuk dinas rahasia dan memiliki misi untuk memperluas bisnis Cina ke dunia.

Seperti dilaporkan koran ekonomi Financial Times, menurut sumber yang dekat dengan badan intelejen Afrika, Sam Pa pernah bekerja pada badan intelijen Cina untuk menangani urusan luar negeri, pada awal 1980an. "Seumur hidupnya, dia bekerja untuk badan intelijen," ujar sumber tersebut.

Sam Pa nampaknya telah mengumpulkan kontak orang penting di Afrika selama bertahun-tahun di intelijen China. "Sam Pa mengatakan kepada saya bahwa 10 atau 15 tahun yang lalu ia berada di Angola," kenang Bataglia, saat mereka bertemu pertama kalinya pada tahun 2003. Bataglia mengatakan, waktu itu Sam Pa pergi ke Angola untuk tujuan resmi. Tapi ia tidak merinci misi Angola nya untuk bertemu Dos Santos.

Seorang mantan intelijen juga mengatakan kepada Bataglia bahwa Sam Pa terlibat dalam penjualan senjata dari Cina untuk pemerintah Dos Santos saat perang sauda-



Gedung Sonangol di Angola

ra. Namun Bataglia tidak bisa membuktikan, jika memang Sam Pa berperan dalam penjualan senjata itu, karena informasi yang ada tidak jelas, bahkan dari pelaku perdagangan senjata sendiri.

Sam Pa membangun jaringan perusahaan yang terdaftar di 88 Queensway, Hong Kong. Kelompok ini tergabung dalam jaringan bisnis British Petroleum, Total, dan Glencore. Nama 88 Queensway Group ini diambil dari singkatan beberapa bisnis yang berdomisili di Two Pasific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong.

Dengan jaringan 88 Queensway, Sam Pa dengan lincah mendekati sejumlah negara di lima benua guna memajukan hubungan bisnis negara tersebut dengan Cina. Banyak bisnis yang dimiliki oleh kelompok usaha Queensway, mulai dari proyek gas di Indonesia, penyulingan minyak di Dubai, proyek apartemen mewah di Singapura, hingga pengadaan armada pesawat Airbus di Korea Utara dan Rusia.

Dua perusahaan penyokong dana dari bisnis tersebut adalah China Sonangol yang khusus menangani kontrak-kontrak perusahaan minyak, dan China International Fund (CIF) yang bergerak di bidang infrastruktur. CIF didirikan Sam Pa dan mitra bisnisnya Lo Fong Hung pada tahun 2003 di Hong Kong dan terlibat dalam bisnis minyak dan perdagangan mineral di Afrika. Ia kemudian menjual sumber daya alam itu ke klien di Cina.

Keduanya memang tidak berpengalaman tentang bisnis minyak. Namun banyaknya jaringan di kalangan pejabat tinggi di Afrika dan Cina membuat keduanya mudah memenangkan kontrak.

Tapi, tak mudah untuk membuktikan bahwa Sam Pa adalah pemilik 88 Queensway. Meski ia punya pengaruh kuat di sebuah perusahaan, tetapi namanya sering tidak tercantum di akta resminya. Karena itu media asing biasanya hanya menyebut bahwa Sam Pa "disebutkan sebagai Presiden China International Fund." Laporan Kongres Amerika menyebut bahwa "Sam Pa terlibat di kelompok '88 Queensway." Lebih dari 30 perusahaan yang terdaftar menggunakan alamat Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong.

Sebagai orang intelijen, Sam Pa pun beroperasi layaknya orang intel. Ia lebih suka dianggap sebagai orang biasa. Ia tak mau terlihat menonjol sebagai petinggi. Biasanya Sam Pa menempatkan orang kepercayaannya, dan mengontrol mereka untuk memainkan strategi bisnis



Meroketnya bisnis Sam Pa (kedua dari kiri) bermula saat ia bertemu Presiden Angola.





Kilang minyak milik Sonangol.

yang dimilikinya. Financial Times menyebutkan operasi multinasional Sam Pa merupakan gerakan "hantu" dan "kerajaan neraka".

Kerajaan bisnis Sam Pa ini memiliki sebuah yayasan di Afrika, di gedung pencakar langit di Luanda, ibukota Angola, yang berfungsi sebagai kantor pusatnya. Walau pun ia mengelak dikatakan sebagai pemegang saham atau direktur, tapi Sam Pa sering kali bertindak sebagai wa-kil jaringan dalam pertemuan dengan orang-orang penting dan petinggi negara.

Namun Sam Pa akhirnya tersandung masalah. Ia ditangkap pada 8 Oktober 2015 di sebuah hotel di Beijing terkait dengan keterlibatan perusahaannya, China Sonangol, perusahaan patungan antara Queensway dengan perusahaan minyak Angola, dalam proyek perusahaan minyak Tiongkok, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).

Karena mempunyai kewarganegaraan ganda yaitu China dan Angola, Sam Pa mudah menggaet kontrak-kontrak migas dengan nilai fantastis yang berasal dari Angola.

Reuters menulis, Sam Pa menjadi perantara untuk membantu mengamankan tawaran raksasa atas minyak mentah milik Angola. Terkait hal tersebut, baik Sam Pa maupun Sinopec menolak berkomentar.

Sehari sebelumnya pemerintah Cina memang sedang menyelidiki tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Fujian, Su Shulin. Shulin sendiri sudah ditahan dan menjadi sasaran investigasi yang menjadi bagian dari kampanye anti-korupsi yang digerakkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Su Shulin diduga menyalahgunakan kewenangannya saat memimpin Sinopec antara tahun 2007-2011. Su Shulin memutuskan bekerjasama dengan Cina Sonangol, perusahaan patungan antara Queensway dengan perusahaan minyak Angola yang dipimpin Sam Pa, untuk berinvestasi di Angola.

Kerjasama ini melahirkan usaha baru yaitu Sonangol Sinopec International (SSI), pada 2004. Perusahaan patungan ini membeli lima ladang minyak lepas pantai di Angola, semua modalnya dari Sinopec, yang mempunyai 55% kepemilikan saham di proyek itu. Sonangol yang seharusnya membayar US\$10 miliar kepada Sinopec

malah ongkang-ongkang kaki tidak menyertakan modal pembelian ladang minyak tersebut.

"Akuisisi ladang di Angola sejak tahun 2008 menjadi petaka bagi Sinopec. Perusahaan terus berinvestasi tanpa memperoleh hasil," tulis Caixin Magazine.

Pemerintah Cina kemandirian turun tangan dengan menunjuk tujuh perusahaan auditor pada April 2015. Di antaranya PricewaterhouseCoopers (PwC) guna penelusuran aset besar perusahaan Cina di luar negeri.

Di Indonesia, jejak kehadiran Sam Pa bahkan sudah sampai di Istana Negara, tempat Presiden Joko Widodo berkantor. Pada November 2014, ketika Jokowi belum setahun jadi presiden, Indonesia melalui Plt Direktur Utama Pertamina Muhammad Husen dan Chairman of Board of Directors Senangol EP Francisco de Lamos Jose Maria, disaksikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Vicente, menandatangani nota kesepahaman pembelian minyak mentah dari Angola. Penandatanganan ini adalah instruksi kepala negara kepada BUMN masing-masing.

Adalah Surya Paloh, pengusaha serta politikus yang membawa Sam Pa ke Istana Negara. Surya dan Sam Pa adalah kawan lama. Sam Pa juga pernah terlibat dalam membantu participating interest Surya Energi Raya, perusahaan milik Surya Paloh, di Blok Cepu, senilai US\$200 juta.

Seorang pengacara perusahaan Cina Sonangol di Singapura, Kin Jee Wee, mengatakan pihaknya telah mendengar kabar penahanan Sam Pa, dari media di Cina. "Kami telah sejak melihat laporan di media di Cina bahwa dia telah ditahan. Kami telah mencoba untuk menghubungi dia untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tidak berhasil," kata Mr Jee dalam surat elektroniknya.

Kin Jee Wee menambahkan bahwa kewajiban dan komitmen perusahaan untuk menghormati peristiwa itu tidak tergantung pada apa yang terjadi pada setiap individu. Menurut dia, perusahaannya akan tetap bekerja seperti biasa. Dia berdalih bahwa Sam Pa berposisi sebagai sekadar penasihat perusahaan.

Tampaknya bukan sekadar penasihat, karena kuasanya melebihi siapapun, termasuk si direktur utama. ■

ULAR MUNCUL DI SELANG SPBU

SEORANG pria Australia bernama Adzy Heist mungkin tidak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa unik saat ia mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar. Sebagai pemilik mobil, Heist biasa mengisi bensin.

Bagaimana jadinya apabila saat mengisi bensin, tiba-tiba seekor ular muncul dari pompa? Itulah yang ia alami. Heist saat itu sedang mengemudi ke Bandara Sydney lalu ia berhenti untuk mengisi bahan bakar di pom bensin. Namun ia melihat sesuatu yang aneh di selang pompa bensin tersebut. "Saya pikir tidak, itu tidak mungkin," kata Heist seperti dikutip dari Daily Mail.

Ia mencoba melihat lebih dekat dan menemukan ular karpet besar, dengan kepala seukuran kepala tangannya yang mencoba keluar dari selang pompa.

Untunglah Heist seorang insinyur kimia dan lingkungan sehingga ia tidak panik saat menemui ular tersebut. Justru yang membuat dia terkejut adalah, manajemen stasiun bensin hanya menempatkan kerucut lalu lintas berwarna oranye di pompa yang terdapat ular tersebut, sambil menunggu bantuan pihak terkait.

Ular karpet memang tidak berbisa, namun tetap saja banyak orang yang tidak berani menangkapnya. Apalagi cuaca yang menghangat di Australia, membuat



ular terbangun dari hibernasi musim dingin ular mereka.

Di Australia tercatat sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus tahun ini, sudah ada sekitar 813 panggilan darurat akibat ular atau laba-laba.

TAMBANG EMAS DI AREA SAWAH

DESA Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sedang dibuat geger dengan aktivitas masyarakatnya yang ramai-ramai berburu emas di ladang persawahan. Kejadian berawal ketika sejumlah warga menemukan benda kuno seperti lesung, batu mirip tempat persujudan, perhiasan, topeng emas, hingga guci berisi ribuan koin kuno berlapis emas seberat dua kuintal.

Bahkan sejak 2010 menjelang musim penghujan, semua warga di salah satu dusun yakni Dusun Medang beramai-ramai mencari emas maupun perhiasan berharga di areal persawahan miliknya. Mereka bukan hendak bercocok tanam tapi menjadikan lahan persawahannya bak tambang emas.

"Seperti menambang emas di sawah. Setiap kami beraksi minimal dapat satu ons emas berupa serbuk. Hasilnya karni bagi rata. Ada juga yang mendapat perhiasaan kerajaan maupun patahan emas. Ini sudah berlangsung sejak lima tahun lalu karena memang menjanjikan," kata warga Dusun Medang, Suwadi.

Menurutnya meski sekitar 30 hektare lahan pertanian itu berulang kali dijadikan lokasi penambangan namun serbuk emas maupun perhiasan berharga itu sepertinya tidak pernah habis. "Anehnya serbuk emas maupun berupa gumpalan emas selalu muncul saat kami mencarinya. Bahkan perhiasan berharga juga ditemukan. Pokoknya ini aset bagi kami."

Seakan tak pernah habis emas yang terkandung di tanah karni," ungkapnya.

Kepala Desa Banjarejo, Ahmad Taufik, mengatakan pihak desa mulai kebingungan lantaran setiap menjelang sore puluhan pengunjung dari berbagai daerah selalu berdatangan ke lokasi temuan pondasi yang diduga bekas kerajaan Medang Kamulan. Dalam literatur, kerajaan diduga ada antara abad ke-8 hingga 11 Masehi.

Warga mendesak dilakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran nilai historis di tanah kelahiran mereka. Keyakinan warga Banjarejo makin kuat bahwa desanya dulu sebagai pusat kerajaan masa Prabu Dewata Cengkar dan Ajisaka, setelah ditemukannya pondasi bangunan yang diduga bekas konstruksi kerajaan.



KEMBANG KEMPIS SMELTER NIKEL

RUKMI HAPSARI
rukmi.hapsari@tambang.co.id

Anjloknya harga nikel menjadi hambatan pengusaha pabrik pengolahan dan pemurnian. Pabrik-pabrik yang hampir berdiri memilih mundur beroperasi.

HARGA komoditas nikel yang tidak stabil dalam empat bulan terakhir sangat mempengaruhi para pengusaha. Tak ayal, rencana pengoperasian pabrik pun mundur sampai waktu yang belum diketahui kapan akan tiba. Sebutlah PT Macika Mineral Industri (MMI) yang membangun smelter nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Pembangunannya sendiri sebenarnya sudah selesai sejak bulan September 2015 yang lalu. Namun perseroan menunda comissioning (uji coba) produksi. Ramli Halim,

Direktur Macika Mineral Industri (MMI) mengatakan, berhubung dengan harga nikel di pasaran sekarang ini kurang menguntungkan untuk perseroan, maka perseroan menunda uji coba produksi hingga awal tahun depan, "Kita lihat bagaimana perkembangannya," ujarnya kepada TAMBANG.

Menurut Ramli, perseroan juga belum berencana untuk mengimpor kokas sebagai salah satu bahan baku karena keterbatasan dana yang dimiliki perseroan. Ia juga belum bisa memastikan kapan pabrik mulai bisa beroperasi.

Untuk pembelian bahan baku, nantinya Macika akan meminjam ke pihak ketiga bukan perbankan, yaitu perusahaan dagang asing. Perbankan nasional sendiri pernah diajaki kemungkinannya tapi sulit karena perbankan menginginkan contoh nyata hasil ekspor Macika.

Perbankan baru tertarik untuk memberikan pinjaman setelah Macika berproduksi dan ekspor. Padahal, jika pinjaman tidak dilakukan saat perseroan berproduksi, pembiayaan ini dianggap sudah telat. Beberapa perusahaan besar lain biasanya membawa pendanaan langsung dari Cina.



Secara teknis, apabila *smelter* sudah siap beroperasi maka seterusnya harus tetap beroperasi. Jika tiba-tiba berhenti, akan memakan biaya yang besar ketika nanti harus kembali berproduksi. Permanasan tungku dan persiapan material jadi beban produksi yang paling boros. "Tapi kalau kita selesainya lebih awal dan sudah berproduksi, apa boleh buat, pasti kita akan berjalan terus," paparnya.

Penggunaan kokas untuk *smelter* nikel mencapai 60% dan harganya lebih mahal dari bahan baku kedua yaitu bijih nikel. Bijih nikel akan didapatkan Macika dari PT Macika Mada Madana (MMM), induk usaha Macika Mineral yang bekerja sama dengan perusahaan Cina, PT Brilimetal. Macika Mada Madana merupakan pemilik izin usaha produksi (IUP) seluas 700 hektare dengan cadangan nikel mencapai 8 juta ton.

Karena pembangunan yang mangkrak pula tenaga kerja asing yang akan membantu mengoperasikan *smelter* Macika Mineral saat ini sudah kembali ke Cina. Tenaga ahli ini memang sangat dibutuhkan perseroan untuk mengoperasikan teknologi *blast furnish*. Ramli mengklaim teknologi ini adalah hasil inovasi Cina.

"Jadi tak salah jika operatornya dibantu oleh tenaga ahli dari si empunya."

Tidak hanya Macika Mineral. Perusahaan pemurnian lain juga tengah mengalami kemunduran. Walaupun bukan dalam hal pembangunan atau harga, tetapi masalah teknis. Jonatan Handojo, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengatakan, *smelter* nikel lain yang juga menghentikan pembangunan adalah PT Heng Tai Yuan. Sayangnya Jonatan tidak merinci lebih lanjut mengenai hal ini.

Namun Jonatan menjelaskan bahwa harga nikel saat ini rata-rata mencapai US\$10.470 per metrik ton. Nilai itu masih terlalu rendah meskipun tidak menyebabkan pabrik yang sudah eksis jadi tutup.

Kementerian ESDM memproyeksikan, dari 35 pabrik yang sedang dibangun, hanya dua yang bisa selesai pada tahun 2016. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, bahwa ini adalah dampak pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. Program peningkatan nilai tambah ini diakuinya belum berjalan baik. Selain nikel, beberapa *smelter* perkembangannya juga stagnan.

Menurut data dari Kementerian ESDM Direktorat Jendral Minerba, jumlah *smelter* nikel adalah 35 pabrik dengan 44 perusahaan pemegang IUP. Hanya 5 *smelter* yang tingkat kerajuannya 6%-10% dengan kapasitas input total 2,3 juta ton per tahun. Sedangkan yang tingkat kemajuannya 11%-30% berjumlah 12 *smelter* dengan kapasitas input total 10,5 juta ton per tahun.

Untuk kategori 31%-50% ada 9 *smelter* dengan kapasitas input total 5,3 ton per tahun. Sementara itu kategori 51%-80% terdapat 5 *smelter* dengan kapasitas input total 3 juta ton per tahun. Terakhir kategori 81%-100% ada 4 *smelter* dengan kapasitas input total sebesar 6,6 juta ton/tahun.

Harga Nikel

Pemerintah Cina memang sedang mencari cara untuk memperbaiki ekonomi. Industri manufaktur dan konstruksi sebagai penggerak ekonomi terlihat goyah dengan tingkat konsumsi yang semakin turun. Mengutip dari



Bambang Gatot Ariyono

Bloomberg, (26/10), harga nikel kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange turun 0,4% ke level US\$ 10.470 per metrik ton. Namun demikian, dalam sepekan terakhir harga nikel naik 0,8%.

Harga nikel masih gagal terkerek setelah keluarnya keputusan bank sentral, *People's Bank of China* untuk memangkas tingkat suku bunga. Investor malah tambah khawatir terhadap kondisi ekonomi Cina sebagai konsumen nikel terbesar di dunia pasca kebijakan dari PBOC ini.

Bunga kredit di Cina pun ikut turun menjadi 4,35% dari sebelumnya 4,6%, sedangkan bunga deposito dipangkas menjadi 1,5% dari sebelumnya 1,75%. Sejak November 2014, negeri tirai bambu itu tercatat sudah enam kali memangkas tingkat suku bunga. Kebijakan ini sendiri bertujuan untuk mendorong belanja masyarakat serta meringankan biaya pinjaman perusahaan.

"Tindakan stimulus gagal menenangkan pasar dan pelaku pasar terlihat masih khawatir permintaan metal tetap lemah," ujar Xiao Jing, analis Capital Futures Co.

Kebingungan pengusaha atau investor pabrik pemurnian atas menurunnya harga komoditas menambah daftar panjang pekerjaan rumah pemerintah. Pasalnya selain dihantam harga, saat ini banyak aturan yang bertaburan sehingga perlu banyak penyesuaian dan memakan waktu untuk mengurus suatu izin.

Jumlah Smelter Mineral

No.	Komoditas	Jumlah IUP	Jumlah Fasilitas Pengolahan /pemurnian	Juni 2015
1.	Nikel	44	35	
2.	Bauksit	11	6	
3.	Besi	8	8	
4.	Mangan	3	3	
5.	Zirkon	13	11	
6.	Timbal dan Seng	4	4	
7.	Kaolin dan Zeolit	4	4	
Total		87	71	

Sumber : Ditjen Minerba

Untuk membangun sebuah *smelter*, investor harus mengajukan izin. Masalahnya, izin tersebut saat ini bisa diajukan kepada dua kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perindustrian. Padahal, dua kementerian tersebut jelas mempunyai peran berbeda. KESDM menangani industri hulu, dan Kemenperin menangani industri hilir.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot pernah mengatakan bahwa, *smelter* yang bahannya dari *raw material* tambang harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian (IUP OP PP). Dengan izin tersebut, maka antara tambang dan pengolahan pemurnian atau *smelter* akan terintegrasi tanpa terkendala masalah bahan baku. Namun terkadang pemrosesannya memang terpisah.

Sedangkan bagi Kemenperin, pihaknya menganggap bahwa *smelter* merupakan bahan setengah jadi yang sudah bisa diolah bagi industri hilir, sesuai dengan kewenangannya. Kemenperin merasa berwenang mengeluarkan Izin Usaha Industri (IUI) untuk investor agar bisa membangun sebuah *smelter*. Sayangnya, hal ini menimbulkan kendala akan pasokan.

Menanggapi masalah yang sudah berlarut-larut ini, pemerintah menengahi dengan cara akan memproses perizinan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) tambang mineral melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan ranah *smelter*, perundingan masih terus dilakukan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

Izin usaha Macika Mineral Industri (MMI) adalah IUP OP PP. Sejak awal perseroan mengajukan izin ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan IUP OP PP.



"Saya pernah mendengar kalau beberapa perusahaan memang mengajukan izin Izin Usaha Industri (IUI). Kalau IUP OP PP memang kelihatannya lebih ketat," ujar Ramli Halim.

Di Cina, sebuah perusahaan bisa membeli bahan baku dari mana pun. Sedangkan untuk di Indonesia malah banyak perusahaan tambang yang kesulitan untuk menjual produknya.

Salah satu pemilik IUP OP di Sulawesi Utara misalnya, mengeluhkan biji nikel hasil produksinya tidak bisa dijual ke koleganya yang mempunyai pabrik *smelter*. Perusahaan tersebut mengadukan hal ini ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

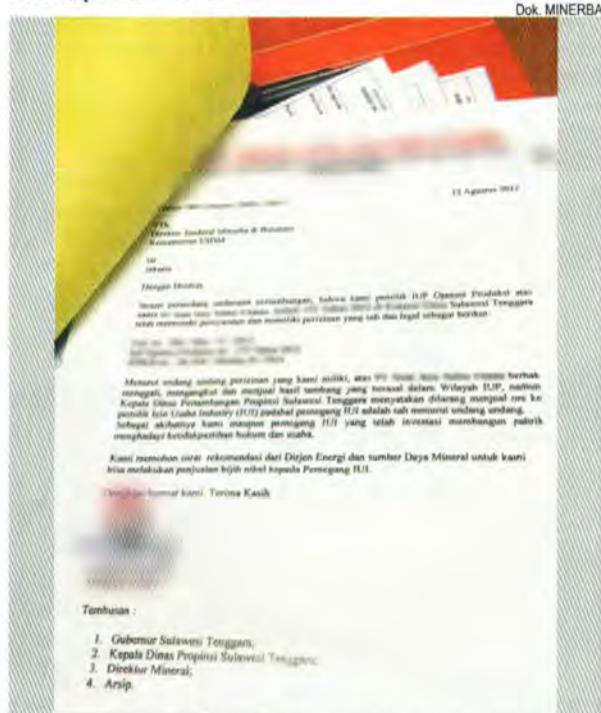
"Menurut undang-undang perizinan yang kami miliki, kami berhak menggali, mengangkut dan menjual hasil tambang yang berasal dari Wilayah IUP," ujar manajemen perusahaan dalam suratnya ke Dirjen Minerba 12 agustus 2015.

Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan melarang menjual ore ke pemilik Izin Usaha Industri. Di sisi lain, pemegang izin usaha industri (IUI) adalah sah menurut undang-undang. Hal ini mengakibatkan mereka sebagai produsen dan pemegang IUI sebagai pabrikan yang telah berinvestasi dan membangun pabrik menghadapi ketidakpastian hukum dan usaha.

"Kami memohon surat rekomendasi dari Dirjen Minerba untuk kami bisa melakukan penjualan bijih nikel kepada pemegang IUI," ujar manajemen.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kasubdit Pengawasan, Pengoperasian, Produksi dan Operasi Mineral Kementerian ESDM, Syamsu Daliend. Pihaknya berencana untuk mengumpulkan para kepala dinas guna membicarakan hal ini.

Macika Mineral tak khawatir soal pasokan bijih nikellya karena sudah ada perjanjian dengan Macika Mada Madana yang wajibkan Macika Mada Madana memasok bijih nikellya ke Macika Mineral. Tapi selama Macika Mineral mendapatkan penawaran yang lebih bagus dan kualitas yang lebih bagus maka MMI berhak membeli dari pihak lain. ■



Surat keluhan pemilik IUP karena tidak bisa menjual produksi mineralnya

GLOBAL LEADERSHIP SERIES

'The Most Comprehensive Professional Workshop in Indonesia'



Prof. Ir. Roy Sembel,
MBA, Ph.D.
Dean & Professor



Jimmy Gani, MPA
Executive Director & CEO



Bambang Gunawan, MBA
Director of Executive
Education



Yulita Susanti, Ph.D
Head of Program



Dana Afriza, MBA
Director of Corporate
Communication



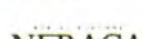
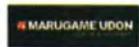
Rifa Zahirsyah, M.Si
Director of External
Relationship

IPMI International Business School
October 2015 - April 2016

Inviting All Indonesia Professionals

Check out www.ipmi.ac.id for update schedule and reserve your complimentary seat

globally connected and locally embedded



MELIBATKAN BULE DI PROYEK 35 GW



RUKMI HAPSARI
rukmi.hapsari@tambang.co.id

Kebutuhan dana yang besar dan teknologi yang canggih menjadi persoalan pelik saat proyek listrik 35.000 MW sudah harus dibangun. Tak ayal warna "bendera" pun tak lagi jadi persoalan penting yang harus diributkan.

KUNJANGAN Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, akhir Oktober lalu, memang diperpendek satu hari, karena musibah asap di tanah air. Tapi muhibah itu membawa sejumlah kabar baik. Di antaranya, komitmen perusahaan raksasa bidang teknologi tinggi, General Electric. Perusahaan yang umurnya sudah lebih dari seabad itu berkomitmen untuk berinvestasi lebih dari US\$ 1 miliar di Indonesia. Rencana General Electric menambah investasinya di Indonesia itu diumumkan Vice Chairman General Electric, John Rice, di Washington, seusai bertemu Presiden Joko Widodo.

Secara rinci, John Rice menjelaskan, proyek pertama yakni kerjasama dengan PT PLN Batam untuk pengadaan teknologi turbin gas *aeroderivative* guna memenuhi kebutuhan pembangunan pembangkit secara cepat, sebesar 500 MW. Menurut John, 20 unit turbin gas TM2500

dari General Electric yang diproduksi di Cincinnati, Ohio, ini dapat memenuhi kebutuhan pembangunan listrik di Indonesia yang memerlukan teknologi yang dapat diinstalasi dengan segera, efisien, handal, dan fleksibel.

Teknologi ini bersifat portabel sehingga dapat dipasang di atas sebuah truk, dapat beroperasi dengan bahan bakar ganda, dan dapat dipindahkan ke lokasi lain dengan cepat. Saat ini, empat unit TM2500 ini akan digunakan di Gorontalo, Sulawesi Utara. Keempat unit tersebut akan menghasilkan kapasitas listrik sebesar 100 MW untuk melistriki 800.000 rumah di Indonesia.

Generator TM2500 mudah dipasang. Teknologi ini, kata GE, cocok untuk memenuhi rencana pertumbuhan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Setiap set generator juga dapat menghasilkan lebih dari 25 MW yang bisa memenuhi kebutuhan sekitar 25.000 rumah pada iklim yang cukup panas di Indonesia. Pada proyek PLTG di Gorontalo, proses instalasinya dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP), perusahaan yang bertanggung jawab terhadap proses konstruksi proyek.

Pemimpin Senior Penjualan Indonesia untuk Aeroderivative Gas Turbin, GE Power & Water, Fajar Akbar menjelaskan bahwa teknologi ini telah berhasil diinstal di berbagai negara seperti Mesir, Aljazair, Yunani dan Jepang.

General Electric juga meneken dua perjanjian kerjasama untuk mengevaluasi kelayakan pengembangan dan investasi proyek pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan teknologi *combined cycle*. Perjanjian pertama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PT PLN, untuk target kapasitas listrik minimum sebesar 500 MW, dan yang kedua dengan perusahaan swasta (*Independent Power Producer/IPP*), PT Cikarang Listindo, untuk target kapasitas listrik minimum sebesar 1.000 MW.



"Kami sangat senang dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menghadirkan teknologi dan keahlian bagi para mitra kami yang akan membantu menghadirkan pasokan listrik dan layanan transportasi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia," kata John dalam surat elektronik dengan Majalah TAMBANG.

Campur tangan investor, termasuk General Electric, dianggap penting untuk membantu percepatan pengadaan infrastruktur, termasuk di sektor ketenagalistrikan. Tiga proyek GE di sektor ketenagalistrikan yang berpotensi menambah kapasitas listrik nasional hingga 3.000 MW.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024, total kebutuhan pendanaan proyek selama lima tahun mencapai Rp 1.127 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 512 triliun menjadi tanggung jawab PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Perusahaan swasta akan membiayai Rp 615 triliun.

Perusahaan IPP membutuhkan biaya besar untuk membangun suatu pembangkit. Apalagi jika mereka menyarankan pembangkit dengan kapasitas besar, sehingga harus mengandeng para pemilik modal sekaligus teknologinya.

Direktur Pengadaan Strategis dan Energi Primer PT PLN (Persero) Amin Subekti mengakui, hampir semua IPP di Indonesia mengandeng asing untuk pembangunan pembangkit listriknya sebab biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Amin menjelaskan, investasi untuk pembangkit berkapasitas 1 MW membutuhkan dana sekitar US\$1,5 - 2 juta. Kalau kapasitasnya 100 MW, duitnya US\$150-200 juta. "Itu duit banyak. Tak banyak orang yang punya duit sebanyak itu," ujarnya.

Pihak asing biasanya tertarik pada proyek dengan kapasitas besar seperti 1.000 MW. Proyek dengan kapasitas lebih kecil, sebesar 50 MW atau 100 MW, diserahkan kepada perusahaan lokal. Demikian pula dengan masalah kerjasama. Menurut Amin, meskipun investor asing menguasai ranah modal dan teknologi, mereka tidak mungkin berjalan sendirian. Sebab, sudah ada aturan mereka harus mengandeng pemain lokal.

Amin belum dapat menjelaskan berapa persentase keterlibatan asing di proyek pembangkit ini. Ia mengatakan saat ini sermuanya masih dalam proses tender. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan pemenangnya apakah 100% lokal atau bergandengan dengan pihak asing.

Perbankan nasional maupun asing pun dihirau oleh pemerintah agar turut serta dalam proyek ini. Dengan perkiraan balik modal rata-rata 7-8 tahun, perbankan, kata Amin, pasti sangat tertarik.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alihudin Sitompul menuturkan bahwa yang banyak mendanai proyek listrik ini adalah lembaga keuangan dari Eropa dan Amerika.

Dukungan Asing

Sebelum ditekennya perjanjian kerjasama dengan General Electric itu, pada awal September 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meneken nota kesepahaman dengan pemerintah Amerika Serikat



Kementerian ESDM meneken nota kesepahaman dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membentuk kelompok kerja energi atau Power Working Group yang akan mendukung program ketenagalistrikan 35.000 MW.

(AS) untuk membentuk kelompok kerja energi atau *Power Working Group* yang akan mendukung program ketenagalistrikan 35.000 MW. Kelompok kerja itu terdiri dari 52 perusahaan kelistrikan, energi bersih, konstruksi, dan keuangan, asal Amerika, dan 11 badan pemerintahan AS. Mereka akan bekerja sama dengan PLN dan Kementerian ESDM.

Pemerintah Amerika bermitra dengan *U.S. Trade and Development Agency* (USTDA) membantu perusahaan Amerika membuka lowongan kerja di negaranya melalui ekspor barang dan jasa demi kepentingan proyek pembangunan di negara-negara dengan perekonomian berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu dukungan yang sudah dilakukan ketika pada 2010 USTDA meluncurkan *U.S. – Indonesia Geothermal Development Initiative*, sebuah program untuk mengembangkan kekuatan geotermal Indonesia.

Sejak saat itu, USTDA telah memberi bantuan studi kelayakan untuk proyek sektor swasta, termasuk proyek energi 370 MW Jailolo di Pulau Halmahera, proyek 300 MW Tangkuban Perahu di Jawa Barat, dan proyek geotermal Cibuni di Jawa Barat.

USTDA juga bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian ESDM ketika meluncurkan program *Geothermal Power Development Training Program and Reverse Trade Mission* ke AS untuk pejabat senior sektor energi Indonesia. Program tersebut juga menandai keterlibatan AS dalam bidang eksplorasi dan produksi geothermal di Indonesia. Bukan hanya itu, dalam sektor energi konvensional, USTDA juga bekerja sama dengan PT Ladang Nusa Gas untuk mendanai studi kelayakan bagi terminal liquefied natural gas (LNG) kurang lebih 20 juta kaki kubik per hari di Jawa Timur.



Program lain yang mendapat dukungan USTDA ialah studi kelayakan untuk membantu PT Pertamina meningkatkan efisiensi kilang melalui modernisasi teknologi. USTDA juga mengawasi peningkatan penggunaan teknologi pembangkit listrik tenaga gas yang dianggap sangat efisien.

Perusahaan asal AS, General Electric (GE), ikut terlibat dalam proyek kelistrikan tenaga gas dengan memasok empat turbin di Provinsi Gorontalo. Teknologi GE menanggung lebih dari 20% dari pembangkit listrik di Indonesia dan lebih dari 8 GW listrik yang dihasilkan dari turbin gas GE. GE telah berada di Indonesia sejak tahun 1940 dan saat ini memiliki lebih dari 800 karyawan dan 10 fasilitas di negeri ini. Perusahaan ini mengklaim telah menghabiskan lebih dari US\$1 miliar untuk investasi di Indonesia.

Selain GE, perusahaan asing yang ikut dalam proyek kelistrikan di Indonesia adalah perusahaan asal AS, SunEdison. Mereka bekerjasama dengan PT Binatek Energi

Terbarukan dan UPC Renewables Indonesia membentuk konsorsium bernama PT UPC Sidrap Bayu Energi. Perusahaan patungan itu telah menandatangani perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk PLTB Sidrap sebesar 70 MW di Sidrap, Sulawesi Selatan pada 19 Agustus 2015.

Sebelumnya, pada Mei 2015, PLN menandatangani PPA untuk PLTB Samas sebesar 50 MW di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta. Pembangunan proyek Sidrap akan dimulai pada akhir 2015 dan selesai pada pertengahan 2017. Proyek ini merupakan bagian dari nota kesepahaman pengadaan fasilitas listrik sebesar 300 MW yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada Oktober 2014.

Setelah selesai, proyek ini akan menjadi proyek pembangkit tenaga bayu terbesar di Indonesia. Investasinya mencapai US\$ 180 juta dan menghemat 170.000 ton karbondioksida yang dihasilkan dari bahan bakar fosil setiap tahunnya. 

DOMINASI CINA DI PLTU BALI

Sebuah kabar baik datang dari pulau dewata, Bali. Mulai September kemarin provinsi itu mendapatkan pasokan listrik tambahan setelah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapaasitas 3x142 MW di Celukan Bawang, Buleleng, Bali, selesai dibangun. PLTU itu diyakini mampu memenuhi 40% kebutuhan listrik di Bali dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Meski cukup menggembirakan, keberadaan PLTU itu sempat menjadi kontroversi lantaran unsur asing yang begitu dominan. Tahap konstruksi dilakukan oleh investor asal Tiongkok, China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC). Selain memboyong perlengkapan dan teknologi kontruksi, CHEC juga mengangkut pekerja asal negerinya masuk ke Bali.

Dominasi negeri tirai bambu di PLTU Celukan Bawang bertambah ketara pada saat peresmian. Tak ada satu pun pekerja Indonesia yang hadir. Hanya dua warga lokal yaitu Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Bali, Ketut Widja, yang mewakili Gubernur Bali, dan Asisten II Sekretaris Daerah Buleleng, Ida Bagus Geriastika, mewakili Bupati Buleleng, yang menggunakan Bahasa Indonesia ketika sambutan.

Bahkan seluruh spanduk dan karangan bunga yang menyemarakkan lokasi peresmian seluruhnya menggunakan huruf kanji Cina. Penggunaan Bahasa Mandarin ini jadi persoalan besar sebab menutup kesempatan pekerja Indonesia untuk terlibat di dalamnya.

Padahal saat mengawali proyek China Huadian Engineering mengandeng perusahaan lokal, PT General Energy Bali (GEB). Saham terbesar dikuasai perusahaan Cina. Peran si lokal nyaris tak terlihat. Kepala Disnakertrans Provinsi Bali, I Gusti Agung Sudarsana mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana perjanjian di pemerintah pusat sehingga muncul banyak pekerja asal Tiongkok di PLTU Celukan Bawang.

"Ini yang kami tidak tahu. Tenaga kerja asing begitu saja diizinkan oleh pusat," katanya saat menggelar konferensi pers di kantor Pemprov Bali, 21 Agustus lalu.

Sudarsana menegaskan, hadirnya pekerja asing di PLTU Celukan Bawang murni kewenangan pemerintah pusat.

Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN), Agung Wicaksono mengatakan, keterlibatan asing tidak dapat dihindari. Namun perusahaan nasional menurutnya harus dilibatkan dan memegang kontrol secara penuh.

Kasus di PLTU Buleleng Bali menjadi suatu pelajaran besar. "Seperti itu yang kami ingin perbaiki dan hindari. Dalam proyek besar, keterlibatan asing itu ada. Namun yang terpenting adalah memastikan rekan kerja dari perusahaan lokal berperan besar," ujarnya.

Ketua Bidang Pengembangan Investasi Listrik Swasta, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Sri Andini sudah mengetahui taktik untuk bekerjasama dengan Tiongkok. Dirinya yang juga direktur keuangan dan urusan umum IPP swasta, PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI), tidak akan membiarkan mereka bekerja sendiri.

"Misalnya dalam hal bahan baku, kita harus betul-betul memberi pengawasan dengan baik," ujarnya.

Pihaknya mengaku bekerjasama dengan konsultan yang dipercaya untuk melakukan pengawasan mulai dari nol. Pihak China National Electric Engineering Co. Ltd. (CNEEC), kontraktor proyeknya pun diharuskan untuk mengikuti peraturan PT BPI. Contohnya dalam hal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus memenuhi persentase barang yang berasal dari Indonesia.

"Kita sebagai pemilik harus berkomitmen, dan mereka harus mengikuti peraturan kita sebagai kontraktor. Saat selesai pekerjaan, putera daerah setempat harus ditarik duluan," tuturnya. 

THE 4TH INTERNATIONAL EXHIBITION

on Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Air Filtration & Purification,
Refrigeration Systems, Pumps, Valves, Compressors
and Related Systems in Indonesia



25 – 27 November 2015
Jakarta International Expo,
Indonesia

PRE-REGISTER NOW!

www.hvacrseries.com/indonesia/



Organised by:

informa
exhibitions

Supported by:



TAMBAL SULAM DI BLOK LAMA

EGENIUS SODA
egenius@majalahpertambang.com

Pemerintah mengistimewakan Pertamina untuk kelola blok migas yang berakhir masa kontraknya. Bisa jadi bumerang bagi BUMN energi tersebut. Pertimbangan iklim investasi juga sangat penting.

Di industri migas, pemerintah terlihat tegas, khususnya berkaitan dengan pengelolaan blok migas yang berakhir masa kontraknya. Salah satunya di Blok Mahakam. Di situ, pemerintah memutuskan Pertamina ketua konsorsium pengelola.

Dalam beberapa tahun ke depan, akan ada beberapa blok migas yang berakhir masa kontraknya. Sebagian masih memiliki cadangan lumayan. Lewat regulasi yang baru, pemerintah memberikan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil alih wilayah kerja migas yang berakhir masa kontraknya menjadi salah satu dari tiga opsi.

Sikap pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. *Beleid* itu diundangkan pada 11 Mei 2015.

Disebutkan di situ, untuk blok migas yang kontraknya akan berakhir, kontraktor akan mengajukan permohonan untuk memperpanjang kontraknya. Pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan pada tiga opsi: memberikan hak pengelolaan kepada Pertamina, memperpanjang kontrak dengan kontraktor lama, atau memberikan kepada Pertamina dan kontraktor lama.

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja menegaskan, blok minyak dan gas bumi yang berakhir kontraknya tidak harus dikelola Pertamina. "Memang prioritas ke perusahaan milik negara tetapi tidak harus ke Pertamina. Investor lama bisa mengajukan perpanjangan atau perusahaan lain juga bisa. Namun yang pertama ditawarkan adalah Pertamina," ungkap Wirat dalam acara diskusi "Kebijakan Pemerintah Mengelola Industri Hulu Migas", di Jakarta, Rabu pertengahan Oktober lalu.

Kebijakan tentang hak mengelola blok migas yang akan habis menjadi sangat penting, karena beberapa tahun ke depan beberapa blok akan berakhir masa kon-





SUBKHAN AS/TAMBANG

traknya. Di tahun 2017 ada Blok ONWJ yang saat ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energi. "Karena ini sudah dikelola Pertamina, maka tinggal dilanjutkan," terang Wiratmaja, yang sebelumnya staf ahli Menteri ESDM. Nasib Blok Mahakam, yang selama ini dikelola PT Total Indonesia, juga sudah di-putuskan.

Di tahun 2018, beberapa wilayah kerja juga berakhir masa kontraknya. Di antaranya Petrochina East Java, yang produksinya masih tinggi. "Kita harus pikirkan bagaimana yang terbaik untuk bangsa sambil tidak megesir investor. Di industri migas, dibutuhkan investor yang berani mengambil risiko," kata Wirat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha menilai, terbitnya Permen ESDM 15 Tahun 2015 memberikan keistimewaan bersyarat pada Pertamina. "Kita tidak ingin Pertamina seperti masa lalu. Menguasai blok migas, sekaligus menjadi regulator, sehingga Pertamina lebih menjadi birokrat. Pertamina harus menjadi perusahaan kelas dunia," katanya.

Satya mengingatkan, sektor migas membutuhkan perusahaan yang berani mengambil risiko, serta memiliki modal dan teknologi. Satya, yang sebelumnya adalah eksekutif perusahaan migas BP, mengurangi perjalanan pengusahaan blok migas dan peran Pertamina di dalamnya.

Dalam UU Migas yang lama, kuasa pertambangan diberikan kepada Pertamina. Pelaksananya adalah Badan Koordinasi Kontraktor Asing (BKKA). Ini yang membuat Pertamina menguasai begitu banyak cadangan. Peran Kementerian ESDM pada masa itu hanya sebagai regulator.

"Zaman berubah ketika Pertamina menjadi BUMN," kata Satya. Pertamina diperlakukan sama seperti kontraktor lainnya. "Kalau mau suatu blok, dia harus ikut tender. Menang kalah itu potensinya sama. Ia juga harus meminta izin ke SKK Migas untuk beberapa hal. Kadang tidak diberikan oleh SKK Migas. Ini yang kami lihat bahwa harus ada pembenahan," lanjut Satya.

Menurut Satya, seharusnya SKK Migas tidak memperlakukan Pertamina sama persis dengan perusahaan migas swasta lainnya. UU Migas juga menempatkan Pertamina dalam posisi yang berbeda, namun tidak diatur secara tegas.

Itu yang mendorong munculnya aturan turunan seperti peraturan menteri yang, menurut Satya, seolah tambar sulam. Sebelumnya ditegaskan bahwa Pertamina diberikan keistimewaan dengan 10% kepemilikan saham di setiap blok migas. Tetapi kemudian muncul lagi regulasi baru lewat Permen Nomor 15 Tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada BUMN migas ini untuk mengejela blok migas yang habis.

"UU tidak mengatur secara spesifik. Kemudian muncul peraturan turunan yang mengaturnya. Ini yang menurut hemat saya tidak kuat karena hanya diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan menteri, tetapi tidak diatur oleh UU," ungkap Satya.

Inilah yang akan masuk dalam revisi UU Migas. Pengaturan posisi Pertamina menjadi penting karena beberapa hal. Pertama, kata Satya, jangan sampai kembali di masa lalu. Ketika itu Pertamina menguasai blok secara keseluruhan. Namun karena berlaku sebagai kontraktor sekaligus regulator, Pertamina lebih condong sebagai birokrat, sehingga tidak bisa menciptakan daya saing yang lebih menguntungkan.



Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR.

"Karena lebih sering berperan sebagai birokrat, ke mana-mana ia akan dihormati karena memiliki kewenangan sebagai orang yang memberi kuasa pengelolaan blok migas. Sementara dalam pengembangan SDM, perannya selalu dari atas. Kami tidak ingin mengulang seperti itu," kata Satya.

Ke depan, jika ingin menjadikan Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia, perusahaan harus punya tenaga kerja dengan kualifikasi mumpuni kelas dunia. "Pertamina harus menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang bisa menghasilkan SDM berkualitas, baik untuk Pertamina atau untuk industri migas nasional. Tenaga kerjanya bisa ditempatkan di mana-mana," kata Satya.

Hal lain yang dilihat Satya, sejauh ini hak istimewa yang diberikan pada Pertamina belum dilaksanakan secara penuh. Ini terlihat ketika pemerintah mengambil keputusan pengelolaan Blok Mahakam yang berakhir pada 2017. Pada awalnya, 100% hak pengelolaan akan diberikan pemerintah pada Pertamina. Dalam perjalanan, berubah mulai dari 80% dan kemudian turun ke 70%.

Ini terjadi, menurut Satya, karena pemerintah masih sering bernegosiasi langsung untuk memutuskan pengelolaan blok yang akan berakhir. Seperti diketahui di dunia migas dikenal setidaknya tiga mekanisme yang digunakan. Yakni Pemerintah bebas memutuskan, (*free right*); salah satu pihak diutamakan (*first right*), dan negosiasi. "Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah negosiasi, sehingga untuk Mahakam muncul angka menjadi 70%," katanya.

Keistimewaan bagi Pertamina bisa menimbulkan masalah baru. Karena semua blok yang habis masa kontraknya diserahkan ke Pertamina, termasuk yang sudah tidak masuk hitungan portofolio perseroan, akhirnya yang tidak bisa dikelola, tidak masuk dalam portofolio ke mudian disub-subkan lagi. Bisa dengan pihak asing atau nasional.

Oleh karenanya, menurut Satya, kalaupun keistimewaan mau diberikan ke Pertamina, harus terukur. Dalam diskusi yang berkembang saat ini muncul gagasan bahwa semua blok yang habis kontraknya, diserahkan 100% ke pemerintah. Kemudian ditenderkan, dengan hak pertama tetap ada di Pertamina. Tetapi yang ikut bisa saja perusa-





Pertamina dari sisi teknologi dan sumber daya manusia, mampu mengelola blok migas. Namun, tidak tertutup kemungkinan menggandeng perusahaan lain untuk turut mengelola blok-blok migas yang diambil alih.

haan minyak asing.

Perusahaan-perusahaan ini dibiarkan berkompetisi, menyampaikan proposalnya sesuai proses tender tadi. Setelah ada pemenang, pemerintah akan memanggil Pertamina, dan menanyakan kesanggupannya apakah bisa melakukan hal yang sama dengan si pemenang. Jika Pertamina bisa melakukannya, saat itu juga diputuskan Pertamina yang mengelola blok tersebut. "Dengan mekanisme seperti ini setidaknya pemerintah mempunyai referensi pengelolaan blok terbaik dan tidak serta merta memberikannya pada Pertamina," katanya.

Jika saja Pertamina, sebagai perusahaan yang 100% milik negara bisa menunjukkan kualitas lebih bagus, dan menilai bahwa blok tersebut layak masuk dalam portofolionya, maka pemerintah harus memberikannya ke Pertamina. Jika tidak, maka diberikan pada pihak yang memenangkan tender. Mekanisme ini bisa jadi pertimbangan karena Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, kehadiran investor asing di industri migas.

Menurutnya sekarang banyak negara memberikan tawaran yang menarik bagi investor yang ingin menambahkan modalnya. "Kalau saya permodal dan punya uang, saya melihat di mana daerah yang potensial di dunia, saya akan lebih memilih Afrika Barat seperti Nigeria, negara yang sekarang agak *kolaps* tetapi sumber dayanya luar biasa," katanya.

Para investor akan merasa enggan masuk Indonesia bila blok-blok besar yang potensial semuanya dikuasai Pertamina. "Ini juga harus masuk dalam pertimbangan. Jadi ketika kita memberikan keistimewaan pada Perta-

mina maka kita tidak menafikan investasi luar untuk masuk menggarap cadangan yang kita punya," katanya lagi.

Ketika Indonesia masih berpandangan kaku, maka Indonesia tidak akan dilirik oleh siapa pun. Lihat saja dalam 15 tahun belakangan penemuan cadangan besar sudah sangat minim. Sekarang yang diharapkan hanya Blok Masela. "Kita harus memasukan semua faktor tersebut dalam menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investasi," katanya.

Di tempat lain Bambang Manumayoso, Direktur Pengembangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang juga Ketua Tim Reformasi Upstream Pertamina, mengatakan, Pertamina akan mengevaluasi terlebih dahulu sebelum mengambil blok-blok migas yang akan berakhir kontraknya. "Jadi bukan sekadar kita mengambil lahan orang yang sudah berakhir kontrak," tegas dia.

Bambang mengatakan, dari sisi teknologi dan sumber daya manusia, Pertamina mampu mengelola blok migas. Namun, tidak tertutup kemungkinan menggandeng perusahaan lain untuk turut mengelola blok-blok migas yang diambil alih. "Indikator untuk menentukan mitra untuk mengelola blok migas sangat beragam baik dari sisi teknologi, SDM dan lainnya," ujarnya.

Pengamat geopolitik permasyarakat, Dirgo D Purbo mengatakan, secara geopolitik kondisi migas nasional sekarang berada dalam kondisi darurat. "Untuk ukuran Indonesia yang besar, dengan cadangan minyak yang hanya 3,6 miliar barel, sangat kecil. Sekarang ini ada 276 wilayah kerja tetapi hanya sebagian yang berproduksi," katanya.

Dirgo mengatakan, berdasarkan pengalamannya



bekerja di berbagai perusahaan migas multinasional, la-dang migas yang dikelola asing bila produksinya tidak men-capai keekonomian akan diserahkan secara sukarela ke Pertamina.

"Jadi, berikan dulu haknya ke Pertamina, lalu ter-se-rah Pertamina mau diapakan setelah itu. Karena perusa-haan migas asing tidak akan rela lapangan migas yang cadangannya besar dilepas ke Pertamina," tegasnya.

Ketika ada wilayah kerja yang akan berakhir tetapi cadangannya masih tinggi, tentu ada keengganan bagi pe-rusahaan tersebut untuk menyerahkannya. Tentu mereka masih ingin memperpanjang kontrak. Namun pemerintah harus tegas dan konsisten, sehingga investor asing pun memahaminya.

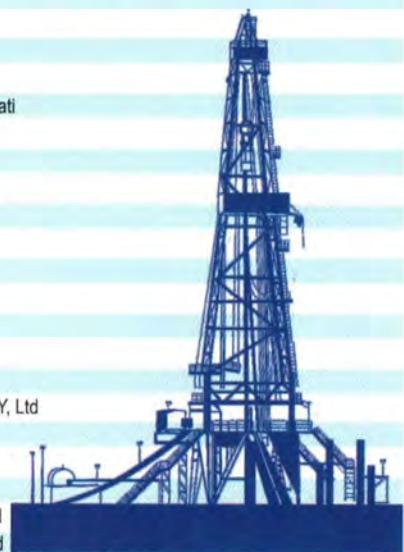
Salah satu tujuan pemberian prioritas bagi Perta-mina adalah mencapai kedaulatan energi, yang selama ini dikuasai perusahaan asing. Pemerintah tidak perlu kha-watir jika kebijakan tersebut akan mempengaruhi iklim investasi. Selama potensi minyak masih besar, investor akan berbondong-bondong datang ke Indonesia, meski semu-kontrak yang sudah berakhir diserahkan Perta-mina.



Ada 35 blok yang akan berakhir masa kontraknya hingga 2025:

No	Blok Migas	Habis Kontrak	Operator
1	Gerbang JOB	2015	Energi Mega Persada
2	North West Java Sea	2017	Pertamina
3	Mahakam Block	2017	Total E&P Indonesia
4	Lematang Block	2017	PT Medco E&P Lematang
5	Tuban	2018	JOB Pertamina - Petrochina East Java
6	Ogan Komering	2018	JOB Pertamina - Talisman
7	Sanga-sanga Block	2018	VICO
8	South East Sumatera	2018	CNOOC SES Ltd
9	B Block	2018	ExxonMobil Oil Indonesia Inc
10	NSO/NSO Extension	2018	ExxonMobil Oil Indonesia Inc
11	Tengah Block	2018	Total E&P Indonesia
12	East Kalimantan	2018	Chevron Indonesia Company
13	Pendopo dan Raja	2019	JOB - Pertamina, Golden Spike Energy Indonesia
14	Bula	2019	Kalrez Petroleum (Seram)Ltd
15	Seram Non Bula	2019	CITIC Seram Energy Limited
16	Jambi Merang	2019	Talisman
17	South Jambi Blok B	2020	Conoco Phillips (South Jambi)
18	Brantas	2020	Lapindo
19	Salawati Kepala Burung	2020	JOB Pertamina - Petrochina Salawati
20	Malacca Strait	2020	EMP Malacca Strait S.A
21	Makassar Strait	2020	Chevron Makassar Ltd
22	On Shore Salawati Basin	2020	PetroChina International Bermuda
23	Bentu Segat	2021	Kalilo (Bentu) Ltd
24	Rokan	2021	Chevron Pacific Indonesia
25	Selat Panjang	2021	Petroselat Ltd
26	Tarakan Block East Kalimantan	2022	PT Medco E&P Tarakan
27	Coastal Plains and Pekanbaru	2022	Pertamina
28	Muturi	2022	BP Muturi Holdings BV
29	Tungkal Block	2022	MontD'Or
30	Sengkang Block	2022	Energy Equity Epic (Sengkang) PTY, Ltd
31	Corridor	2023	Conoco Phillips (Grissik) Ltd
32	Rimau	2023	Medco E&P Indonesia
33	Wiriagor Block	2023	BP Wiriagor Ltd
34	Jabung (2023)	2023	Petrochina International Jabung Ltd
35	Bangko Block	2025	Petrochina International Bangko Ltd

Sumber : Ditjen Migas 2015

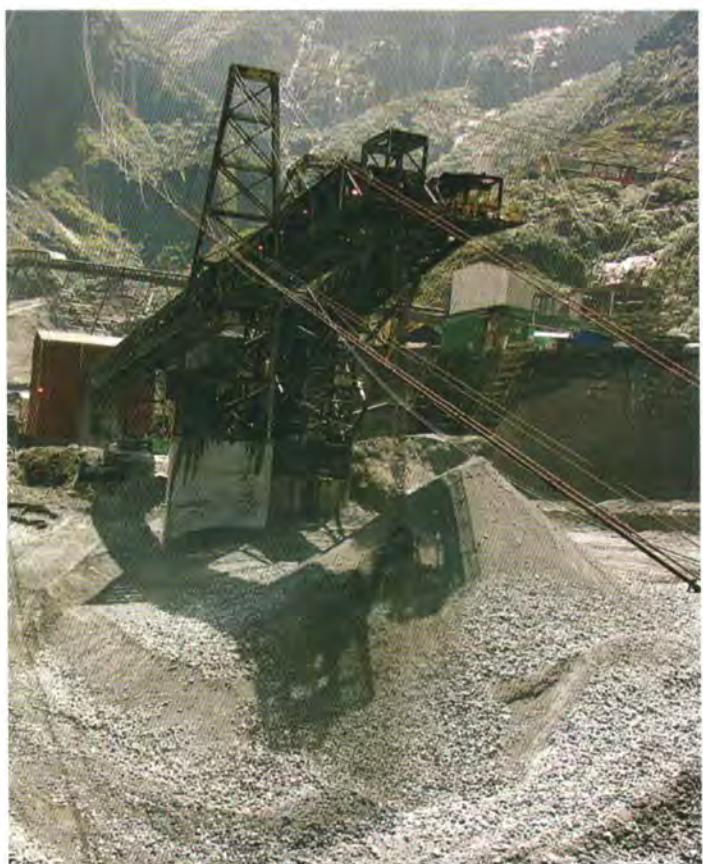


JANJI INVESTASI DARI ARIZONA BUAT PAPUA

EGENIUS SODA
egenius@majalahtambang.com

Pemerintah sejauh ini telah memastikan bahwa pembahasan perpanjangan izin operasi pasca 2021. Apa pun keputusan diambil tentu ada konsekwensinya.

SAAT ini nasib izin operasi PT Freeport Indonesia pasca 2021, secara resmi, belum jelas. Pemerintah lewat Menteri ESDM Sudirman Said telah memastikan bahwa pihaknya belum memperpanjang izin operasi perusahaan asal Phoenix, Arizona, Amerika Serikat ini. Pemerintah hanya memastikan bahwa sampai 2021 izin operasi Freeport masih valid. Sesuai regulasi yang ada, baru pada 2019 perpanjangan kontrak bisa dilakukan.



Pemerintah pun sudah memastikan bahwa revisi PP 77 Tahun 2014 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara akan dilaksanakan setelah revisi UU Minerba. Meski masuk dalam program legislasi nasional tahun ini, mengingat waktu yang sudah sangat terbatas, besar kemungkinan revisi UU Minerba tidak terlaksana tahun ini.

Namun seharusnya soal waktu bukan menjadi masalah. Kalaupun Freeport mengajukannya saat ini, keputusan tetap ada pada pemerintah. Menurut pengamat pertambangan R. Sukhyar, pemerintah dalam memutuskan perpanjangan izin operasi --bukan perpanjangan kontrakt-- melihat kinerja dan kepatuhan perusahaan pada amanat UU dan peraturan terkait.

Sukhyar mengingatkan, dalam MoU pertama yang ditandatangani pada 2014 disebutkan dengan jelas bahwa pemerintah tidak akan menghalangi-halangi perpanjangan kontrak. Namun semua itu sesuai dengan persetujuan pemerintah. "Persetujuan itu diberikan jika Freeport memenuhi kewajiban seperti enam aspek yang ada dalam negosiasi dan perluasan yang ada dalam MoU kedua," kata Sukhyar.

Sukhyar pensiun dari jabatannya sebagai direktur jenderal mineral dan batu bara, 1 Mei lalu. Sebagai direktur jenderal, ia pernah terlibat dalam perundingan dengan Freeport. Sukhyar mengisahkan, karena bahasa dalam MoU adalah bahasa hukum, timnya harus berulangkali berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan. "Ini dilakukan untuk memastikan bahasa dalam MoU tidak bertentangan dengan UU Minerba," kisah Sukhyar.

Sukhyar memastikan bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak ada kata "diperpanjang" tetapi yang ada kalimat "tidak akan menghalangi-halangi". Oleh karenanya pemerintah menurutnya sudah harus lebih intens mengawasi dan mengevaluasi kinerja Freeport khusus dalam pemenuhan kewajiban ini. Sehingga pada saat harus mengambil keputusan, pemerintah sudah punya catatan kinerja.

Menteri ESDM Sudirman Said dalam wawancara khusus dengan Majalah TAMBANG menyampaikan beberapa pertimbangan yang saat ini tengah dikaji secara serius oleh pemerintah. Menurutnya tidak mudah untuk langsung memutus izin operasi Freeport.

Ia mengisahkan, dengan kompleksitas operasional tambang yang ada saat ini, jika izin operasi tidak diperpanjang, setidaknya dibutuhkan 5 sampai 6 tahun masa transisi. Waktu yang demikian panjang itu diperlukan bagi Freeport untuk membereskan semua aset yang dimilikinya. Setelah itu kontraktor baru atau pemegang izin usaha pertambangan, baru bisa mulai konstruksi.

Dalam masa transisi tersebut tidak ada aktivitas di tambang terbesar di Indonesia ini. Ini kemudian akan berimbas pada negara dan pemerintah daerah yang kehilangan pemasukan dari aktivitas pertambangan.

TAUFIEQURROHMAN/TAMBANG

Freeport selama ini telah menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia khusus Papua. Ini terlihat dari kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI yang menyebut sekitar 37,5% produk domestik bruto Provinsi Papua dikontribusi oleh Freeport. Untuk Kabupaten Mimika lebih besar lagi, 91%. Jika Freeport ditutup, dampaknya bagi perekonomian Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika akan sangat besar.

Oleh karenanya Menteri ESDM mengatakan desakan untuk tidak memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia melukai hati masyarakat Papua. "Apa pun skenarionya, memberhentikan Freeport sama juga akan membiarkan Timika lumpuh, Papua *drop* selama kurang lebih 6 tahun," kata Menteri Sudirman Said.

Jika demikian yang terjadi, isu yang penting ke depan adalah bagaimana kontribusi perusahaan yang sudah lebih dari 60 tahun beroperasi di Indonesia ini terus ditingkatkan. "Mari kita pikirkan terjemahan berpihak pada Indonesia. Apakah kepemilikan menjadi segala-segalanya atau manfaat ekonomi nyata yang kita kejar?" kata Sudirman Said.

Memang menjadi penting ke depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi Freeport bagi perekonomian nasional. Salah satunya terkait dengan penyerapan produk dalam negeri, -dikenal sebagai TKDN alias tingkat komponen dalam negeri. Pemerintah, menurut Sudirman Said, meminta kenaikan 5% setiap tahun untuk penyerapan kandungan dalam negeri dan akan diaudit. Dan lagi kandungan dalam negeri ini harus benar produk dalam negeri dan bukan diartikan sebagai membeli dalam negeri-sementara sesungguhnya merupakan produk impor.

Tidak semua sepakat dengan penilaian seputar kontribusi Freeport bagi perekonomian Indonesia dan khusus Papua. Termasuk masyarakat Papua. Ini diakui juga oleh tokoh masyarakat adat Amungme yang juga anggota DPRD Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai.

"Masyarakat Papua ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan kehadiran Freeport," katanya. Mereka yang sepakat menilai kehadiran PTFI telah memberi manfaat ekonomi sangat besar. Namun yang menolak biasanya melihat dari aspek lingkungan, dan penguasaan atas wilayah ulayat yang menimbulkan konflik horizontal.

"Hal yang penting di sini adalah bagaimana ke depan kehadiran perusahaan ini lebih dirasakan lagi manfaatnya bagi masyarakat Papua," kata anggota Komisi Ekonomi DPRD Provinsi Papua ini.

Ia mengakui bahwa kontribusi Freeport pada perekonomian tidak hanya untuk Papua, tetapi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karenanya tidak mungkin menutup operasi Freeport. Namun yang dilakukan ke depan adalah meningkatkan porsi manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua, dan juga suku pemegang ulayat.

Freeport sudah membantu dan memberi perhatian khusus pada suku pemegang hak ulayat. Salah satunya lewat lembaga yang dibentuk bersama, yakni Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro. Jika izin Freeport diperpanjang, kontribusinya harus lebih besar lagi. Pengelolaan lembaga ini juga harus lebih baik lagi.

"Freeport harus lebih memperhatikan masyarakat Papua, khususnya orang muda. Freeport harus melatih mereka dan kemudian mempekerjakannya di tambang



R. Sukhyar

sehingga manfaat yang diberikan Freeport pada masyarakat pemilik ulayat akan lebih besar dan lebih dirasakan," katanya.

Wilhelmus berharap, dalam proses negosiasi dengan Freeport, khusus terkait dengan berakhirnya masa kontrak di 2021, Pemerintah daerah dan masyarakat pemilik ulayat dilibatkan.

"Freeport akan berakhir masa kontraknya pada 2021. Jika pemerintah pusat hendak membahas perpanjangan izin, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta masyarakat pemilik ulayat harus dilibatkan agar kepentingan daerah dan masyarakat adat juga ditampung," katanya.

Wilhelmus tetap mendorong Freeport agar membangun smelter di Papua untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Jika *smelter* dibangun, dampak ikutan mulai dari tenaga kerja sampai perputaran ekonomi di Papua, akan semakin besar. "Freeport sudah lama meng-exploitasi kekayaan tanah Papua dan kemudian mengolahnya di tempat lain. Sudah saatnya Freeport membangun pabrik pengolahan di Papua," katanya.

Wilhemus, yang merupakan perwakilan dari Kabupaten Mimika, tempat Freeport beroperasi, tidak sepakat jika pemda harus membangun *smelter* dengan investor lain, sementara Freeport membangun *smelter* di tempat lain. "Kalau itu yang terjadi maka konsentrasi yang dialokasikan untuk *smelter* milik Pemda akan sangat kecil dan bukan menjadi prioritas. Kami masih tetap berharap agar Freeport mau bangun *smelter* di Papua," katanya lagi.

Terkait divestasi, Wilhelmus berharap agar pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dilibatkan, agar lebih merasa memiliki konsesi tambang tersebut.

BAGI Freeport, jaminan kepastian perpanjangan kontrak memang sangat dibutuhkan. Perusahaan ini sudah punya rencana investasi sebesar US\$18 miliar sampai 2041. Mulai dari membangun *smelter* tembaga di Gresik, Jawa Timur sampai pada pengembangan tambang bawah tanah.

Humas PT Freeport Indonesia Riza Pratama menjelaskan, pihaknya menghargai jaminan pemerintah agar Freeport bisa terus berinvestasi setelah 2021 dalam melanjutkan operasi tambang. Manajemen Freeport terus berunding agar bisa mendapatkan perpanjangan izin operasi, mengingat besarnya nilai investasi yang hendak ditanamkan.





Riza Pratama

TAUFIEQURROHMAN/TAMBANG

Menurutnya jika merunut pada bunyi Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1991, Freeport mendapat izin operasi sampai 2021 dan ditambah 2 kali 10 tahun jadi sampai 2041. "Kami pun telah menyusun rencana investasi sampai 2041. Namun karena UU Minerba 2009 Pemerintah mengakui 2021 dan kalau pun diperpanjang akan berubah menjadi IUPK. Kami terima tetapi tololong hak kami sesuai dengan Kontrak Karya juga dipenuhi," ungkap Riza.

Sampai sekarang menurut Riza Pemerintah baru menyampaikan pada Freeport untuk berinvestasi dan proses negosiasi tetap berjalan. "Surat kemarin pun kami pahami bahwa belum ada perpanjangan tetapi baru sebatas *signal* bahwa kami boleh berinvestasi," katanya.

Padahal kami butuh kepastian investasi untuk jangka panjang karena kami akan membangun *smelter* dan juga mengembangkan tambang dalam. Tambang dalam menjadi penting karena tambang terbuka di Grasberg akan berakhir pada 2017.

"Kalau Pemerintah tidak memperpanjang izin operasi pada 2021, bagaimana dengan investasi yang sudah kami tanamkan termasuk di tambang dalam dan *smelter*. Oleh karenanya kami butuh kepastian," ungkap Riza.

Sebagai perusahaan yang telah lama berinvestasi di Indonesia, kontribusi Freeport sudah cukup besar tidak hanya bagi Papua tetapi juga bagi Indonesia. Saat ini tenaga kerja Freeport mencapai sekitar 30.000 orang dimana lebih dari 95%-nya orang Indonesia. Dari total karyawan tersebut, lebih dari 25%-nya adalah orang Papua. Mereka menduduki berbagai posisi, mulai dari tingkat yunior hingga wakil presiden.

Dari sisi kontribusi ekonomi, Riza menjelaskan bahwa berdasarkan hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) tahun 2013, kegiatan usaha pertambangan berkontribusi terhadap 91% PDRB Kabupaten Mimika dan 37,5% PDRB Provinsi Papua. Bentuk-bentuk lain kontribusi langsung Freeport terhadap penerimaan negara adalah pajak, royalti dan dividen, yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data menyebutkan kontribusi Freeport terhadap PDRB Nasional sebesar 0,8%. Angka yang terbilang besar.

Data Freeport menyebutkan, dalam rentang masa antara 1992-2014, keuntungan langsung bagi Indonesia dalam bentuk pajak, royalti, dividen, biaya, dan pembayaran lainnya mencapai sebesar US\$15,8 miliar. Sementara keuntungan tidak langsung dalam bentuk gaji/upah, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah dan investasi dalam negeri mencapai US\$29,5 miliar.

Kemudian khusus untuk pengembangan masyarakat lokal Freeport membantu lewat program yang dikelola langsung oleh Freeport dan melalui program kemitraan dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). LPMAK merupakan lembaga pengelola dana kemitraan Freeport bagi pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Anggota lembaga ini terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, para tokoh Papua, pemimpin masyarakat adat Amungme dan Kamoro, serta Freeport.

Pada tahun 2014, jumlah dana investasi Freeport untuk pengembangan masyarakat baik yang dikelola langsung Freeport maupun melalui kemitraan dengan LPMAK senilai US\$92,2 juta. Sementara total dana investasi pengembangan masyarakat dari tahun 1992-2014 mencapai US\$ 1,3 miliar.

Kontribusi lain dalam bentuk pemanfaatan kandungan lokal. Saat ini Freeport sudah membeli barang dalam negeri sebesar 71%, dan penggunaan jasa dalam negeri sebesar 90%. "Kami menyambut baik jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat turut terlibat dalam peningkatkan penggunaan kandungan lokal," katanya.

Freeport sedang membangun smelter tembaga tambahan di Gresik, Jawa Timur. "Ini merupakan wujud dukungan kami terhadap program hilirisasi di dalam negeri, sehingga nantinya 100% konsentrat tembaga Freeport diproses di dalam negeri," katanya.

Sampai saat ini kemajuan pembangunan smelter sekitar 16%. Freeport telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendapatkan lokasi *smelter* tambahan yang berdampingan dengan PT Smelting di kawasan industri PT Petrokimia Gresik. "Kami sangat serius untuk mendirikan *smelter*," kata Direktur Utama Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Pembangunan *smelter* itu sedikit terhambat karena tanah bakal lokasi ternyata lembek. "Pekerjaan perkuatan tanah sedang kami lakukan," kata Maroef.

Saat ini sekitar 40% konsentrat tembaga Freeport diproses di PT Smelting Gresik, didirikan Freeport bersama konsorsium Jepang pada 1996. Konsentrat dari hasil pengolahan dikirim ke beberapa *smelter* yang mayoritas berlokasi di Asia.

Riza juga menjelaskan bahwa divestasi saham telah disepakati. Kepemilikan saham pihak nasional di Freeport akan ditingkatkan menjadi 30%. Saham tersebut akan ditawarkan untuk dibeli dengan nilai yang wajar kepada pihak nasional, diupayakan melalui mekanisme penawaran saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia. "Detail menge-nai mekanisme ini masih didiskusikan," terangnya.

Ini juga masih menjadi catatan, karena seharusnya pengawasan saham divestasi Freeport sudah diajukan paling lambat 14 Oktober 2014. Soal saham memang hal cukup rumit. Di situ tak hanya terdapat untung yang besar. Di dalamnya terkandung mega-investasi dan risiko yang, salah-salah, malah membuat babak belur. 



NASIB DIVESTASI SAHAM FREEPORT

DIREKTORAT Jenderal Mineral dan Batu bara telah melayangkan Surat teguran pada pihak PT Freeport Indonesia terkait divestasi saham. Dirjen Minerba, Bambang Gatot Aryono mengatakan Pemerintah telah mengirim surat teguran kepada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. "Kami sudah mengingatkan untuk segera menyampaikan penawaran, berapa harga saham yang ditawarkan," kata Bambang dalam konferensi pers terkait kinerja Kementerian ESDM, Minggu (8/11).

Seperti diketahui Freeport seharusnya sudah menawarkan sahamnya pada 14 Oktober 2015. Pada saat itu pihak Freeport hanya menyampaikan pihaknya siap melakukan divestasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun belum disampaikan secara rinci besaran nilai saham yang wajib didivestasikan tahun ini yakni 10,64%.

Dari penawaran tersebut, Pemerintah akan menilai apakah besaran nilai saham tersebut sudah wajar atau tidak.

Riza Pratama, Vice President Corporate Communication kepada Majalah TAMBANG mengatakan bahwa terkait divestasi pihak PTFI sudah sepakat untuk melakukan divestasi sampai 2019 hingga mencapai 30%. "Dimana saham tersebut akan ditawarkan untuk dibeli dengan nilai yang wajar kepada Pemerintah, Pemda termasuk melalui mekanisme Penawaran Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Detail mengenai mekanisme ini masih didiskusikan bersama," kata Riza.

Pihaknya masih menunggu dari Pemerintah kejelasan soal mekanisme. "Mekansimnya seperti apa itu kami serahkan pada Pemerintah. Yang ada sekarang dan tertuang dalam regulasi mekanismennya masih lewat pembelian langsung oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dan lainnya. Namun jika itu yang akan dilaksanakan maka mungkin harus dibicarakan lebih lanjut," ungkap Riza.

Salah satunya terkait harga, apakah nanti perhitungannya berdasarkan *replacement cost* atau sesuai dengan harga yang wajar. "Makanya kalau ditanya ke Freeport maka kami lebih suka lewat IPO karena menggunakan harga wajar. Tetapi semua itu kami serahkan pada Pemerintah. Kalau pun nanti menggunakan *replacement cost* maka perlu ada pembicaraan yang lebih detail," kata Riza.

Bagi Freeport harga saham tidak hanya berdasarkan *replacement cost* karena tambang juga punya nilai, di selain ada investasi, ada deposit dan juga ada asset yang harus dinilai secara wajar. Jadi harga saham setidaknya mempertimbangkan aspek-aspek ini dan tidak hanya sekadar *replacement cost* yakni besaran investasi yang sudah digelontorkan perusahaan.

Dan perlu diingat bahwa PP 77 tahun 2014 menyetujui harga saham divestasi harus berdasarkan harga yang wajar. Sementara Peraturan Menteri ESDM No.27 tahun 2013 menyebutkan dengan *replacement cost*. Tentu saja Permen ESDM harus menyesuaikan dengan arahan PP. Menjadi pertanyaan harga yang wajar seperti apa. Karena cadangan tambang juga merupakan asset negara.

Saat ini Pemerintah telah memiliki 9,36%. Sesuai dengan PP No. 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiat-

an Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport punya kewajiban untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 30%. Ini karena perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia ini mengembangkan tambang dalam. Sehingga berkewajiban melepas 10,64% sahamnya tahun ini dan pada 2019 pihak Freeport kembali harus melepas 10% saham.

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang menyatakan berminat seperti PT Aneka Tambang, Tbk dan PT Inalum. Muncul juga wacana untuk IPO karena lebih transparan dan akan membantu menggairahkan pasar saham. Tetapi mekanisme IPO punya dasar hukumnya dan oleh sebagian kalangan dinilai tidak sesuai dengan semangat divestasi yakni penguasaan oleh Bangsa Indonesia. Sementara lewat pasar saham, investornya tidak hanya orang Indonesia. Namun karena mekanisme dan valuasi sahamnya juga belum jelas maka semuanya masih sebatas rumor. **T**

PENGEMBANGAN MASYARAKAT FREEPORT DALAM GRAFIK

PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai beroperasi pada tahun 1973 di saat masyarakat setempat masih memiliki tingkat literasi yang sangat rendah dan rentan terhadap wabah penyakit endemik. Lokasi yang terpencil dan medan yang sulit ditempuh merupakan salah satu faktor penghambat. Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat kami difokuskan pada pendidikan, kesehatan dan membangun program ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.



Update: 2015

www.ptfi.com | www.tambang.com

JALUR LOBI SEBUAH KONTRAK

ALAMSYAH PUA SABA
alam@majalahtimbang.com

Freeport dikenal detail dalam memperjuangkan sebuah kontrak, dan sulit untuk mundur. Manajemen puncaknya bolak-balik datang ke Indonesia untuk lobi, dan menemui para petinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Pusat Komunikasi Publik, pada 26 Oktober 2015, mengeluarkan siaran pers. Isinya tema strategis: Kementerian ESDM mendatangkan nota kesepahaman dengan Departemen Energi Amerika Serikat, tentang pengembangan bidang energi. Siaran pers nomor 65/SJ/2015 tersebut menyebutkan, kerjasama tersebut bertujuan memperkuat hubungan persahabatan di bidang pengembangan dan konservasi energi.

Beberapa bidang yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut, meliputi penelitian terkait penangkapan dan penyimpanan karbon, penelitian terkait cadangan minyak bumi strategis, pengembangan energi terbarukan, inisiatif efisiensi energi dan juga pembentukan pusat keunggulan energi terbarukan.

Dalam keterangan tersebut juga disampaikan bahwa, penandatangan nota kesepahaman tersebut, merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menteri ESDM Sudirman Said dalam lawatan ke Amerika Serikat. Sudirman mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, yang tengah melawat ke Amerika Serikat.

Menteri Sudirman Said juga diundang pada sesi diskusi dengan beberapa perusahaan asal Amerika seperti General Electric, Conoco Phillips, dan Freeport McMoran. Perusahaan-perusahaan tersebut berencana meningkatkan investasinya di Indonesia.

Setelah satu jam siaran pers tersebut dilepas ke awak media, kemudian muncul siaran pers susulan. Isinya mengimbau kepada para wartawan untuk mengabaikan siaran pers yang sudah dikirim sebelumnya. Dalam siaran pers susulan itu disebutkan bahwa nota kesepahaman ditandatangani antara Menteri ESDM dan Pemer-

Jonathan Ernst/Reuters





Mengakhiri lawatan ke Amerika Serikat (AS) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri ESDM Sudirman Said menutup dengan penandatanganan kerja sama dengan Menteri Energi AS, Ernest J. Moniz di bidang pengembangan dan Konservasi energi.

rintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Menteri Energi Ernest Moniz.

Poin-poin dalam nota kesepahaman masih sama, tidak ada yang berbeda. Sementara pada informasi soal undangan diskusi, ada tambahan pertemuan satu-satu dengan perusahaan Amerika yang akan meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Nama-nama perusahaan yang disebutkan dalam siaran pers pertama, tidak dicantumkan.

Belum sampai 1 jam siaran pers itu dikirim, kemudian muncul pemberitahuan, meminta agar siaran pers yang sudah dikirim dianggap tidak ada. Bahasa yang digunakan, agar siaran pers "diembargo". Alasannya, Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, akan memperbaiki informasi terkini terkait kunjungan Menteri ESDM ke Amerika Serikat tersebut.

Informasi terkait pertemuan Menteri ESDM dengan perusahaan asal Amerika, khususnya Freeport memang selalu mengundang perhatian. Ketika Presiden Joko Widodo memutuskan berkunjung ke Amerika, salah satu isu besar yang mencuat adalah pembicaraan soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Pihak Istana membantah bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke negeri Barrack Obama, terkait pembicaraan soal Freeport. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI dengan tegas mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Freeport secara khusus, tidak ada dalam agenda kunjungan kenegaraan.

Sekretaris Kabinet, Pranono Anung saat mengantar rombongan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma mengatakan, lawatan Presiden Ke Amerika, hanya berdialog dengan Presiden Barrack Obama, mengenai peran strategis Indonesia-Amerika dalam percaturan global. Pranono memastikan dalam kunjungan tersebut, tidak ada agenda pembahasan soal kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Bahkan lanjut Pram, sapaan akrabnya, Menteri ESDM tidak jadi berangkat, sehingga spekulasi soal pembicaraan terkait kontrak Karya PTFI, tidak mungkin ada.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofan Djalil juga menegaskan hal serupa, bahwa tidak ada pembahasan soal Freeport. Pertemuan dengan Freeport, lanjut Sofyan, sudah dilakukan di Istana Negara. Pembahasan soal perpanjangan KK Feepoart, akan disampaikan sekembalinya Kepala Negara dari Amerika.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani yang juga turut serta dalam kunjungan Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan perwakilan Freeport. Hanya saja, pertemuan tersebut, bukanlah pertemuan khusus antara Presiden Jokowi dan pihak Freeport saja, tetapi pertemuan tersebut terjadi karena ada undangan dari Kamar Dagang Amerika Serikat (*US Chamber of Commerce*).

Menurut Franky, perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan perusahaan asal Amerika yang sudah melakukan investasi di Indonesia maupun yang berniat akan melakukan investasi di Indonesia. Freeport hadir dalam kapasitasnya sebagai perusahaan yang sudah melakukan investasi dan berniat meningkatkan investasi mereka di Indonesia.

Freeport memang isu yang menarik perhatian. Besitunya nilainya dan pengaruh yang ditimbulkan, membuat penambang emas, tembaga, dan perak di bumi Papua ini tak hanya jadi sorotan dari sisi ekonomi, melainkan juga dari sisi politik, dan sosial.

Kontrak Freeport di Indonesia akan berakhir pada 2021. Sesuai ketentuan PP 77 tahun 2014, perpanjangan kontrak dapat dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, atau pada 2019.

Freeport akan menggelontorkan dana sekitar US\$ 18 miliar untuk pembangunan smelter dan tambang dalam. Sambil berharap agar kepastian perpanjangan izin operasi pasca 2021. Ini dimaksudkan, agar ada kepastian hukum.

Pihak Freeport Indonesia memang gencar melobi kepada para pihak yang dianggap bisa memuluskan perpanjangan kontrak karyanya. Sebagai pemain veteran di





Pramono Anung

industri tambang di Indonesia, James R. Moffet memiliki akses bagus dengan para tokoh pengambil keputusan di Indonesia. Jim Bob, demikian ia juga sering dipanggil, pintar membawa Freeport tetap selamat mengarungi rezim yang berbeda-beda: sejak zaman Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Joko Widodo.

Menteri Sudirman Said mengakui luasnya akses yang dimiliki Jim Bob. "Ketika pertama kali saya bertemu dengannya, saya sampaikan bahwa saya tahu Pak Moffet punya banyak teman. Tapi saya mengingatkan, jangan menggalang kekuatan politik untuk menekan saya. Kalau punya ide atau suatu keinginan, ia bisa minta waktu langsung ke saya," kata Sudirman.

Untuk perpanjangan kontrak kali ini, Menteri ESDM Sudirman Said menceritakan, Jim Bob juga sudah ke Istana Negara, atas undangan Presiden Joko Widodo. Sudirman Said diundang Presiden untuk hadir.

Salah satu yang disampaikan Presiden dalam pertemuan itu adalah pemerintah akan membantu PT Freeport. "Investor yang masih di luar saja kami datangkan, apalagi yang sudah lama berada di Indonesia seperti Freeport," kata Sudirman menirukan Presiden.

Tapi, ada satu hal lain yang disampaikan Presiden. Jokowi minta untuk menyelesaikan kontrak Freeport, Jim Bob cukup berurusan dengan Presiden dan Menteri ESDM. Kalimat itu merupakan peringatan keras, yang bermakna Freeport tidak usah menggalang kekuatan politik untuk menekan pemerintah.

Berkeliling menemui para pengambil keputusan untuk mendapatkan dukungan. Sebagian dilakukan diam-diam, sebagian dengan serbuni-serbuni. Ini memang sah saja di Indonesia, yang keputusan politik dan ekonomi terkadang campur aduk.

Direktur Utama Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin mengakui, sejumlah tokoh diam-diam menemui dirinya, dan mengajukan berbagai permintaan. Maroef keberatan menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud. "Nama-nama mereka sama-sama sudah kita kenal karena sering masuk media," kata Maroef.

Terhadap berbagai proposal yang diajukan si tokoh itu, Maroef melaporkan kepada Jim Bob. Jawabannya: kalau permintaan seperti itu dituruti, manajemen Freeport bisa masuk penjara, karena perbuatannya masuk kelompok korupsi. "Jadi jelas sekali garis yang ditetapkan Jim Bob," kata Maroef. "Sebagai direktur utama, saya juga pu-

nya kewenangan terbatas. Tidak semua hal bisa saya putuskan sendiri," kata Maroef.

Freeport tak hanya agresif dalam urusan perpanjangan kontrak. Pada awal 2014, ketika keluar kebijakan bea keluar (BK) ekspor mineral, pihak Freeport juga mendatangi para petinggi negeri ini. Yang hadir adalah *Chief Executive Officer (CEO)* Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Richard Adkerson.

Arkerson, pada akhir Januari 2014, menemui Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan, Chatib Basri dan Menteri ESDM, Jero Wacik. Paraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Bea Keluar ekspor mineral keluar berbarengan dengan pelarangan ekspor konsentrat yang mulai berlaku pada 12 Januari 2014.

Dalam PMK tersebut disebutkan, perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan di dalam negeri, boleh mengespor produknya, namun dikenakan bea keluar progresif antara 20 sampai 60% secara berkelanjutan sampai akhir tahun 2016. Pihak Freeport keberatan dengan kebijakan BK yang mencapai 60% tersebut, apalagi pihaknya sudah melakukan proses pengolahan.

Mantan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, R Sukhyar menceritakan bagaimana kuatnya lobi yang dilakukan oleh pihak Freeport terkait renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Tidak hanya Presiden Direktur Freeport Indonesia yang ikut dalam lobi dan negosiasi tersebut, Sang *Chairman*, Moffet, ikut serta. Pihak Freeport menurutnya sangat detail dan teguh pendirian.

Sukhyar bercerita, bahkan dalam kondisi sakit, ia masih terus ikut serta dalam negosiasi ulang terkait kegiatan usaha Freeport pada 2014 lalu. Sebagai pemilik perusahaan, Moffet tidak pernah melewatkannya proses negosiasi tersebut. Lobi-lobi yang dilakukan cukup alot, melelahkan terutama mencari kesepahaman antara kedua belah pihak. Dalam renegosiasi kontrak Freeport pada 2014, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Kepala BKPM, Mahendradata, ikut serta dalam tim lobi negara.

"Saya sampai kena kencing manis, Pak Susilo Siswoutomo sampai menarik infus, agar saya bisa ikut serta dalam negosiasi pada 2014 lalu," demikian cerita Sukhyar ketika ditemui Majalah Tambang.

Kesan yang ditangkap Sukhyar, Freeport sangat serius dalam persoalan negosiasi kontrak. Hal ini tidak saja dibuktikan dengan kehadiran pimpinan Freeport dari Amerika, tetapi juga bagaimana kuatnya sikap mereka, dengan mengacu pada landasan hukum dan ketentuan mereka ketika menekan kesepakatan dengan pihak Indonesia.

Freeport, sebagaimana perusahaan asal Amerika lainnya seperti Newmont, ExxonMobil, ConocoPhilips, mendapat dukungan penuh pemerintahnya.

Robert Orris Blake, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, mengaku ikut memantau lobi yang dilakukan perusahaan Amerika di Indonesia, baik Freeport, Newmont, ataupun perusahaan asal Amerika lainnya. Khusus untuk Freeport dan Newmont, Blake mengatakan, kedua perusahaan tersebut, memiliki arti penting bagi Indonesia.

Kehadiran kedua perusahaan tersebut, imbuhnya, ikut memberikan masukan besar kepada Indonesia dengan nilai hampir 1% dari *Gross Domestic Product (GDP)* Indonesia. ■

FREEPORT McMORAN PAPUA, AFRIKA, DAN NEW MEXICO

EGENIUS SODA
egenius@majalah Tambang.com

Meski mulai merambah masuk ke sektor migas, Freeport tetap menjadikan bisnis tambang tembaga sebagai yang utama. Aset tambang tembaga Indonesia tetap menjadi andalan.

SEBAGAIMANA perusahaan tambang lainnya, kinerja Freeport McMoran, induk PT Freeport Indonesia (PTFI) juga sedang tertekan. Pelemahan harga komoditi, khususnya tembaga, menggerus pendapatannya, membuatnya merugi. Sektor migas yang menjadi unit bisnis baru juga terkena imbas anjloknya harga minyak.

Dalam laporan kinerja kuartal III tahun 2015, perusahaan yang melantai di Bursa Saham New York ini menderita rugi bersih sebesar US\$8,16 miliar atau setara dengan Rp110,16 triliun. Kuartal sama tahun lalu laba bersihnya US\$1,54 miliar atau Rp20,79 triliun.

Pelembahan harga tembaga dan juga migas yang berlangsung selama hampir setahun ini membuat pendapatan perusahaan turun. Dalam sembilan bulan pertama tahun ini perusahaan hanya membukukan pendapatan senilai US\$12,08 miliar. Padahal tahun lalu US\$16,2 miliar.

Chairman Freeport McMoRan, James R Moffet mengatakan, perusahaan telah melakukan semua langkah agresif untuk mengurangi dampak dari situasi ini. "Sepanjang kuartal III, kami melakukan sejumlah aksi agresif untuk memangkas biaya dan belanja modal untuk memperkuat posisi finansial perusahaan," ujar James R. Moffett.

Freeport telah memangkas belanja modal sebesar 29% dari rencana awal sebesar US\$5,6 miliar menjadi US\$4 miliar. Belanja modal unit bisnis tambang disusut seperempatnya, dari sebelumnya US\$ 2,7 miliar menjadi US\$ 2 miliar. Unit bisnis migas dipangkas lebih besar, sebanyak 30%, dari sebelumnya US\$ 2,9 miliar menjadi US\$2 miliar.

Dengan pemangkasan yang berani ini, kas perusahaan sejauh ini masih gemuk di tengah kondisi pasar yang sakit. Moffet memastikan bahwa manajemen perusahaan tengah menunggu perbaikan pasar komoditas tambang. Perubahan ini juga yang akan menentukan kebijakan yang diambil manajemen atas empat pusat penambangan besar yang dimiliki di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Presiden dan Kepala Eksekutif Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menambahkan perusahaannya akan terus fokus menjaga jumlah produksi, biaya operasional, dan belanja modal di tengah kondisi harga komoditas tambang yang berfluktusi. "Tentunya sambil memperkuat neraca keuangan dan menambah nilai atas beberapa aset portofolio tinggi milik perusahaan," ujar Adkerson.





Richard Adkerson

www.bloomberg.com

Freeport McMoran memiliki beberapa aset luar biasa. Di belahan Amerika Utara, perusahaan yang didirikan James R. Moffet ini mengoperasikan setidaknya tujuh tambang tembaga mulai dari Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita dan Miami di Arizona. Juga ada tambang Chino dan Tyrone di New Mexico. Semua aset ini dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan yang berkode saham FCX. Kecuali tambang tembaga Morenci, di situ Freeport McMoran menguasai 85% saham.

Di tengah kondisi pasar tembaga yang sedang melemah, Freeport menunda beberapa proyek untuk menekan biaya operasional dan menghitung kembali biaya modal. Tambang tembaga Miami, yang telah menghasilkan 33 juta pound tembaga, dihentikan sementara.

Pemangkasan biaya bahkan sampai 50% dilakukan di tambang Tyrone dan Sierrita. Untuk tambang lainnya efisiensi dilakukan mulai dari menekan pemanfaatan energi, penurunan rencana belanja modal, dan juga biaya tenaga kerja.

Di Amerika Selatan, Freeport McMoran memiliki dua tambang tembaga besar yakni Cerro Verde di Peru. Di tambang ini, Freeport McMoran memiliki saham 53,56% dan tambang El Abra di Chile. Tambang yang di Peru, selain memproduksi tembaga, juga menghasilkan konsentrat molibdenum dan perak.

Tahun ini, tambang Cerro Verde mulai meningkatkan kapasitasnya, dari 120.000 metrik ton bijih per hari menjadi 360.000 metrik ton. Diperkirakan pada awal 2016 mulai berproduksi secara penuh.

Freeport McMoran juga menjelajah alam Afrika. Di

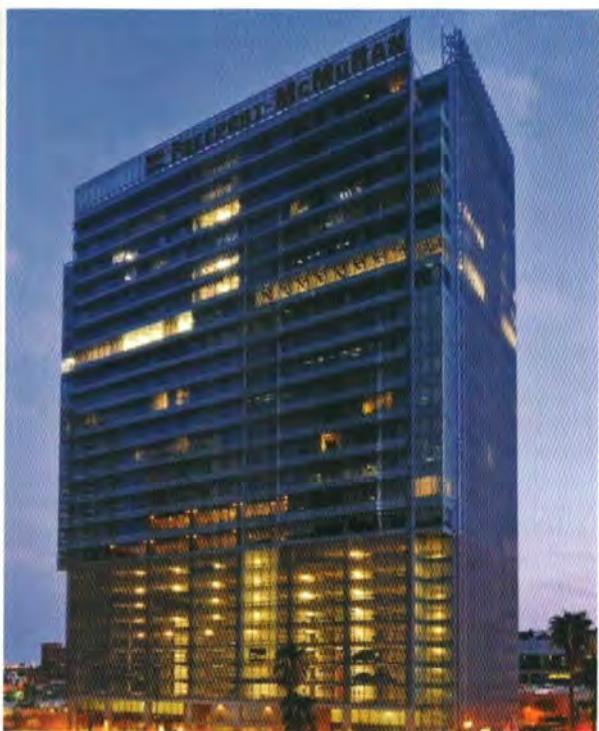
sini perusahaan memiliki asset tambangnya yakni Tenke Fungurume Mining, SA (TFM) yang beroperasi di Provinsi Katanga, Republik Demokratik Kongo (DRC). Selain memproduksi tembaga, tambang Tenke juga menghasilkan kobalt hidroksida.

Aset paling tambun, tentu saja tambang tembaga yang dikelolah PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam parparan untuk pemegang saham dikatakan bahwa tambang di Kabupaten Mimika ini merupakan aset dengan deposito kelas dunia. Tambang terbuka diperkirakan habis pada 2017. Saat ini sedang dibangun tambang bawah tanah.

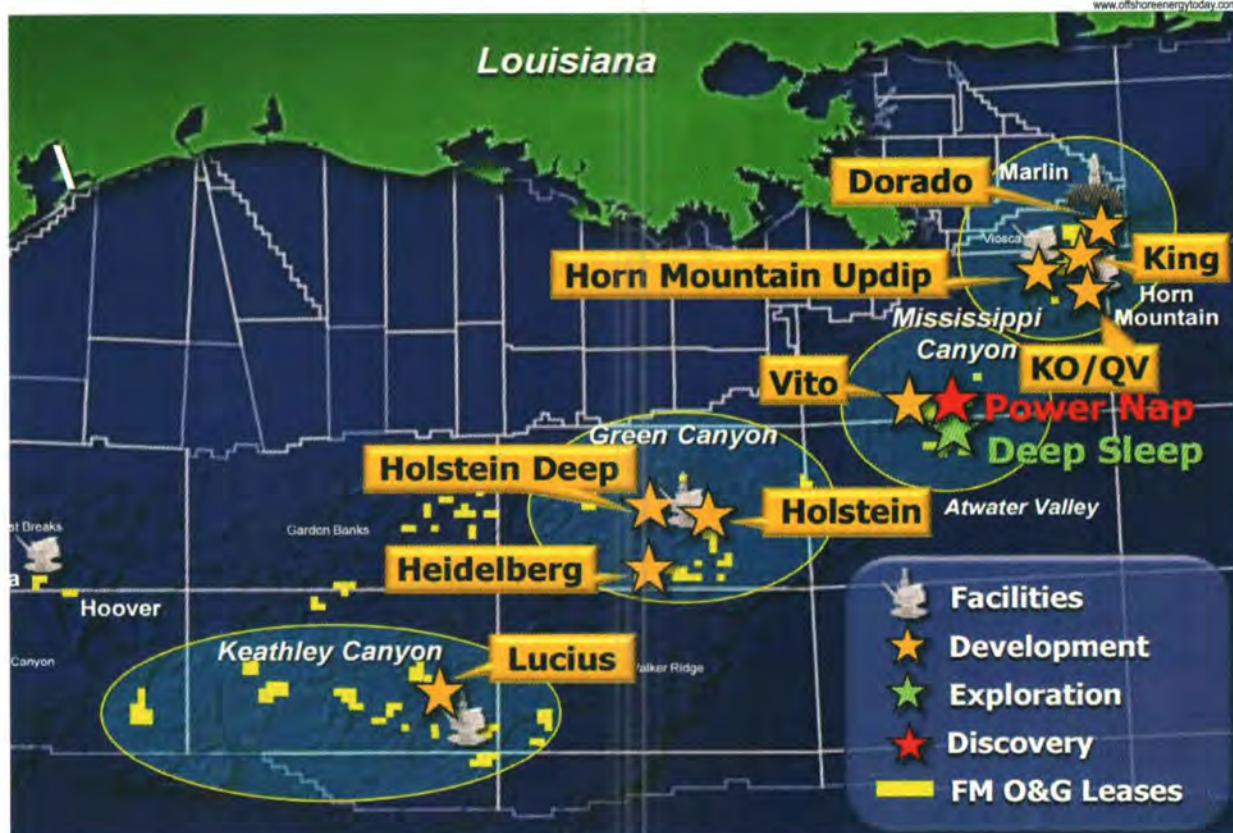
Produksi tambang bawah tanah itu dimulai pada September 2015. Peresmiannya direncanakan Oktober lalu, tapi ditunda karena Menteri Sudirman Said mendadak dipanggil Presiden untuk ikut mendampinginya menemui calon investor dari Saudi Arabia. Freeport merencanakan investasi sebesar US\$16 miliar untuk pengembangan tambang dalam.

Selama periode 2016-2019, perkiraan belanja modal pada proyek-proyek ini diperkirakan rata-rata \$ 1,0 miliar per tahun. Mengingat sifat jangka panjang dan skala dari proyek-proyek ini, biaya yang sebenarnya bisa bervariasi dari perkiraan ini. Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, kondisi pasar tembaga yang saat ini melemah tidak banyak berpengaruh pada rencana kegiatan yang akan dilakukan di PT Freeport Indonesia termasuk membangun smelter dan tambang dalam. "Karena Freeport sudah lama berinvestasi di Indonesia dan Pemerintah Indonesia juga sudah bekerja sama dengan baik selama ini," kata Riza.

Namun demikian, kepastian investasi dan juga kondisi pasar terbaru dan lingkungan ekonomi global yang tidak pasti tetap menjadi pertimbangan melakukan investasi di mana pun.



azbigmedia.com



Kegiatan eksplorasi dan eksplorasi Freeport McMoRan O&G berlangsung di laut dalam Teluk Meksiko, Amerika Serikat.

Freeport McMoran juga merambah ke bisnis minyak dan gas sejak 2013. Perusahaan ini membentuk unit usaha sendiri yang dinamakan Freeport McMoRan O&G (FM o&G). Sementara ini, kegiatan eksplorasi dan eksplorasi berlangsung di laut dalam Teluk Meksiko, Amerika Serikat.

Freeport McMoRan telah menggelontorkan sejumlah dana. Pada 2013, dialokasikan belanja modal senilai US\$ 392 juta untuk pengembangan di Teluk Meksiko. Pada 2014, belanja modalnya mencapai US\$2,1 miliar. Sembilan bulan pertama tahun ini sebesar US\$ 1,8 miliar.

Usaha dan kerja keras perusahaan ini membuat hasil ketika kegiatan pemboran di sumur Horn Mountain berbuah hasil. Pada semester pertama 2017, diharapkan bisa dihasilkan agregat sebanyak 30.000 barel minyak per hari.

Sejak dimulainya kegiatan pembangunan pada tahun 2014 di tiga platform produksi yang dimilikinya, Freeport membor 12 sumur, semua menuai hasil positif. Saat ini Freeport setidaknya memiliki tiga lapangan produksi di lepas pantai yakni Holstein, Marlin, dan Horn Mountain.

Selain di Teluk Meksiko juga ada beberapa konsesi seperti lapangan di darat dan lepas pantai California, proyek *shale gas* di Haynesville, dan lapangan minyak di Louisiana Selatan.

Dengan kondisi harga minyak dunia yang melemah ini, Freeport O&G melakukan beberapa kebijakan strategis dengan fokus pada proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi, dan berisiko rendah, untuk pengembangan infrastruktur di laut dalam dengan total kapasitas

sekitar 250.000 barel minyak per hari.

Selama kuartal ketiga 2015, pengembangan lapangan Heidelberg di Green Canyon terus dilakukan. Produksi pertama direncanakan pada pertengahan 2016. Lapangan ini termasuk salah satu lapangan besar dengan kualitas tinggi dengan kegiatan eksplorasi di kedalaman 5.200 kaki.

Freeport juga memiliki lapangan Holstein Deep, Holstein, dan Heidelberg. Pengembangan lapangan Holstein Deep saat ini sedang diselesaikan, diharapkan pada pertengahan 2016 sudah selesai. Ketiga ini bisa menghasilkan 24.000 barel setara minyak per hari.

Sementara Holstein yang berlokasi di Green Canyon Blok 643 yang sudah dilengkapi dengan fasilitas produksi yang mampu memproses 113 MBbls minyak per hari. Lalu ada juga lapangan Marlin Hub yang juga dilengkapi dengan fasilitas produksi yang mampu memproses 60 MBbls minyak per hari.

Dengan berkembangnya unit bisnis migas ini, muncul wacana untuk membentuk anak usaha sendiri di sektor migas yang terpisah dari Freeport McMoRan. Ada beberapa mekanisme yang sedang dicoba, salah satunya melalui pemisahan dengan induk usaha menjadi entitas sendiri. Salah satu tujuannya agar ada pemisahan yang jelas antara sektor pertambangan dengan sektor migas. Dengan kata lain agar uang hasil tambang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi di migas. Jangan sampai, misalnya, hasil tambang di Papua malah larinya ke New Mexico. ■

SAYA HARUS MEMUTUS MATA RANTAI KORUPSI

Menteri ESDM Sudirman Said mendukung langkah Freeport untuk terus berinvestasi di Indonesia. Bersama Presiden Jokowi, mereka berdua bertemu bos Freeport, James Moffet.

MESKI kontrak Freeport belum diperpanjang, tetapi sinyal yang ditunjukkan jelas: pemerintah bakal meneruskan izin operasi PT Freeport Indonesia. Di aturan yang masih berlaku, perpanjangan itu baru bisa diteken dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Itu memang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan jika tidak memperpanjang izin operasi PTFI.

Angin yang bertiup memihak Freeport mengundang reaksi berbagai pihak, termasuk dari Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Rizal menyebut Sudirman Said

keblinger, dan dinilai terlalu bersemangat memperpanjang kontrak. Rizal ingin royalti Freeport naik jadi 6%. "Soal Freeport, sikap Presiden jelas. Menterinya saja yang tidak menangkap," katanya dalam acara "Rembug Nasional Setahun Pemerintahan Jokowi-JK", di Jakarta, pertengahan Oktober lalu.

Majalah TAMBANG mewawancari Menteri ESDM Sudirman Said, untuk menanyakan ihwal kontrak Freeport. Dalam bertemu selama kurang lebih sejam di Jakarta Selatan, Menteri Sudirman menceritakan banyak hal terkait PTFI.

Kalau benar izin Freeport diperpanjang, sikap pemerintah dianggap berbeda dengan ketika menangkan Blok Mahakam. Ketika itu pemerintah tegas berpihak ke nasional dengan memberi hak sebagai operator pada PT Pertamina. Sementara dengan Freeport *kok* berbeda?

Mari kita pikirkan terjemahan berpihak pada Indonesia. Apakah kepemilikan adalah segala-segalanya, atau manfaat ekonomi nyata yang kita kejar? Freeport adalah tempat 30.000 lebih karyawan dan keluarga bergantung. Dari jumlah tersebut hanya 2% yang ekspatriat, selebihnya orang Indonesia, dan 70% orang Papua. Bahkan sekarang mungkin lebih. Itu baru orang yang bekerja di area operasi.





Dok. FREEPORT

Kalau dilihat dari belanjanya sebesar US\$1,9 miliar yang dianggarkan setiap tahun, sebagian besar juga dibelanjakan ke perusahaan Indonesia. Dari jumlah tersebut, US\$1 miliar untuk belanja barang dan US\$900 juta untuk jasa. Artinya kontraktor, pemasok, dan penyedia jasa lainnya menerima manfaat dari aktivitas tambang PT Freeport Indonesia. Sebagian besar adalah perusahaan Indonesia yang punya karyawan orang Indonesia.

Negara mendapat pemasukan tidak kurang dari pajak, dan royalti. Royalti adalah porsi paling kecil. Manfaat paling ril adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja dan juga pemanfaatan kandungan lokal Indonesia.

Orang Papua menilai, keberadaan Freeport kurang bermanfaat bagi mereka?

Faktanya, sesuai kajian LPEM UI, 90% PDB Provinsi Papua berasal dari Freeport. Sumbangannya bagi PDB Kabupaten Mimika sebesar 35%. Berpikir menutup Freeport itu menyakiti hati warga Papua karena yang paling terkena dampak langsung adalah orang Papua.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap tuduhan bahwa Pemerintah tidak konsisten dalam kaitan dengan keberpihakan pada perusahaan nasional?

Orang yang punya skenario mengambil alih tidak paham bahwa mengambil alih Freeport tidak sama dengan mengambil alih Blok Mahakam. Pengelolaan Blok Mahakam itu menggunakan skema kontrak bagi hasil (PSC). Sepanjang tahun investasi dalam operasional diberikan biaya pemulihan atau *cost recovery*.

Setelah kontrak berakhir, seluruh barang produksi dikembalikan pada negara. Setelah kontrak berakhir KKKS akan pergi sementara semua barang produksi akan jadi

milik negara. Perusahaan lain bisa masuk dan menggunakan alat produksi tersebut. Karena itu proses transisinya akan jauh lebih mulus.

Sementara PT Freeport Indonesia adalah perusahaan kontrak karya. Seluruh aset yang dibeli adalah aset milik perusahaan tersebut. Kalau pada 2021 mereka pergi maka pertama kita harus memberi kesempatan pada perusahaan untuk membereskan peralatan miliknya, termasuk yang di tambang bawah tanah sepanjang 500 kilometer. Di sana ada fasilitas penambangan, ada fasilitas pengolahan bijih, dan pengolahan konsentrat. Diperkirakan dibutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun untuk membereskannya.

Kemudian Indonesia mulai mencari kontraktor baru, siapa pun mereka, dan butuh 3-4 tahun untuk memasang alat produksi yang baru. Memang bisa saja ada skenario antara yang lama dengan yang baru bernegosiasi membeli semua alat produksi. Tetapi itu suatu yang beranda-andai juga. Apapun skenarionya, memberhentikan Freeport sama juga akan membiarkan Timika lumpuh, Papua drop, selama kurang lebih 6 tahun.

Seorang pejabat tinggi menyesalkan mengapa kali ini Indonesia tidak seberani sebagaimana ketika dalam kasus Blok Mahakam?

Memang tidak bisa disamakan antara Blok Mahakam dan Freeport. Dan saya juga mendengar salah seorang pejabat yang bicara bahwa pemutusan kontrak PT Freeport Indonesia bisa seperti peralihan Blok Mahakam. Orang seperti itu tidak paham hukum, tidak paham kontrak, dan tidak paham kondisi lapangan. Saya sering mengatakan, kalau ingin melihat rumitnya operasional Freeport, datanglah ke sana.



TAUFIEQURROHMAN/TAMBANG



Kedua, keberbihakan pada Indonesia itu maknanya apa? Bagi saya wujud keberpihakan itu salah satunya institusi apa pun, lembaga apa pun dan milik siapa pun, harus memberikan manfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Keberpihakan seperti apa yang harus ditunjukkan PT Freeport Indonesia?

Tentu tugas saya sebagai menteri teknis memastikan keberpihakan tersebut terlaksana sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pertama divestasi jangan terlambat. Kalau itu kita laksanakan, semakin banyak pemegang saham dari Indonesia yang mengontrol dan ikut campur dalam pengelolaan tambang.

Kedua, meminta supaya smelter jangan ditunda. Kalau smelter dibangun artinya nilai tambah ada di dalam negeri. Ketiga, kandungan lokal yang harus meningkat. Kalau sekarang sudah 67% harus terus ditingkatkan. Saya minta minimal tiap tahun naik 5% dan harus diaudit. Untuk melaksanakan amanat kandungan lokal tersebut kami pertemukan pihak Freeport dengan 10 BUMN. Mereka kami bawa ke Papua untuk menggali apa yang bisa dimanfaatkan.

Misalnya PT Pindad dan PT Dahana bisa memasok bahan peledak, Pertamina meningkatkan suplai BBM maupun pelumas karena operasi tambang butuh oli dan minyak yang banyak. PTBA bisa memasok batu bara, PLN bisa bekerjasama bangun tenaga listrik baru karena Freeport butuh kapasitas listrik lebih besar lagi untuk tambang dalamnya.

PT Krakatau Steel bisa memasok besi dan baja. Surveyor Indonesia sudah di sana. Kami dorong semua industri baik BUMN maupun swasta nasional untuk mengambil bagian dari kegiatan pertambangan di sana. Itulah wujud dari keberpihakan kami.

Kalau belanja Freeport untuk barang dan jasa saat ini US\$1,9 miliar setahun, bakal meningkat ketika operasi bawah tanah mulai operasi penuh. Semakin banyak bisnis masuk ke perusahaan Indonesia, dan akan mendorong perputaran ekonomi. Bukan itu esensi investasi? Investasi boleh punya siapa saja. Tetapi yang penting, bagaimana caranya perputaran ekonomi menggelinding di Indonesia.

Menko Rizal Ramli mengatakan Anda *kebligner*, karena memperpanjang kontrak Freeport?

Ini harus dicatat, ada beda yang besar antara kata-kata dan karya. Saya memilih berkarya daripada berkata-kata. Selebihnya saya tidak mau menjawab.

Dalam kasus Freeport ini, antar-pejabat pemerintah seperti kurang koordinasi?

Ini bukan soal koordinasi, tetapi lebih ke arahan atau kebijakan dari pemimpin negara. Arahannya jelas, karena kita butuh investasi maka jagalah investasi yang ada dan berilah sinyal positif pada pasar. Saya sebagai menteri teknis yang bertanggungjawab atas sektor itu harus mencari jalan keluar. Tidak semua jalan keluar itu bisa dijelaskan secara detail karena ada pertimbangan tertentu.

Maka surat-menyurat antara saya dan Freeport itu kami susun setelah mendengar arah dari Presiden. Karena saya yang mengeluarkan surat tersebut, maka saya yang bertanggungjawab. Saya menerjemahkan arahan Presiden, dan biarkan Presiden menilai apakah surat tersebut sesuai arahan atau tidak. Tidak malah dijadikan konsumsi spekulatif.

Sebenarnya apa arahan Presiden mengenai Freeport?

Saya diminta Presiden bertemu Jim Bob Moffet, Chairman Freeport McMoran, induk Freeport Indonesia. Kepada Moffet, Presiden mengatakan bahwa pemerintah mengundang investasi dari banyak negara di dunia. Jadi tidak masuk akal orang yang sudah investasi di Indonesia diputus. Tetapi aturan mengatakan pemerintah belum memutuskan perpanjangan kontrak Freeport. Moffet diminta menunggu sampai hukum memungkinkan. Presiden mempersilakan Moffet terus berinvestasi, pemerintah menjamin akan menjaganya. Moffet diminta mencari jalan keluar bersama menteri, yaitu saya.

Moffet dipesankan untuk tidak usah berkeliling, bertemu orang lain. Ia cukup bertemu saja dengan Menteri ESDM. Biar dia yang menyelesaikan itu. Jangan menggunakan tekanan politik. Moffet diminta menyelesaikannya lewat jalur yang benar.

Saya diminta untuk menyediakan dokumen-dokumen apa yang mereka butuhkan untuk kebutuhan inves-



tasi mereka, seperti untuk penggalangan dana atau lainnya, sepanjang tidak melanggar hukum.

Maka saya kemudian berdialog dengan Moffet, di kantor Kementerian ESDM. Saya minta Moffet membuat surat ditujukan kepada Menteri ESDM tentang apa yang dibutuhkan. Karena saya juga harus punya jejak, tidak boleh mengirim surat tanpa ada jejak awal. Di sana tidak ada kata "perpanjangan kontrak". Hanya ada kalimat silakan melanjutkan investasi karena kontrak Anda masih valid, dan pemerintah masih berusaha merevisi UU untuk kepentingan investasi. Kalau regulasi sudah, beres silakan mengajukan sesuai dengan regulasi tersebut. Itu arahan Presiden. Dan itu yang disampaikan di istana.

Mengapa ketika Anda ketemu Presiden, di situ sudah ada Moffet? Kesannya ada yang dirahasiakan.

Presiden menjalankan tugas negara, dan itu bukan merupakan operasi rahasia. Itulah cara beliau mengurangi kegaduhan. Akan salah kalau Presiden dan Moffet membuat kesepakatan sendiri, baru kemudian mengundang saya. Presiden ketika bertemu Moffet selalu mengajak menteri teknisnya. Saya sebagai menteri teknis berkewajiban menindaklanjuti.

Jim Moffet seperti luar bisa, karena diundang khusus oleh Presiden?

Itu pertemuan biasa, Presiden sering bertemu dengan *chairman*, atau pengusaha energi. Setiap bertemu dengan pengusaha sektor apa pun, menteri teknis selalu

diajak. Sepengetahuan saya tidak ada pertemuan, misalkan dengan investor migas, yang tidak melibatkan saya. Hal yang disampaikan ke Jim Moffet itu bukan hal yang baru sama sekali. Itu sering kami diskusikan.

Beliau mengundang, dan untuk mengurangi kegaduhan, maka dikordinasikan begitu rupa. Kemudian Presiden mengatakan, sekarang silakan kalian berunding untuk mem *follow up*. Begitu saja.

Setelah itu ketika *draft* selesai, saya sampaikan ke Presiden. Beliau menanyakan apakah dengan ini Freeport sudah merasa terbantu? Saya katakan sudah. Juga ditanya bagaimana secara hukum apakah sudah jelas dan tidak melanggar hukum, saya katakan tidak ada. Ya sudah saya tanggungjawab, dan tandatangan siang itu. Kemudian kasih ke pihak Freeport Indonesia.

Saya mendengar kabar, salah satu yang membuat Presiden memanggil Jim Moffet adalah karena Presiden terganggu dengan aksi bos Freeport yang keliling ke beberapa politisi penting?

Ini perlu tulis dengan utuh. Sebagai Menteri ESDM, saya berkepentingan memutus mata rantai dan praktik menjadikan Freeport sebagai sasaran pemerasan politisi korup yang mengatasnamakan negara. Freeport memang sasaran empuk. Oleh karenanya langkah-langkah saya buat secara lebih rasional, transparan, dan tidak ada langkah yang saya berjalan sendiri. Ketika masuk ke hal teknis saya akan berbicara dengan tim.

Dengan Freeport, saya tidak pernah bertemu sen-



Dok. FREEPORT



diri. Freeport mengatakan, ini pertama kali ditangani secara profesional. Itu ia sampaikan di hadapan Presiden, kemudian disusul dengan surat yang isinya menyampaikan terima kasih atas sikap profesional Menteri ESDM.

Ini yang disebut sebagai negara ini masih punya martabat. Berbeda kalau cara berunding dengan cara menekan, memberi aba-aba tidak akan memperpanjang lalu mengirim orang untuk memeras. Itu memalukan negara.

Apakah karena besarnya aspek politik, sehingga perimbangan ekonomi menjadi nomor kesekian dalam kasus Freeport?

Dalam sebuah keputusan yang memiliki dampak ekonomi besar, melibatkan uang banyak, dan orang yang terlibat juga banyak, mau tidak mau unsur politik juga kental. Dari dulu saya melihat yang membuat sektor ESDM menjadi ruwet dan rusak adalah karena elemen politiknya kebanyakan. Elemen politik terlalu dominan sehingga mengabaikan aspek profesionalisme.

Saya sejak awal mendangkan bahwa kita punya mimpi untuk mewujudkan nuansa profesionalisme, nuansa integritas, dan politiknya jangan banyak. Kalau semua hal dipolitisir, yang diuntungkan hanya pemburu rente. Maka saya harus terus-menerus mengambil keputusan secara professional. Tunjukkan bahwa kita tidak punya kepentingan, tidak punya vested interest.

Anda pasti tahu pihak mana yang menyerang dengan segala macam cara. Tetapi saya hanya lihat satu titik, yakni ke atas, bagaimana pemimpin saya. Yang membuat keputusan sulit di ESDM ini bisa diambil karena kelurusan dari pemimpin kita. Presiden dan Wakil Presiden selalu menghargai keputusan profesional dari menteri teknis. Memang saya bermimpi sekali elemen politik makin hari makin dikurangi. Itu juga yang saya katakan pada Moffet ketika pertama kali bertemu pada awal November 2013.

Saya katakan pada Moffet bahwa saya tahu dia punya banyak teman di Indonesia. Tetapi situasi Indonesia tidak seperti 30 atau 40 tahun lalu. Karena waktu itu kita belum punya ahli pertambangan, ahli hukum, dan sekarang kita sudah lebih maju. Ia akan berurusan dengan pemerintahan yang berbeda. Saya sampaikan, saya akan terganggu kalau dia berkelliling kepada tokoh-tokoh, dan

kemudian menggunakan mereka untuk mengambil sebuah keputusan besar. Silakan bertemu siapa pun, tetapi saya diberitahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Supaya saya bisa menjaga proses ini bisa berjalan.

Ketika bertemu Presiden, Moffet kembali diingatkan lagi bahwa dia tidak perlu berkeliling bertemu siapa pun. Bertemu saja saya selaku menteri teknis.

Salah satu yang membuat gaduh dalam kasus Freeport ini adalah pemerintah daerah, yang merasa kurang dilibatkan.

Hubungan saya dengan pemerintah daerah sangat baik. Setiap tahapan selalu saya konsultasikan. Dari 17 item yang sudah disepakati oleh Freeport, 11 ditangani daerah. Gubernur bilang, yang 6 akan ikut Menteri ESDM.

Bagaimana dengan keinginan pemda agar Freeport mendirikan smelter di Papua?

Pada awal tahun tercapai kesepakatan prinsip, bahwa disadari membangun smelter butuh infrastruktur seperti listrik, dan kawasan pun belum terbangun. Pemerintah menyampaikan suatu persetujuan, silakan bikin smelter kalau keadaan memungkinkan. Kalau smelternya sudah ada Freeport akan memberikan konsentrat 900.000 ton per tahun. Tetapi Pemerintah Papua juga tidak boleh menghalangi pembangunan smelter di Gresik. Tercapai kesepakatan seperti itu.

Dari sisi nasional, produksi tambang bawah tanah cukup untuk dua smelter ini. Baik juga untuk punya beberapa smelter di lokasi berbeda. Sejauh ini mereka sudah menjajaki investor untuk bangun smelter.

Pemerintah daerah juga minta diutamakan dalam divestasi.

Divestasi merupakan salah satu cara memutus mata rantai politisi korup yang mau memeras. Mereka menjual nama presiden dan wakil presiden untuk mendapat saham. Presiden marah sekali. Maka sejak awal saya sudah memberi sinyal, yang terbaik itu lewat pasar modal. Karena lewat pasar modal itu ada penyelidikan, penilaian, dan lainnya, dan bisa menggairahkan pasar modal. Soal siapa yang masuk apakah pemerintah, perda, atau





Pemerintah merespon positif minat raksasa minyak dan gas asal Arab, Saudi Aramco untuk membangun kilang di Indonesia.

BUMN, kita bisa tata. Banyak hal belum sempurna di pasar modal kita, tetapi jauh lebih baik prosesnya daripada yang tertutup.

Ketika di Pertamina, saya sempat mengajukan agar Pertamina menjadi *non listed public company*. Tidak jual saham tetapi mengikuti kaidah pengelolaan perusahaan yang baik dan benar.

Dalam hal Freeport, untuk proses divestasi itu, mulai dari sekarang prosesnya dimulai. Nanti hasil valuasi disampaikan. Prinsipnya sudah disepakati, 10,64% dilepas tahun ini, dan menjelang akhir 20% lagi. Kemudian urutannya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN baru ke swasta. Dan proses ini kalau diwarnai dengan mekanisme IPO akan lebih menarik. Revisi PP sebenarnya masuk sebagai bagian dari stimulus kebijakan ekonomi. Tetapi orang yang pikiran kotor itu melihat seolah-olah untuk memuluskan langkah Freeport. Itu kekeliruan berpikir, yang berteriak karena sogokan artinya mereka punya imajinasi bahwa punya kekuasaan untuk disogok. Ini menurut saya kita terpenjara oleh jalan pikiran seperti itu.

Pertemuan dengan investor arab?

Presiden berkunjung ke tiga negara di Timur tengah akan ada semangat memperbarui kerja sama dengan ketiga negara. dua-duanya merasa bahwa kita sulit merealisasikan investasi padahal mereka punya uang banyak. Indonesia sedang tumbuh ekonomi sehingga besar potensinya. Bagaimana kita merealisasikannya.

Kunjungan arab ke Indonesia menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. karena mereka ingin merealisasikan

yang sudah dibicarakan dengan Presiden. Kemarin mereka diutus langsung raja dengan dua *privater jet*. Saya ditelpon harus bertemu dengan ini dan ini. Kita bicara mulai dari kilang, *storage*, kilang. Itulah yang sedang kita bangun bersama.

Jajaki dan saya ditugasi sebulan dari sekarang dengan membawa *list*. UEA akan ada penjanjakan tanjung api-api untuk infratruktur dan pariwisata. Tim ini terus melihat ada yang nyangkut ditelpon. Komunikasi dengan menteri di timur tengah yang ditugasi sangat lancar. Ini akan jadi sejarah baru bahwa akhirnya satu demi satu dana timur tengah masuk,

Selama ini dua duanya apriori. Satunya meragukan keseriusan pemerintah Indonesia dan di sisi lain kita menganggap investor arab hanya beri *php*. Muncul sekali lalu hilang. Bukan tidak mungkin kita buka kantor di timur tengah. Memang sudah ada kantor BKPM tetapi mungkin kita akan perkuat.

Yang akan realisasai segera, kilang pertamina berdampingan Aramco untuk mendetailkannya. CEO Aramco datang. Paralel, pertamina presentasikan apa yang mereka butuhkan. Jadi yang paling dekat itu 4 kilang baik yang ada maupun yang sudah ada. Kemudian satu *storage*. *Supply crude*. Presiden ketika bertemu rombongan, mulai dengan yang ini dahulu. Setelah ini jalan kemudian yang lain akan menyusul. Kalau berhasil ini akan banyak 600 barel. Butuh 5 sampai 10 tahun mulai dari *refinary* yang ada pun yang baru. Nanti ketika ke sana sudah dikonkretkan. Presiden minta November sudah harus tanda tangan. T



FREEPORT, WHAT'S NEXT?

Anang Rizkani Noor*

Rencana perpanjangan kontrak Freeport memicu polemik, bahkan para menteri di dalam kabinet juga saling berbeda pendapat. Silang pendapat tersebut ditutup dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa nasib perpanjangan akan ditentukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir, yaitu 2019.

Industri berbasis sumber daya alam seperti tambang selalu menarik perhatian, karena sifatnya yang mengambil dari perut bumi milik seluruh warga, yang dititipkan pengelolaannya kepada pemerintah. Namun ada rasa ketidakadilan ketika melihat hasil burni itu diusahakan hanya oleh sekelompok orang, bahkan sebagian dari mereka adalah orang asing.

Mencari tambang di Indonesia

Saat membahas Freeport, maka akan tergambar betapa kayanya negeri ini akan bahan tambang. Banyak awam yang kemudian berasumsi bahwa menemukan tambang tentu tidaklah sulit. Proses penemuan tambang Freeport bisa menjadi jawaban atas asumsi itu. Indikasi adanya potensi tambang di Papua bagian tengah diketahui pada 1936. Namun ternyata informasi mengenai besarnya endapan - yang kemudian disebut Ertsberg - baru 24 tahun kemudian ditemukan oleh ekspedisi berikutnya. Cadaangan yang lain, Grasberg, baru diketemukan 28 tahun sejak Erstberg.

Maka menarik untuk mengetahui seberapa mudah sebenarnya untuk menemukan tambang yang berskala dunia. Stephen B. Bartrop dan Pietro Guj dalam *Estimating Historical Probabilities of Discovery in Mineral Exploration* (2009) mengatakan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan mulai 1985-2003 ternyata kans untuk menemukan tambang berskala dunia di daerah yang sama sekali baru yang belum pernah dieksplorasi (*greenfield*) ternyata kecil, yaitu 0,07% atau kira-kira 1 penemuan dalam 1.000 kali usaha.

Kegiatan di lapangan pun menunjukkan bahwa untuk menemukan sebuah tambang bukan hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, namun kebijakan di bidang pertambangan menentukan. *Fraser Institute* dari Kanada secara reguler memotret kedua hal tersebut melalui survei di 122 negara. Pada 2014 hasilnya adalah Indonesia

menempati ranking 35 untuk potensinya. Namun tidak demikian pada aspek kebijakan. Beberapa aspek kebijakan kita ternyata peringkatnya di bawah 100, seperti konsistensi aturan administrasi, *trade barriers*, sosial ekonomi dan pembangunan masyarakat, pertanahan, dan bahkan untuk sistem hukum menempati urutan paling buncit.

Kontrak Karya

Rezim Orde Baru yang baru menggeliat segera menangkap peluang investasi di bidang tambang yang tidak mudah ditemukan tadi. Dibuatkanlah payung hukum berbentuk Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Pertambangan 1967 sebagai aturannya. Freeport pada 1971 menandatangani kontrak karyanya yang pertama dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku 30 tahun.

Kontrak karya memakai azas *lex specialis* dan ketentuan *nailed down*. *Lex specialis*, artinya mengatur hal-hal secara lebih rinci dibandingkan dengan peraturan umum, sedangkan *nailed down* yaitu isinya akan berlaku hingga akhir kontrak meskipun aturan umumnya berubah. Bisa dimengerti, ketentuan itu dibutuhkan untuk kepastian investasi di negara yang belum lama merdeka.

Setelah hampir 50 tahun beroperasi, Indonesia makin demokratis, masyarakat semakin terbuka untuk mengungkapkan keinginan agar negara dan masyarakat mendapat hasil yang lebih besar dari pertambangan. Maka dipertanyakanlah kembali kontrak yang sudah ditarik, mumpung Freeport ingin memperpanjang kontraknya. Renegosiasi kontrak kemudian dilakukan, untuk membahas kenaikan royalti, divestasi kepada pihak Indonesia, peningkatan kandungan lokal, serta pemrosesan dalam negeri.

Royalti dan divestasi

Isu yang paling banyak disorot adalah kenaikan royalti dan divestasi, meskipun yang lain juga tidak kalah penting. Banyak disuarakan, bahwa royalti Freeport terlalu rendah, harusnya dinaikkan menjadi 6-7% seperti yang berlaku di negara lain. Muncul pertanyaan, sebenarnya berapa nilai royalti yang pantas. Salah satu cara melihat kepastian adalah membandingkan praktik pengenaan royalti di berbagai negara.

Kita ambil salah satu contoh, royalti tembaga. Merujuk kepada studi *Price Waterhouse Coopers* 2012, royalti tembaga di berbagai negara bervariasi. Di Argentina 3%, Australia 2,7-3,5%, Brazil 2%, India % 4,2. Chile mengekan royalti dengan *range* lebar 0-14%. Namun ada pula negara seperti Mexico yang tidak mengenakan royalti.

Di Indonesia, dalam peraturan yang berlaku sekarang royalti tembaga 4% dan emas 3,75% Bisa dilihat bahwa untuk nilai royalti kita cukup bagus dibandingkan di negara lain. Dalam renegosiasi kontrak yang dilakukan intensif, pemerintah meminta Freeport menyepakati royaltinya dinaikkan agar sesuai dengan peraturan yang sekarang yang lebih tinggi dari angka 1% yang tertera di kontrak.

Selain royalti, cara lain untuk menaikkan pendapatan negara adalah meningkatkan kepemilikan saham. Bangsa ini tentu senang apabila Freeport dan semua pertambangan asing di sini menjadi milik Indonesia. Yang sangat bersemangat mengatakan, sekarang saja diambil alih, tidak perlu menunggu habis kontrak.

Ada juga yang berpendapat, persulit saja syarat perpanjangannya sehingga mereka tidak bisa memenuhi, lalu ambil alih saat masa kontrak habis. Yang moderat mengusulkan untuk mengambil alih secara bertahap sesuai aturan.

Masalahnya, kontrak Freeport tidak mengharuskan mereka melakukan divestasi atau menjual saham kepada pihak Indonesia. Sedangkan peraturan pemerintah yang berlaku sekarang mengatakan bahwa divestasi sudah harus mulai setelah tahun kelima beroperasi. Sebagai jalan tengahnya, dalam renegosiasi pemerintah meminta Freeport menyetujui segera divestasi hingga mencapai 30%, dari yang 9,36% yang sekarang dimiliki Pemerintah.

Pertanyaannya yang harus dijawab kemudian adalah, bagaimana cara mengeksekusi agar 30% saham dan seterusnya hingga 51% tersebut milik pihak Indonesia dengan hasil yang maksimal. Mari kita lihat beberapa contoh divestasi tambang besar yang sudah dilakukan.

Tambang batu bara Kaltim Prima Coal yang dulunya milik Rio Tinto dan BP, pada awal 2000-an didivestasikan kepada Bumi Resources 100%, sedangkan Kideco sebagian menjadi milik Indika Energy. Tambang emas Newmont Nusa Tenggara (NNT) mendivestasikan sebagian sahamnya kepada konsorsium PT Multi Capital yang ber-

afiliasi dengan Bumi Resources dan PT Daerah Maju Bersaing, BUMD milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumba. Divestasi NNT ini sempat masuk ke Mahkamah Konstitusi ketika pemerintah pusat juga menginginkan membeli saham.

Saham Indonesia di Freeport sempat beralih beberapa kali, dari kelompok Bakrie, kemudian Bob Hasan, dan kembali ke Freeport. Saat ini yang masih tersisa adalah milik pemerintah sebesar 9,36%. Melihat cerita divestasi, bungkusan cerita nasionalisme yang biasanya gegap gempita di awal ternyata tidak berakhir manis di belakang. Pemilik Indonesia di tambang-tambang besar ternyata pemiliknya kelompok itu-itu saja, sehingga peningkatan pendapatan dan kontrol atas akses pertambangan pun dipertanyakan.

Sebagai negara yang menghormati tata krama internasional, tampaknya mengambil alih Freeport dengan cara yang moderat, yaitu sesuai aturan dan tahap demi tahap menjadi pilihan yang bijak. Kali ini sebaiknya pemerintah mengambil sikap yang lebih aktif daripada membiarkan saham ini jatuh kepada swasta yang belum memberikan dampak signifikan kepada pemerintah.

Pembelian bisa dilakukan melalui BUMN atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP), meskipun pilihan melalui BUMN agak berat mengingat penyerahan modal negara (PMN) kepada BUMN saat ini belum disetujui DPR. Kemenangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi pada kasus divestasi NNT dapat menjadi yurisprudensi untuk tidak perlu melalui izin DPR yang bisa berbelit atau bahkan dipolitisasi sehingga berpotensi gagal.

Perlu pula dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah divestasi di beberapa perusahaan tambang sudah menaikkan pendapatan yang maksimal bagi pemerintah. Apapun jalan yang akan dipilih oleh pemerintah, yang tidak dapat ditawar adalah diperlukannya pemerintah yang amanah, pintar, dan konsisten. Syarat terakhir ini lah yang akan menjaga agar manfaat tambang bagi negara dan masyarakat maksimal.

* Penulis adalah Direktur dan Principal Consultant di Kiroyan Partners. Ini adalah pandangan pribadi.



BRIKET BATU BARA MENGHIDUPKAN KEMBALI YANG MATI SURI

VICHARIUS DIAN JIWA
vichariusdianjiwa@lambang.co.id

Program pengembangan hilir batu bara melalui pembuatan briket sudah lama ada namun keberadaannya nyaris tak terdengar. Hampir satu dekade briket seperti mati suri. Kini mulai diperhitungkan kembali untuk membangkitkan industri batu bara nasional.

RIA Suprajeni, Direktur Umum dan Pengembangan Bisnis PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, tak menyerah meski industri batu bara sedang terpuruk. Ia justru bergerak cepat dengan memperluas kegiatan bisnis perusahaannya. Bukan hanya pada operasi pertambangan, namun pada pengembangan sektor hilirnya, seperti memproduksi briket batu bara.

Hilirisasi batu bara belum jadi hal yang populer di Tanah Air meskipun sudah ada payung hukum yang mengatur, yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. Tak sedikit pelaku bisnis yang meragukan konsep ini. Kebanyakan dari mereka berpikir, terlalu repot bila harus mengolah batu bara. Selain menambah ongkos produksi, penjualan batu bara tanpa pengolahan dirasa lebih praktis.





Tria Suprajeni, Direktur umum dan pengembangan bisnis PT Pesona Khatulistiwa Nusantara

Namun menurut Tria pandangan seperti itu tak lagi berlaku pada kondisi seperti sekarang. Saat harga batu bara mencapai level US\$ 100 per ton, perusahaan akan lebih memilih menjual langsung hasil produksi mereka. Namun ketika harga terpuruk hingga US\$ 50 per ton, strategi bisnis harus diubah. Jika hanya mengandalkan bisnis reguler, Pesona Khatulistiwa Nusantara akan sulit untuk bertahan menjual batu bara mereka yang berkalori rendah. Sebab dengan harga rerata US\$ 50 per ton, pembeli cenderung memilih batu bara dengan kalori menengah hingga tinggi.

"Jadi benar kata orang, semakin banyak masalah semakin pintar kita untuk mencari solusinya. Kalau semua sudah disediakan di depan mata, kita sering kali malas berpikir. Sebelumnya mana pernah saya berpikir untuk bangun pabrik briket. Tapi begitu harga jatuh, ya kita harus cari jalan keluarnya," ungkap Tria kepada Majalah TAMBANG.

Pesona Khatulistiwa Nusantara mulai memproduksi briket batu bara pada Februari 2015. Lokasi pabrik dibangun berdekatan dengan tambang batu bara mereka di Desa Kelubir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kapasitas produksi per tahun mencapai 60 ribu ton. Sejak operasional perdana, rata-rata produksi sebulan baru mencapai 3.500 ton briket.

Meskipun masih di bawah target, Tria tak lantas pessimis. Ia yakin pengolahan briket lebih menguntungkan dibandingkan tetap bergantung pada penjualan batu bara konvensional. Bahan baku yang dipakai untuk memproduksi briket diambil dari fine coal atau batu bara halus yang tidak laku dijual. Jumlahnya cukup besar. Dari total produksi tahunan yang mencapai 5 juta ton, batu bara halus ini bisa mencapai 7% atau sekitar 300 ribu ton.

Dari segi teknologi, pengolahan briket juga tidak terlalu rumit. Pesona Khatulistiwa Nusantara menggandeng produsen mesin pengolah briket, CV Sinar Teknika Utama di Bandung, Jawa Barat, milik Parikesit Wirasutisna. Selama ini pensiunan Kementerian ESDM itu memang dikenal sebagai ahli briket batu bara. Mesin buatannya mampu menghasilkan briket dengan kapasitas 10 ton per jam.

Pesona Khatulistiwa Nusantara mematok harga briket senilai Rp 800 per kilogram. Artinya satu ton briket dihargai Rp 800 ribu atau US\$ 67, untuk pasar sektor industri kecil dan menengah. Apabila dijual ke PLTU, harga briket mereka sesuai dengan harga acuan batu bara yang ditetapkan pemerintah. Dengan harga sebesar itu, Tria meyakini sudah mampu menutup ongkos produksi mereka.

Ke depan, Pesona Khatulistiwa Nusantara berencana menaikkan kadar kalori briket mereka menjadi 4.200 kilo kalori/kilogram supaya mampu menutup ongkos produksi briket dan tambang sekaligus. Operasi produksi ini akan tetap dijalankan meskipun suatu saat nanti harga batu bara mengalami kenaikan.

"Kami tetap produksi briket meskipun harga *rebound* karena *fine coal* juga tidak akan dibeli meskipun harga sudah membaik. Malah lebih bagus, karena harga briket kita juga makin mahal," ujarnya.

Payung hukum hilirisasi batu bara baru terbit pada 2010, namun briket sebagai produk olahan di sektor hilir sudah muncul jauh sebelumnya. Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) cukup paham cerita soal briket. Sebelum bergabung dengan APBI, Supriatna adalah seorang birokrat yang bekerja di lembaga penelitian Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) pada 1995-1997.

Di sanalah inisiasi briket dimulai. Bersama timnya, Supriatna sempat bertemu dengan Presiden Soeharto untuk memberikan presentasi pengembangan briket batu bara di Indonesia. Presiden menyetujui dan memberikan mandat kepada PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk membangun pabrik pengolahan dengan suntikan APBN di Lampung, Cirebon, Gresik, dan Cilacap.

Proyek itu masih berlangsung hingga Supriatna pensiun. Namun pada 2008, dukungan pemerintah mulai berkurang. Jusuf Kalla yang saat itu menjadi wakil presiden di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono enggan merusak proyek pengembangan briket. JK lebih memilih penggunaan *liquified petroleum gas* (LPG) sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah yang mulai sulit didapatkan.



Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI)



Pengolahan batu bara kalori rendah menjadi briket batu bara kalori tinggi akan menarik yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah.

Konversi minyak tanah ke LPG terbilang cukup berhasil. Masyarakat di pulau-pulau besar di Indonesia, terutama yang berada di perkotaan mulai meninggalkan minyak tanah dan beralih ke gas. Tapi keberhasilan ini makin mengubur keberadaan briket sebagai energi alternatif lainnya. Briket semakin sulit bersaing meskipun harga jualnya masih lebih rendah dibanding LPG.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika bahkan sempat berucap bahwa tidak mungkin briket dikembangkan untuk bersaing dengan LPG. Baginya adalah sebuah kemunduran apabila masyarakat dipaksa menggunakan briket. Kepraktisan menjadi alasan Kardaya tidak mendukung pengembangan briket di level nasional.

Supriatna menyesalkan pernyataan itu. Tidak bijak baginya bila menganggap briket sudah ketinggalan zaman. Ia masih yakin briket akan menjadi pilihan penting di masa depan ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkan LPG. Entah karena faktor harga ataupun pasokan yang terbatas. Apalagi LPG, terutama tabung ukuran 3 kilogram yang dipasok Pertamina, masih mendapatkan subsidi dari negara. Bukan mustahil apabila suatu saat nanti pemerintah mengurangi atau menghentikan subsidi LPG layaknya minyak tanah.

"Di kampung halaman saya di Majalengka, sampai sekarang masih banyak menggunakan bahan bakar konvensional seperti kayu bakar sebab di sana banyak yang tidak mampu membeli gas LPG meskipun sudah disubsidi. Program yang sudah berjalan lama seharusnya tidak dibunuh," ucap Supriatna.

Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Resources Strategic Studies* (Ciruss), Budi Santoso atau biasa disapa Disan setuju dengan pernyataan Supriatna. Menurutnya, pemerintah mulai harus berpikir untuk mengembangkan

briket batu bara sebagai alternatif LPG. Pertimbangannya, pada 2025 kemampuan produksi LPG di dalam negeri diperkirakan hanya 27,5% dari total permintaan. Defisit kebutuhan itu akan dipenuhi dari impor.

Jumlah itu akan semakin meningkat dari tahun ke ta-hun. Perkiranya pada 2050 produksi LPG nasional mak-simal 20% sehingga jumlah LPG yang harus diimpor akan enam kali lebih besar dibanding 2013. Kebijakan impor bahan bakar energi, menurut Disan sebaiknya mulai dikurangi untuk menghemat devisa dan beralih pada sumber bahan bakar yang terkandung di dalam negeri.

Batu bara bisa jadi andalan, terutama yang berkalori rendah mengingat cadangannya yang masih melimpah. Apalagi Kementerian ESDM mewacanakan untuk melarang ekspor batu bara kalori rendah. Pelarangan ekspor ini akan berdampak pada tutupnya sejumlah perusahaan tambang yang asset batu baranya berkalori rendah bila pemerintah tidak memberikan jalan keluar yang bijak.

Pengolahan batu bara kalori rendah menjadi briket akan menjadi usulan menarik yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah. Dari sisi pemerintah, target penggunaan batu bara di dalam negeri yang mencapai 60% akan mudah tercapai. Saat ini target maksimal yang bisa digapai hanya 25% dari total produksi. Itupun lebih banyak digunakan untuk PLTU, sedangkan sektor industri dan rumah tangga masih minim.

Sementara bagi pelaku usaha, briket batu bara menjadi jalan keluar di tengah kondisi pasar batu yang menu run. Syaratnya, pasar briket batu bara harus terbentuk lebih dulu. Subsidi LPG yang masih disuntikkan terus menerus dari dana APBN menurut Disan akan semakin menyulitkan terbentuknya pasar briket. "Suntikan subsidi ke LPG menyulitkan briket mendapatkan tempat di masya-



rakat meskipun sudah terbukti harganya jauh lebih murah," ujarnya.

M. Jamil, Direktur Niaga PT Bukit Asam (Persero) Tbk membenarkan ucapan Disan. Jamil tak yakin bahwa briket bisa berkembang bila harus bersaing dengan kompetitor lain yang bersubsidi. Inilah yang jadi faktor terbesar mengapa produksi briket milik Bukit Asam tak juga meningkat sejak pertama kali memproduksi briket. Bahkan dalam enam tahun terakhir produksinya pun turun.

Pada 2009, total produksi briket Bukit Asam mencapai 22.867 ton dengan serapan penjualan mencapai 22.182 ton. Sementara pada 2014 produksinya hanya 16.384 ton dengan serapan penjualan mencapai 15.623 ton. Berkurangnya produksi, kata Jamil juga dipengaruhi tutupnya pabrik pengolahan briket di Gresik, Jawa Timur karena perubahan aturan tata ruang pemda yang melarang penyimpanan batu bara di wilayah tersebut.

"Pemda mengubah RTRW mereka sehingga kami tidak bisa lagi mengoperasikan *stockpile* di sana," ujar Jamil.

Ia menuturkan dukungan yang bisa diberikan pemerintah adalah dengan menentukan pola konsumen briket. Industri kecil dan menengah (IKM) yang selama ini masih bergantung pada LPG dapat mulai dialihkan ke penggunaan briket. Konsumen briket Bukit Asam dari kalangan industri didominasi oleh industri peternakan ayam sebesar 84,9%, terbesar kedua berasal dari industri pengolahan makanan sekitar 5,56%. Sementara sebaran pasar terbesar berada di wilayah Jabodetabek sekitar 27,61%.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Ke-

menterian Perindustrian, Euis Saedah tidak menampik peluang penggunaan briket di sektor IKM. Namun menuurnya selain pola distribusi, secara teknis briket terlebih dulu harus melalui sejumlah perbaikan. Euis bercerita pengalamannya ketika berkunjung ke lokasi industri pengolahan tahu dan tempe. Para pengrajin tahu dan tempe seringkali mengeluhkan penggunaan briket yang sulit ketika disulut dan dipadamkan.

"Kami memang sedang berpikir bagaimana IKM memiliki alternatif bahan bakar. Briket bisa jadi pilihan di tengah mahalnya harga gas, minyak tanah, dan listrik. Se-pengetahuan saya di Yogyakarta sudah ada pengusaha tahu yang pakai briket. Tapi mungkin harus ada desain ulang, entah di kompor atau briketnya supaya mengatasi kesulitan para penggunanya," ungkap Euis.

Peningkatan konsumsi energi masyarakat memang pertanda baik bahwa perekonomian nasional mulai tumbuh pesat. Namun bila tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menjadi bumerang dan berujung pada krisis energi. Komitmen pemerintah dalam menerapkan diversifikasi energi pun mulai diuji. Jangan sampai masyarakat terlalu bergantung pada minyak dan gas dan melupakan sumber energi lain.

Briket jadi salah satu pilihannya. Teknologi dan kemampuan finansial tidak jadi halangan. Hanya pola distribusi yang belum terbentuk. Jika masalah ini dapat diatasi, selain mampu membangkitkan industri batu bara nasional, ketahanan energi di dalam negeri pun akan semakin menguat.

LIQUIFIKASI BATU BARA BELUM EKONOMIS

Liquifikasi batu bara memang belum masif dilakukan namun proyek pengembangannya sudah mulai muncul satu per satu. Selain upgrading batu bara dan pengolahan briket, cabang lain yang dikembangkan ialah likuifikasi atau pencairan batu bara. Pada 2013, sebuah perusahaan Jepang, PT Japan Gas Corporation Coal Fuel (JGC) membangun proyek percontohan di Desa Kutemekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.

Pabrik ini mampu memproduksi 10.000 ton per tahun. Batu bara cair mereka diproduksi dengan menggunakan teknologi pengolahan batu bara menjadi bubur menggunakan pengolahan air panas. Setelah itu batu bara yang telah *di-upgrade* diubah jadi jenis bahan bakar cair. JGC menjual batu bara cair mereka 30%-50% di bawah harga pasar minyak berat. Pembeli pertama adalah PT PLN.

General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Djoko Abumana menandatangi perjanjian jual beli listrik dengan PT JGC Coal Fuel. PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik dari demo PLTU LCS (*Liquid Coal Slurry*) PT JGC dengan kapasitas daya terpasang 1 x 700 kW yang berlokasi di Karawang. Produksi listriknya akan tersambung melalui jaringan tegangan menengah milik PLN.

Djoko menyatakan bahwa demo model *thermal po-*

wer plant yang menggunakan batubara cair ini sebagai percontohan PTMPD (pembangkit thermal mengganti pembangkit diesel). Nantinya pembangkit model ini akan dimanfaatkan bagi kelistrikan di kepulauan nusantara.

Meskipun terbilang sukses proyek likuifikasi seperti ini tetap mendapatkan kritikan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala mengatakan, pencairan batu bara tidak dibutuhkan dan tidak mungkin untuk diterapkan. Menurutnya negara maju konsumen batu bara tidak ada satu pun yang mengembangkan proyek pencairan. Hanya Afrika Selatan yang mengembangkan hal tersebut lewat perusahaan mereka, Sasol.

"Untuk apa harus dicairkan segala? Ujung-ujungnya kan sama saja dibakar. Amerika, Cina, Jepang semuanya bakar batu bara. Apa mereka bodoh? Jelas tidak. Di sini saja ribut harus dibuat cair atau apa lah," ungkap Supriatna.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono mengatakan peningkatan nilai tambah tersebut baru sebatas imbauan karena hingga saat ini, belum ada proyek peningkatan nilai tambah yang terbukti berhasil. "Yang secara bisnis terbukti belum ada, seperti gassifikasi dan liquifikasi. Paling sekarang pencampuran batu bara," ujarnya.

BISNIS BRIKET DI BAWAH ANCAMAN GAS BERSUBSIDI

NOVA FARIDA
nova.farida@tambang.co.id

ADA yang berbeda dengan kegiatan para pekerja di kawasan tambang batu bara milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Di salah satu sudut area operasi pertambangan itu, derum mesin terdengar nyaring. Beberapa orang tampak sibuk menurunkan tumpukan singkong yang dibawa mobil truk ke dalam tempat penampung. Si sisi lain, ada juga pekerja yang sibuk meladeni ruangan mesin penggiling yang seolah meneraki kata latar dan meminta diisi. Mesin penggiling itu ukurannya cukup besar, dan memiliki wadah yang panjang untuk membawa singkong-singkong itu masuk ke mulut untuk "dikunyah".

Para pekerja memasukan singkong-singkong itu ke dalam mesin pencacahan secara bertahap. Di tepian penggilingan, tepung singkong dibawanya menuju persimpangan yang mempertemukannya dengan batu bara yang ber tekstur halus. Seperti membuat kue, keduanya diaduk hingga tercampur rata.

Selang beberapa lama, berjarak beberapa meter dari lokasi penggilingan, gumpalan-gumpalan hitam sebesar kepala tangan dewasa itu muluncur dari atas selongsong yang menyambung dengan mesin penggiling tadi. Briket berbentuk silinder itu diangkat, lalu dikemas untuk dipasarkan.

Kurang lebih selama sembilan bulan, pabrik briket batu bara milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara itu beroperasi. Perusahaan yang memiliki konensi tambang di Desa Kelubir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur itu menggunakan singkong gajah sebagai bahan pengikat batu bara yang akan diolah menjadi briket.

"Kami rela mengeluarkan ongkos produksi sekitar US\$8 untuk satu ton briket. Yang paling mahal memang untuk tepung dan listrik," ujar Direktur Umum dan Pengembangan Bisnis, Pesona Khatulistiwa Nusantara, Tria Suprajeni.

Meski biaya itu dinilai cukup tinggi, tetapi Tria optimistis ke depan bisnis yang sudah ia rancang bakal berkembang. Briket batu bara dijadikan terobosan bisnis perusahaannya untuk mengurangi jumlah *fine coal* atau batu bara halus yang sejauh ini tidak laku dijual.





Kegiatan para pekerja di kawasan tambang batu bara milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, tampak tumukan singkong yang siap dilebur.

Kata Tria, dari total produksi yang mencapai 5 juta ton per tahun, jumlah batu bara halus itu bisa mencapai 7% atau sekitar 300 ribu ton. "Jumlahnya cukup besar, jika dibiarkan perusahaan malah banyak rugi karena tidak laku dan ongkos produksi yang dikeluarkan sama saja," ungkapnya.

Tumpukan batu bara lembut yang tak laku itu, diolah agar bisa dimanfaatkan. Pabrik itu mulai beroperasi Februari lalu, dengan kapasitas produksi hingga 60 ribu ton per tahun. Sejauh ini produksinya masih kecil, baru menghasilkan briket batu bara sekitar 3.500 ton per bulan. Memasarkan briket, kata Tria, gampang-gampang susah. Tapi ia yakin, hitungannya tak akan meleset.

Ia bercerita, awalnya *fire coal* itu dijadikan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik perusahaannya. Karena jumlahnya cukup banyak, tercetuslah ide untuk mengolahnya menjadi briket. Singkong dipilih sebagai bahan campuran untuk menambah kualitas briket. "Karena briketnya juga akan dimanfaatkan untuk keperluan PLTU, jadi kami butuh yang unsur pengikat yang memiliki unsur karbon yang tinggi. Dipilihlah singkong gajah itu," detailnya.

Hasil hitungannya, untuk mendapatkan kapasitas 60 ribu ton briket, setiap bulan dibutuhkan singkong sebanyak 150 ton. Untuk menjamin pasokan singkong, Pesona Khatulistiwa Nusantara bekerjasama dengan kelompok petani di sekitar wilayah tambang. Ia mengklaim, sejauh ini baru perusahaannya yang berhasil mencampur singkong untuk briket. "Untuk menghasilkan 100% briket super, komposisinya 3% tepung, sisanya *fire coal*," bocorannya.

Sejauh ini briket cetakan perusahaannya sudah menyebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tria mengaku, saat ini sedang menjajaki penjualan briket di Jawa Tengah, Jawa Timur, juga Jawa Barat. Saat ini yang menjadi PR besar yaitu ongkos transportasi yang mahal. "Saat ini kami konsentrasi di Kalimantan dulu. Di sana banyak industri tahu, tempe, batu bata, hingga genteng yang beralih menggunakan briket," jelasnya.

Ia menuturkan, di Kalimantan gas LPG masih sulit ditemukan sehingga industri di sana dengan mudah beralih menggunakan briket. Untuk merebut pasar, Pesona Khatulistiwa rajin menjajakan briket melalui pameran, membuat tungku khusus, hingga mendemokan langsung cara

kerja briket. "Untuk menghasilkan 20 kilogram tahu, mereka pakai tiga tabung LPG. Kalau pakai briket harganya bisa setengahnya dari LPG. Lebih murah," katanya.

Saat ini penjualan briket untuk industri kecil dan menengah masih kecil. Tetapi ke depan, jika pasar itu sudah terbuka, Pesona Khatulistiwa Nusantara berani menaikkan kapasitas produksi sampai 200 hingga 300 ribu ton per tahun. "Kami sedang menyiapkan mesinnya, 2017 harus sudah siap," sambungnya.

Briket batu bara buatan Pesona Khatulistiwa Nusantara juga ada yang melalui proses *upgrading*. Briketnya dikeringkan dengan panas yang dihasilkan dari PLTU. Kualitas kalori briket bisa naik menjadi 3.700-3.800 kilo kalori per kilogram selama dua minggu. "PLTU kan menghasilkan steam gas panas yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bikin pipa untuk menyalurkan energi itu. Jadi tidak ada yang terbuang," katanya.

Dengan proses itu, perusahaannya akan memiliki varian produk yang cukup beragam, yaitu batu bara, briket, batu bara yang ditingkatkan kualitasnya, dan PLTU. Akhir tahun ini, PLTU tahap I ditargetkan tuntas. Lalu sistem *upgrading* baru bisa berjalan awal tahun depan. "Target saya ke depan hasilnya bisa dinaikkan lagi sampai 4.200 kilo kalori per kilogram," katanya dengan optimistik.

Pesona Khatulistiwa Nusantara mematok harga briket senilai Rp 800 per kilogram. Artinya satu ton briket dihargai Rp 800 ribu atau US\$ 67. Namun harga itu hanya berlaku untuk pasar dari sektor industri kecil dan menengah. Apabila dijual ke PLTU, harga briket mereka sesuai dengan harga acuan batu bara yang ditetapkan pemerintah. Dengan harga sebesar itu, Tria mengaku sudah mampu menutup ongkos produksi.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah mengakui sejauh ini pemanfaatan briket banyak digunakan untuk keperluan industri makanan dan minuman.

Selain itu, ada beberapa industri lainnya seperti pengolahan tembakau, tekstil, bahan kimia, farmasi, karet, dan juga industri barang galian bukan logam. "Banyak yang bisa disasar," ungkapnya. Setiap tahun, jumlah industri kecil dan menengah tumbuh hingga 5,3%.

Melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2014 jumlah industri mikro mencapai 3,2 juta, sementara untuk industri kecil ada 284 ribu, dan industri menengah juga besar hingga 23 ribu.

PLTU di kawasan Technopark Apung, Tanjung Selor Kalimantan Utara.



Namun peluang besar itu rupanya tak bisa membuat PT Bukit Asam (Persero) dengan mudah merebut pasar. Selama 20 tahun beroperasi, Bukit Asam masih kesulitan memasarkan produk briket batu baranya itu. Tak mau ambil risiko, sejauh ini jumlah produksi masih disesuaikan dengan permintaan.

Direktur Niaga Bukit Asam, Muhammad Jamil mengaku perusahaannya masih kesulitan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih menggunakan briket sebagai energi alternatif. Ia juga pesimistik terhadap pasar briket. Bisnis briket bisa berkembang jika pemerintah belum menyetop gas bersubsidi.

Selama bisnis briket beroperasi, per tahun jumlah kerugian bisa menyentuh Rp 1 miliar. Selama 20 tahun beroperasi, total kerugian mencapai sekitar Rp 20 miliar. "Sebenarnya lebih, tetapi bagaimana? Memang mentok di pemasaran," ucapnya miris.

Ia bilang, perusahaan pelat merah itu baru bisa untung ketika kapasitas produksi briket sudah melampaui 20 ribu ton per tahun. Namun, angka itu sulit digapai lantaran masih banyak yang harus dioptimalkan.

Bisnis briket batu bara sudah digeluti Bukit Asam sejak 1995. Perjalannya mengalami pasang surut. Bahkan enam tahun belakangan ini nilainya terus merosot. Pada 2009, total produksi mencapai 22.867 ton dengan jumlah penyerapan mencapai 22.182 ton. Sementara sepanjang 2014, produksinya hanya 16.384 ton dengan total penjualan sebanyak 15.623 ton.

"Tapi di 2013, angka sempat naik. Penyerapan cukup tinggi bahkan melebihi jumlah produksi. Namun sayangnya tidak bertahan," ceritanya. Kala itu, banyak industri kecil menengah yang mulai beralih mencoba briket batu bara untuk keperluan produksi. Jumlah permintaan sempat menyentuh angka 19.373 ton. Sayangnya, kesempatan itu tidak berlanjut di tahun berikutnya.

mdrbug97.blogspot.com



Peluang besar tak bisa membuat PT Bukit Asam (Persero) dengan mudah merebut pasar. Selama 20 tahun beroperasi, Bukit Asam masih kesulitan memasarkan produk briket batu baranya.

Jamil menuturkan, penurunan produksi itu juga ditandai karena ditutupnya salah satu pabrik briket milik Bukit Asam di Gresik, Jawa Timur. Pabrik itu ditutup lantaran ada perubahan aturan tata ruang dari pemerintah daerah yang melarang penyimpanan batu bara di wilayah tersebut.

Saat membangun pabrik di Gresik pada 1997, Bukit Asam optimistis bisa merajai pasar briket. Tak tanggung-tanggung, dengan total investasi mencapai Rp200 miliar, kapasitas produksi disiapkan hingga 120 ribu ton per tahun. Walaupun realisasi produksi baru di angka 5 ribu ton per tahun.

TAUFIEQURROHMAN/TAMBANG





mdpbug97.blogspot.com

Ia menayangkan penutupan pabrik di Gresik. Tetapi bagi perusahaan, penutupan itu tak menimbulkan rugi. Hasil penjualan briket Gresik tidak bisa menutupi biaya produksi. "Kami menilai, pabrik itu sudah tidak ekonomis," ungkapnya.

Potensi bisnis briket di Jawa Timur cukup besar. Banyaknya pesaing membuat Bukit Asam sulit merebut pasar. "Di sana banyak batu bara yang dimanfaatkan masyarakat maupun industri untuk diolah menjadi briket, sehingga kami cukup kesulitan memasarkan produk kami," tuturnya memberi alasan.

Meski kalah merebut pasar briket di Jawa Timur, JAMIL tetap optimistis karena dua pabrik lainnya yang berada di Sumatera Selatan yakni di Tanjung Enim dan Lampung masih mengepul. Dari keduanya, kapasitas produksi mencapai 16 ribu ton per tahun. "Sebenarnya, kedua pabrik itu baru menggunakan separuh kapasitasnya. Saat ini produksi briket di Tanjung Enim 6.000 ton, dan Lampung 10 ribu ton," rincinya.

Ia menuturkan, sejauh ini konsumsi briket batu bara produksi Bukit Asam masih di dominasi oleh industri peternakan ayam yang mencapai 84,93%. Sisanya untuk industri pengolahan makanan, jamu, genting, cat, dan industri lainnya. Sementara, untuk sebaran pasar terbesar dipegang Jabodetabek sebanyak 27,61%. Sisanya tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Lampung.

Saat membangun pabrik di Gresik pada 1997, Bukit Asam optimistis bisa merajai pasar briket. Tak tanggung-tanggung, dengan total investasi mencapai Rp200 miliar, kapasitas produksi disiapkan hingga 120 ribu ton per tahun. Walaupun realisasi produksi baru di angka 5 ribu ton per tahun. Foto ilustrasi: Bahan bakar briket di pabrik pupuk (atas).

JAMIL mengatakan, ada dua jenis briket yang diproduksi Bukit Asam dengan harga jual yang terjangkau. Untuk briket yang non karbonisasi harga hanya Rp1.500 per kilogram, dan briket karbonisasi harganya Rp2.150 per kilogram.

Bukit Asam telah mencoba membuka peluang pasar luar negeri dengan mengekspor briket ke Filipina, namun kalah bersaing dengan briket asal Cina. "Dua tahun lalu kami sudah mencoba ekspor tapi belum ada perkembangan. Saat ini kami juga sedang mencoba ekspor ke Malaysia," paparnya.

Euis maklum betul dengan masalah yang kerap melanda produsen briket. Ia menilai, pola distribusi memang masih menjadi kendala nomor satu. Selain itu, menurut pengalamannya mengunjungi beberapa industri pengolahan makanan, banyak yang mengeluhkan penggunaan briket yang sulit ketika disulut dan dipadamkan. "Pematiknya masih sulit. Para pemakai merasa keberatan pasalnya jika menggunakan briket harus menggunakan tungku khusus. Mereka tidak mau keluar biaya lagi," katanya. ■



Supriatna Suhala
Direktur Eksekutif Asosiasi
Perusahaan Batubara Indonesia

JANGAN BUNUH PENGEMBANGAN BRIKET BATU BARA

Pengembangan briket terhenti sejak Jusuf Kalla menjadi wakil presiden periode pertama. Pemerintah lebih suka menggalakkan pemakaian gas. Briket bisa mengurangi pemakaian LPG

Briket batu bara bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Jauh sebelum muncul ide hilirisasi batu bara, BUMN tambang, PT Bukit Asam sudah memulainya di tahun 1990-an. Kala itu Bukit Asam diperintahkan Presiden Soeharto untuk membangun pabrik dan memproduksi briket batu bara di berbagai daerah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Suhala, pada era itu menjabat sebagai Kepala Teknologi Mineral dan Batu Bara, lembaga penelitian mineral dan batu bara di bawah Kementerian ESDM menceritakan pengalamannya mendorong pengembangan briket bagi energi alternatif.

Menurut Supriatna, konsep itu bisa kembali dijalankan pada era sekarang. Apalagi di tengah kondisi industri batu bara nasional yang tengah terpuruk. Hilirisasi batu ba-

ra dengan briket dapat jadi pilihan strategis. Berbeda dengan likuifikasi dan gasifikasi, briket tidak membutuhkan teknologi yang rumit dan berbiaya murah. Berikut petikan wawancara Majalah TAMBANG dengan Supriatna Suhala.

Mengapa pengembangan briket tidak berjalan lancar?

Inisiasi briket dari batu bara itu sudah dimulai sejak saya masih jadi kepala Tekmira di Bandung, pada 1995-1997. Konsep itu kami kembangkan sejak awal 1990an. Nah kami sudah sempat melakukan presentasi di depan Presiden. Akhirnya disuruhlah PT Bukit Asam untuk mengembangkan briket dengan membangun pabrik melalui suntikan dana APBN. Sejak saat itu dibangunlah pabrik di beberapa tempat seperti Lampung, Cirebon, Gresik, dan Cilacap. Jadi di era orde baru, hal itu sudah berjalan. Masa-lahnya waktu itu hanya terlalu banyak korupsinya. Mereka seringkali mengembungkan biaya, lebih besar daripada modal operasional.

Sayangnya proyek itu selesai pada saat Jusuf Kalla menjabat sebagai wapres. Pada 2008, JK meminta untuk melupakan proyek pengembangan briket batu bara. Dia lebih memilih melaksanakan program konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Padahal sebetulnya jangan seperti itu.

Jika memang pernah ada dan akhirnya gagal, apakah saat ini proyek briket cukup realistik untuk dijalankan kembali?



Saya yakin ke depan briket punya pasarnya sendiri. Yang penting sekarang jangan menutup kesempatan briket untuk bisa berkembang. Jangan ada orang pemerintah bilang, untuk apa pakai briket, sudah ketinggalan zaman. Ucapan seperti itu tidak bijak.

Sampai sekarang saja masih ada yang memproduksi arang, dan diterima masyarakat kan? Nanti biarlah pemakai sendiri yang memutuskan mereka mau pakai briket, gas, atau listrik. Kan tergantung dari kantongnya sendiri-sendiri. Sampai sekarang saja masih ada orang yang mau masak pakai kayu bakar.

Di kampung halaman saya di Majalengka, Jawa Barat, sampai sekarang masih banyak yang menggunakan bahan bakar konvensional seperti kayu bakar. Di sana banyak yang tidak mampu membeli gas LPG, meskipun sudah disubsidi. Atau golongan masyarakat yang tidak mendapatkan pasokan gas LPG.

Saya pikir di masa depan golongan masyarakat yang menggunakan gas LPG akan bertambah banyak. Nanti kaususnya seperti subsidi minyak tanah. Pemerintah lama-kelamaan akan kelabakan memberikan subsidi LPG ke masyarakat. Di situlah briket bisa jadi celah. Program yang sudah berjalan lama seharusnya tidak dibunuh.

Bisakah briket menggeser penggunaan LPG, seperti halnya ketika gas menggeser posisi minyak tanah?

Briket tidak akan bisa menggantikan pemanfaatan LPG, tapi mengurangi konsumsi LPG. Saya yakin briket akan punya pangsa pasarnya sendiri. Mungkin distribusinya bukan di kota-kota besar seperti Jabodetabek tapi di daerah yang sulit mendapatkan pasokan gas dari pemerintah.

Patut diingat bahwa pada waktu dulu minyak tanah dihilangkan, migrasi konsumsi energi sebetulnya tidak semua ke gas. Masyarakat golongan bawah kembali lagi memakai kayu karena tidak mampu beli gas. Nah inilah pentingnya kampanye penggunaan briket.

Tapi Anda pernah bilang, hilirisasi batu bara sulit dilakukan dan mahal ongkosnya?

Jika hilirisasi yang dimaksud adalah likuifikasi atau pencairan batu bara memang sulit dan mahal ongkosnya. Saya pernah kedatangan delegasi dari Amerika Serikat dan mereka mengaku tidak punya program likuifikasi. Batu bara yang mereka punya langsung dibakar untuk jadi listrik di PLTU. Hal itu juga terjadi di Jerman dan Jepang. Mereka bahkan lebih memprioritaskan pengembangan sel bahan bakar (fuel cell). Mereka membeli listrik dengan harga murah untuk mengubah air (hidrogen) sebagai bahan bakar di kendaraan bermotor.

APBI juga pernah mengundang perusahaan yang berhasil melakukan likuifikasi, Sasol. Hal yang mengagetkan adalah kebutuhan investasi di proyek likuifikasi batu bara mencapai US\$ 6,5 miliar. Wah itu besar sekali. Tidak ada perusahaan batu bara nasional yang bisa melakukan hal ini. Kalau mau nilai tambah batu bara, tidak perlulah dibuat cair, bikin briket saja.

Banyak perusahaan tambang batu bara yang dilarang ekspor tapi di dalam negerinya sendiri juga dicuekin. Banyak batu bara kalori rendah di Indonesia yang dilarang untuk dieksport. Briket itu bisa diambil dari fine coal –batu bara halus. Misalnya Adaro, mereka produksi 50 juta ton,

5% nya jadi fine coal. Kan bisa digunakan untuk briket.

Bila melihat potensi batu bara Indonesia seberapa besar potensi pengembangan dan pemanfaatan untuk briket?

Jumlah batu bara kalori rendah sebagai bahan dasar briket sangatlah melimpah. Batu bara ini akan mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi setelah menjadi briket. Bila mampu bersaing secara kualitas dan harga, maka briket batu bara Indonesia di masa yang akan datang bakal mempunyai peluang ekspor yang tinggi untuk berbagai keperluan industri menengah dan industri rumahan, serta keperluan rumah tangga. Beberapa negara di Asia juga bisa menjadi peluang ekspor briket batu bara dari Indonesia. Sudah terbukti bahwa penggunaan briket akan lebih hemat, murah, dan aman dibanding minyak tanah atau gas alam.

Lalu apa lagi yang dibutuhkan untuk menuju ke arah itu?

Jelas sosialisasi dengan dukungan pemerintah daerah di seluruh Indonesia akan sangat membantu dalam penyebaran pemahaman dalam penggunaan briket batu bara. Bila pengguna briket di Indonesia semakin meningkat maka permintaan juga akan meningkat secara otomatis sehingga akan semakin menarik banyak pengusaha batu bara untuk berbisnis briket.

Briket dengan kualitas lebih baik dengan harga yang terjangkau akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Bila didukung dengan teknologi pengolahan briket batu bara yang lebih baik bukan tidak mungkin akan dihasilkan briket batu bara dengan polutan yang lebih rendah dan mampu bersaing dengan gas LPG sehingga akan menarik minat konsumen di kota-kota besar. □

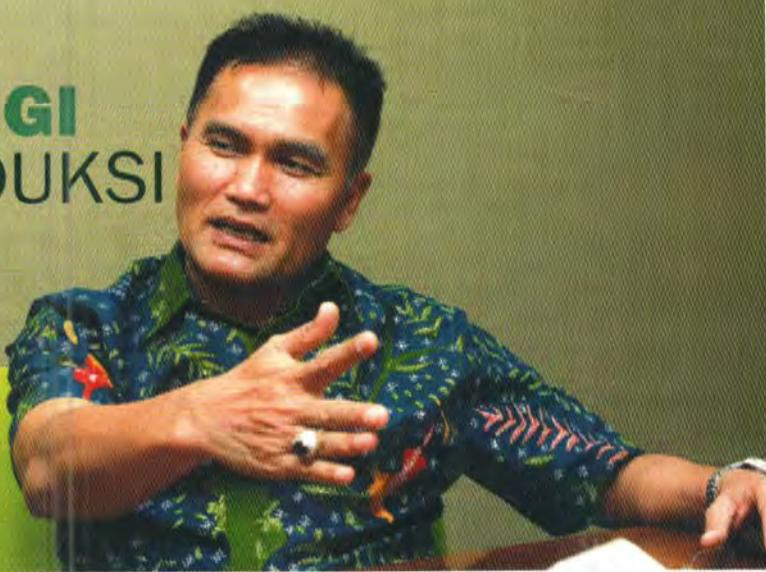


Briket biasanya diambil dari fine coal atau batu bara halus

Tria Suprajeni

Direktur Umum dan Pengembangan Bisnis
PT Pesona Khatulistiwa Nusantara

AKAN LEBIH RUGI JIKA TIDAK PRODUKSI BRIKET



*Memanfaatkan batu bara lembut
yang selama ini sia-sia.*

*Menargetkan produksi hingga
200-300 ribu ton setahun.*

*Pasarnya masih di Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara.
Pasar di Jawa sudah diincar.*

Ketika harga batu bara anjlok, penambang batu bara kalori rendah akan semakin tersungkur. Bukan hanya nilainya yang terlalu murah, produksi mereka terancam tak laku karena pembeli akan memilih kualitas yang lebih bagus dengan harga yang masih bisa dijangkau. Tria Suprajeni, Direktur Umum dan Pengembangan Bisnis PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, perusahaan pemegang lisensi PKP2B menjelaskan bagaimana pihaknya kini memberikan diri masuk ke sektor hilir batu bara dan PLTU. Briket dan peningkatan kualitas batu bara jadi pilihannya.

Meski pasar belum terbuka lebar namun optimisme untuk mengembangkan bisnis ini jadi lebih besar seakan tak pernah pudar. Setidaknya dengan cara itu, operasional perusahaan masih bisa berjalan hingga kini. Kepada Majalah TAMBANG, Tria, begitu ia disapa bercerita banyak mengenai perkembangan produksi briket yang dimulai sejak Februari tahun ini.

Bagaimana perkembangan produksi briket batu bara Pesona Khatulistiwa Nusantara sampai sejauh ini?

Sejak peresmiannya pada Februari lalu, sampai sekarang sudah berproduksi tapi memang belum besar. Hanya sekitar 3.500 ton per bulannya. Rencana kami dalam setahun produksinya 60 ribu ton. Ke depan kami berusaha

mencapai 200-300 ribu ton per tahun. Angka itu sesuai jumlah *fine coal* -batu bara lembut- yang diproduksi Pesona Khatulistiwa.

Kalau produksi batu bara kami per tahun 5 juta ton berarti ada 7% *fine coal* yang terbuang sia-sia karena pelanggan kami tidak mau menerimanya. Maka kami melihat apa yang bisa kami manfaatkan. Kalau tidak ya kami sama saja rugi, karena biaya produksinya masuk dalam operasional batu bara normal.

Apakah semua batu bara lembut itu diolah jadi briket?

Sebelumnya kami berpikir untuk menggunakan *fine coal* itu langsung sebagai bahan bakar PLTU yang kami bangun sebesar 2x 7,5 MW di dekat tambang kami. Ternyata sisanya masih banyak. Kami pikir kenapa tidak mengembangkan briket meskipun saat itu kami belum tahu teknologi apa yang akan dipakai untuk memproduksi briket berkualitas baik. Untuk memproduksi briket, di samping butuh tekanan, juga perlu pengikat. Di beberapa tempat dipakai tanah liat. Karena briket kami untuk PLTU jadi butuh unsur pengikat yang juga tinggi unsur karbonnya. Maka dipilihlah singkong.

Bagaimana proses pengolahan briket dan singkong seperti itu?

Kami menggunakan singkong mentah lalu mengolahnya menjadi tepung. Komposisinya 3% tepung, 97% *fine coal* untuk menghasilkan 100% briket. Setelah jadi briket, kami panaskan lagi sekitar 1-2 minggu sehingga kualitas kalorinya naik menjadi 3.700-3.800 kilo kalori per kilogram. Kalau target saya ke depan hasilnya bisa dinaikkan lagi sampai 4.200 kilo kalori per kilogram. Ya ini seperti semi *upgrading*, kita mendapatkan sesuatu dengan cara pengeringan pada suhu tertentu.

Berapa kebutuhan tepung singkong dalam tiap bulannya?

Untuk kapasitas produksi 60 ribu ton briket, setiap



bulan kami harus menyediakan 150 ton singkong. Untuk menjamin pasokan singkong tetap ada, tidak mungkin mencari dari masyarakat biasa. Jadi kami kerjasama dengan kelompok masyarakat tertentu. Mereka dibantu bibit dan bertugas tanam singkong. Setelah itu dijual ke kami, sehingga punya manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan mereka. Paling kami atur supaya penanamannya bisa bergilir. Kalau serentak semua kan juga tidak baik. Singkong tidak bisa disimpan terlalu lama. Kalau membusuk kekuatan perekatnya menurun.

Penanaman singkong kami kombinasikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kami bilang ke mereka daripada lahan kosong menganggur, lebih baik ditanami singkong. Setelah panen bisa dijual ke kami. Singkong itu ditanam di lahan seluas 500 hektare, kami beli dari mereka sekitar Rp 500 per kilogram (mentah). Kami mengambil lewat koperasi desa.

Dengan proses seperti ini kami punya variasi produk yakni batu bara, briket, *upgrading*, dan PLTU. Nah itu yang kami lakukan sekarang. Cuma ya kalau briket kan sudah mulai sejak Februari 2015, PLTU tahap I pada Desember 2015 tapi itu untuk kepentingan sendiri bukan IPP. Hanya 2 MW yang kami serahkan ke daerah lewat PLN. Sementara batu bara upgrading paling mulai Januari 2016. Seandainya proyek PLTU berhasil, kami juga akan coba bangun yang lebih besar, 2x100 MW. Ke depan kami memang punya rencana bikin kawasan industri sendiri. Kami harap bisa undang *smelter* untuk gabung ke tempat kami.

Ke mana briket ini dipasarkan?

Kalau briket ada dua sasaran. Pertama untuk UKM seperti industri tahu, tempe, batu bata, hingga genteng. Itu semua lokasinya masih di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tapi kami juga sudah mulai coba beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Contohnya untuk industri batu bata yang selama ini pakai gas, kami sudah buktikan bahwa dengan briket ongkos produksinya lebih murah.

Apalagi persediaan LPG sekarang susah. Pakai briket juga lebih merata apinya, sehingga batu batanya lebih bagus. Kedua untuk PLTU. Briket Pesona Khatulistiwa cocok untuk pembakaran di PLTU karena pakai singkong yang unsur karbonnya banyak, jadi tidak mengganggu kinerja boiler.

Kami juga mulai memasarkan ke Subang. Namun masalah utama itu pada transport. Biaya angkutnya bisa sampai Rp 600-700 per kilogram. Kan mahal. Tapi kalau rantai itu bisa kita putus jadi lebih murah. Maka kami main di Kaltim atau Kaltara saja. Selama ini transport lebih tinggi dibanding biaya produksinya.

Perbandingannya berapa untuk yang disalurkan ke UKM dan PLTU?

Sekarang masih lebih banyak untuk PLTU karena untuk UKM kami lagi membangun pasar. Ini semacam energi alternatif buat masyarakat, loh sekarang mereka juga pakai kayu bakar yang tetap harus membeli juga. Sementara untuk industri batu bata atau tahu mereka juga pakai briket tapi dari sekam. Bahan baku pembuatan briket jenis itu juga sulit.

Kenapa akhirnya pilih briket walaupun tahu pasarnya kecil?

Seperti yang saya bilang tadi, kami punya *fine coal*, dan itu harus dimanfaatkan. Sebagian untuk PLTU, sisanya untuk briket. Saya rasa cukup nilai keekonomiannya. Jika kami bisa naikkan kualitasnya jadi 4.200 kilo kalori/kilogram sudah bisa menutup ongkos produksinya. Bayangkan saja kalau *fine coal* itu tidak kamijadikan briket, ia tidak akan terjual padahal perusahaan sudah mengeluarkan ongkos saat memproduksinya.

Kalau kami jadikan briket memang ada biaya tambahan seperti singkong, mesin, dan listrik, tapi biaya itu masih bisa ketutup dengan harga jualnya sekarang. Memang jika ditambahkan dengan ongkos produksi menambah belum, makanya kami ingin naikkan kalorinya. Setelah itu baru ongkos produksi di tambang dan briket akan ketutup.

Ada tidak hitungan berapa jumlah minimal briket yang harus diproduksi supaya ada margin?

Sebenarnya yang jadi masalah di briket, kalau kita jual ke PLTU harganya sama dengan harga batu bara biasa (HBA). Sesuai dengan kalori, tapi kalau dijual ke UKM harganya bisa lebih bagus. Taruhlah bila konsumen ambil di pabrik langsung, mereka bisa beli seharga Rp 800.000 per ton, itu kan sama dengan US\$ 65. Mana ada kalori 3.200 dihargai sebesar itu? Kalau menurut harga batu bara acuan, normalnya sekitar US\$ 17 per ton. Jadi nilai tambahnya di situ, hanya sekarang pasar ini kan belum terbuka.

Di pulau Jawa bahkan sekarang harga jualnya Rp 1.500 per kilogram berarti sektor US\$ 100 per ton. Itu seperti harga batu bara yang 7.000 kilo kalori/kilogram. Kalau mau cari untung ya jual ke UKM. Kalau mau masuk ke PLTU ya naikkan kalorinya jadi 4.200 kilo kalori/kilogram supaya ongkos produksinya ketutup. Tugas kita sekarang bagaimana membuat pasar bergerak.

Memang berapa ongkos produksinya?

Antara US\$ 7-8 per ton. Kebutuhan paling mahal itu untuk tepung dan listrik. Butuhnya sekitar 330 Kv. Nah kami memiliki keuntungan dengan keberadaan PLTU karena menghasilkan uap gas panas yang bisa dimanfaatkan untuk briket dan pengeringan. Tinggal bikin pipa untuk menyalurkan energi itu. Tidak ada yang terbuang, sehingga menekan ongkos produksinya.

Berapa kontribusi briket buat pemasukan perusahaan?

Sekarang masih kecil lah. Tahun lalu kami produksi 4 juta ton batu bara, nilai 60 ribu ton dibanding angka itu kan masih jauh. Tapi initinya kalau kami bisa jual 300 ribu ton *fine coal* kan sama saja 10 persen dari total produksi. Coba kalau kejual ke UKM semua. Harganya bisa lima kali lipat.

Sepertinya Pesona Khatulistiwa lebih optimistis soal briket ini dibanding kompetitor lain?

Ya pasti mereka rugi kalau pakai sistem bisnis seperti itu. Sekarang kami pun sebetulnya masih di bawah tapi saya tidak mau lihat itu. Kalau saya tidak buat briket, ongkos menambah yang keluar sudah besar, tapi ada batu bara lembut yang tidak bisa saya jual. Itu lebih rugi dong. ■



MERAWAT ELANG MENJAGA EKOSISTEM

Pusat konservasi elang didirikan di kawasan Kamojang, Jawa Barat. Bukan hanya untuk elang jawa. Kawasan Garut dan sekitarnya menjadi lokasi favorit elang dari bumi belahan utara bermigrasi. Mereka menghangatkan badan menunggu musim dingin berlalu.

ALAMSYAH PUA SABA
alam@majalahtambang.com

wa, demikian nama elang brontok (*Nisaetus cirrhatus*) yang baru tiga hari diserahkan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat, ke Pusat Konservasi Elang Kamojang, Jawa Barat. Karena belum ada ruangan khusus untuk menampungnya, si Iwa diletakkan di sebuah ruangan bersebelahan dengan pemeriksaan kesehatan. Hari itu, pada akhir Oktober 2015, adalah waktu untuk pemeriksaan rutin elang yang sebelumnya dipelihara warga di Cirebon tersebut.

Elang brontok punya ciri warna bercak pada bagian yang terang, dan suka berubah warna. Dua relawan memegangnya. Tubuhnya ditutupi handuk, seperti bayi yang dipasang bedong. Kakinya dipegang erat agar ia tidak berontak saat kesehatannya diperiksa. Dian, dokter hewan, yang bertugas di Pusat Konservasi Elang, memeriksa napas Iwa.

Ketika handuk yang membungkus Iwa dilonggar, tubuhnya longgar, ia berontak. Sayapnya dikepalkan, membuat handuk yang menutupi tubuhnya terbuka. Kakinya dipegang erat, agar hewan agresif ini tetap dalam kendali, dan pemeriksaan kesehatan dapat tetap dilakukan. Handuk dieratkan untuk membungkus tubuhnya, terutama bagian sayap. Sayap, otot, dan bagian tubuh yang lain, diperiksa. Sese kali ciutan khasnya terdengar.

Ups, lagi-lagi, handuk yang menutupi tubuhnya longgar, ia berontak, kakinya tetap dipegang kuat. Jari relawan mengelurakan darah, tertusuk kuku tajam si Iwa. "Ia masih sangat agresif, dan stres juga," Dian menjelaskan.

Panjang sayap kedua sisinya diukur, demikian juga dengan lebar badan. Badannya ditimbang. Berat badannya 1,84 kilogram, lebar badan 10 centimeter, panjang badan 34 sentimeter, dan lebar kedua sayap 126 sentimeter. Tahapan terakhir, diambil darahnya.

*Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*).
Di pusat konservasi Elang Kamojang*



ALAMSYAH PUA SABA/TAMBANG

ALAMSYAH PU SABA/TAMBANG



Kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan Elang

"Semuanya sehat, hanya kelihatan sedikit lapar karena belum diberi makan," ujar Dian lagi.

Pemeriksaan rutin dilakukan bukan hanya untuk elang yang baru diterima, tapi juga bagi setiap elang yang sebelumnya sudah berada di sana. Dian, juga relawan di Pusat Konservasi, telaten melayani dan memeriksa setiap elang. Setelah melalui pemeriksaan kesehatan, elang yang baru diterima kemudian dipindahkan ke kandang observasi.

Elang yang masuk ke Pusat Konservasi kondisinya beragam. Ada yang masih sehat seperti lwa, ada pula yang datang dalam keadaan kaki atau sayapnya patah, atau bagian tubuhnya terluka. Semua dilayani, diperiksa rutin, dan dilatih untuk mengembalikan insting liar dan naluri alamiahnya. Ada pula yang akhirnya harus terus berada di pusat konservasi dan menjadi media pembelajaran.

"Biasanya yang tetap berada di sini itu yang cacat permanen, sayapnya remuk, harus diamputasi, dan tidak bisa terbang lagi," imbuh dokter hewan lulusan Universitas Gadjah Mada itu.

Elang-elang yang menjadi penghuni pusat konservasi ini berasal dari serahan warga, baik langsung ke pusat konservasi ataupun melalui BKSDA, ada pula hasil temuan di taman satwa, dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.

Pusat Konservasi Elang Kamojang mulai beroperasi pada 2014. Lokasinya di Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pusat Konservasi Elang Kamojang ini hasil kerjasama PT Pertamina Geothermal (PGE) dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dan kelompok pecinta burung, Forum Raptor Indonesia (RAIN).



Pengunjung menyaksikan Elang di kandang karantina.

Lokasinya sekitar 3 kilometer sebelum memasuki area PGE Kamojang, di atas lahan sekitar 11 hektare.

Awalnya, Pusat Konservasi ini untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi elang jawa, jenis endemik Indonesia yang keberadaannya terancam punah. Populasi elang yang identik dengan lambang negara Indonesia, burung garuda, itu diperkirakan hanya sekitar 600-1.000 ekor yang masih tersisa. Namun tidak hanya elang jawa yang terancam. Maka, elang jenis lainnya juga ditampung untuk direhabilitasi.

Menurut Zaini Rahman, Ketua Forum Raptor Indonesia, di dunia saat ini terdapat 300 lebih jenis elang. Sebanyak 75 jenis di antaranya berada di Indonesia. Mereka yang dirawat di Pusat Konservasi menjalani beberapa tahapan. Dimulai dari masa karantina, rehabilitasi medis, pelatihan terbang, dan pelepasliaran.



ALAMSYAH PUA SABA/TAMBANG



Seekor Elang ular dikandang karantina dan segera dilepasliarkan.

Menurut Wawan Darmawan, *General Manager* Pertamina Geothermal Area Kamojang, pusat rehabilitasi, edukasi, dan penangkaran elang ini merupakan terbesar dan terlengkap di Indonesia, karena mengacu pada standar internasional yakni IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), GFAS (*Global Facilities for Animal Sanctuary*), dan IWRC (*International Wildlife Rehabilitation Council*).

Irfan Zainuddin, Direktur Utama Pertamina Geothermal mengatakan, program konservasi elang ini merupakan salah satu upaya PGE untuk mewujudkan komitmen dalam menjaga kelestarian Kamojang, kawasan yang telah menjadi lokasi pengembangan energi panas bumi selama 32 tahun. PGE akan tetap menggandeng Raptor Indonesia (RAIN) dan BBKSDA, setidaknya sampai empat tahun ke depan dalam upaya menambah populasi elang di Indonesia.

Sampai saat ini, Pusat Konservasi Elang Kamojang masih memiliki 17 ekor elang dari berbagai jenis: jawa, brontok, ular, dan jenis lainnya yang kini masih menjalani masa karantina. Enam ekor elang sudah berhasil dilepasliarkan.

Terakhir adalah Iqlima, elang ular betina yang dilepasliarkan pada pertengahan September 2015, setelah di-karantina selama empat bulan. Iqlima diserahkan seorang warga Sumedang, Jawa Barat.

Meski telah dilepaskan, elang terus dipantau intensif, hingga dua tahun kemudian. Pemantauan diper mudah oleh adanya transmitter yang dipasang pada ekor elang. Pemantauan pertama dilakukan pada hari ke-21 setelah dilepas.

"Kami masih terjun ke hutan untuk memonitor. Makanan pun masih kami pasok di tempat-tempat tersembunyi. Kami latih secara perlahan untuk mengembalikan nalurnya sebagai satwa liar," ujar Zaini Rahman.

Semenjak kehadiran pusat konservasi tersebut, banyak warga yang sukarela datang menyerahkan elang peleliharaannya. Ada pula yang sekadar bertanya tata cara menyerahkan elang. Mereka mengenal adanya pusat konservasi dari media sosial, internet, atau ketika bertandang ke kawasan wisata Kamojang dan sekitarnya.

Karena itulah, masyarakat yang menyerahkan elang mereka, bukan hanya dari wilayah Garut, Sumedang, tetapi juga dari beberapa daerah lain seperti Cirebon, Tasikmalaya, Bogor, juga Jakarta. Di depan pintu tempat karantina hewan, selain tertulis jenis elangnya, juga dicantumkan namanya. Ada iwa, denok, iqlima, aming, stenle. Nama-nama itu adalah pemberian dari pemilik sebelumnya.

Menurut Dian, kesadaran masyarakat untuk mengembalikan elang ke habitat asal melalui pusat konservasi, sudah mulai tinggi. Pihaknya terus menyosialisasikan, terutama untuk pengunjung yang menyambangi pusat konservasi, untuk ikut terlibat lebih jauh dengan menjadi orang tua asuh elang-elang tersebut. Kehadiran orang tua asuh dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan selama elang tersebut berada pada masa karantina.

Meskipun sudah ada dukungan dari Pertamina Geothermal, namun akan semakin baik jika lebih banyak orang atau masyarakat luas yang ikut terlibat. Dian menggambarkan, satu ekor elang selama sebulan butuh makanan sekitar Rp 500 ribu. Orangtua asuh bisa membantu melalui dana atau makanan yang biasa dikonsumsi elang, ataupun menyumbang barang berupa sarung tangan ataupun masker yang biasa dipakai oleh petugas atau pengunjung saat melihat elang.

"Sudah beberapa orang yang berminat, tetapi masih sedikit. Karena itu, kepada setiap pengunjung, kami selalu menawarkan untuk menjadi orang tua asuh," terang Dian lagi.

Selain sebagai lokasi konservasi, rehabilitasi dan karantina elang, lokasi tersebut memang diarahkan menjadi tujuan wisata edukasi. Sejak berdiri, hampir setiap pekan, banyak wisatawan yang datang, terutama dari sekolah. Siswa-siswi sekolah, dari tingkat dasar sampai menengah ini, menjadi sasaran kampanye penyelamatan elang.

Konsep wisata edukasi ini, menurut Wawan Darmawan, sejalan dengan misi awal keterlibatan Pertamina Geothermal dalam pengembangan pusat konservasi elang tersebut.

Elang merupakan jenis pemangsa puncak, pada pramida makanan sebuah ekosistem. Elang juga menjadi indikator terakhir akan kesehatan, keseimbangan, dan kelestarian sebuah ekosistem. Burung pemangsa dari kelompok Accipitridae ini menyeimbangkan ekosistem sebuah kawasan dengan mengatur populasi mangsanya seperti tikus, dan ular.

Merneliha elang, artinya ikut menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan. Salah satu persoalan konservasi elang di Indonesia adalah kerusakan habitat elang, termasuk akibat kegiatan deforestasi dan fragmentasi.

Sebagai negara tropis, Indonesia menawarkan kehangatan yang alami. Menurut Zaini Rahman, Ketua Forum Raptor Indonesia, setiap musim dingin, kawanan elang dari Mongolia dan Siberia, bermigrasi ke Indonesia untuk menghangatkan diri.

Selain Lumajang dan kawasan Bromo Tengger Se-



Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar, didampingi Presiden Direktur Pertamina, Irfan Zainuddin, saat meninjau pusat konservasi Elang Kamojang.

meru, di Jawa Timur, kawasan Garut menjadi lokasi favorit bagi para elang untuk singgah. Kawasan gunung Gunung, Halimun, Salak, Kamojang, Papandayan, dan Telaga Bodas ternyata memiliki lanskap yang menyerupai daerah asal para elang. Setiap musim dingin, burung yang hidup di burni bagian utara melakukan perjalanan panjang, ke arah selatan, demi mencari hidup.

Ribuan burung pemangsa melalui jalur terbang Asia timur, dari Siberia ke Indonesia, masuk melalui pulau Rupat di Riau. Sebelumnya gerombolan bersayap itu melalui Thailand, Malaysia, dan melalui jalur lautan Asia Timur, dari Jepang menuju Indonesia melalui Filipina dan Sulawesi singgah untuk mencari makan dan beristirahat.

Kesamaan lanskap yang ada di kawasan Garut, yang menerupai habitat kawasan elang dari Mongolia dan Siberia, menjadi titik favorit bagi para elang untuk bermigrasi. Bulan Oktober dan November merupakan saat kawan burung, termasuk elang dari wilayah dingin, datang menyambangi Indonesia, termasuk kawasan Garut dan sekitarnya.



Kegiatan pelepasliaran Elang, setelah melalui masa karantina.

Dari Pantuan Forum Raptor Indonesia, kawan burung termasuk elang yang masuk ke wilayah Garut dan Indonesia pada umumnya, ada yang hanya sekedar beristirahat sejenak (*resting*) kemudian melanjutkan perjalanan, ada pula yang beristirahat sepekan (*stop over*) atau ada pula yang menghabiskan keberadaannya sampai musim dingin usai (*wintering*).

Karena menjadi lokasi favorit persinggarahan burung saat melakukan migrasi, maka Forum Raptor Indonesia mengusulkan agar area Kamojang, Papandayan, Halimun, Guntur dan Telaga Bodas menjadi kawasan semacam taman nasional untuk menjaga satwa-satwa yang bermukim di lokasi tersebut.

Kebakaran hutan di wilayah Sumatera ikut mempengaruhi perjalanan migrasi burung-burung tersebut. Pantauna terhadap migrasi burung di Bengkalis Baru, Riau, menunjukkan bahwa kebakaran hutan di wilayah Sumatera, mempengaruhi perjalanan burung-burung bermigrasi.

Dibandingkan tahun lalu, perhitungan burung pemangsa, termasuk elang sudah mulai dilakukan pada September 2014. Namun tahun ini, baru pada Oktober 2015, baru dapat dihitung. Pada minggu kedua Oktober 2015 misalnya, didapat 300 ekor burung melintas. Esok harinya, tidak nampak, karena terhalang asap.

Ahli burung dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewi Malia Prawiradilaga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, asap kebakaran hutan berbahaya bagi semua mahluk hidup, termasuk elang. Saat bermigrasi, elang mengandalkan indra penglihatan untuk menentukan arah terbangnya.

Ketika terjadi kebakaran lahan milik Perhutani pada akhir Oktober lalu, di tempat yang tak jauh dari sekitar lokasi konservasi elang, membuat relawan panik. Wawan Darmawan langsung memerintahkan tim pemadam kebakaran Pertamina Geothermal segera beraksi. Wawan khawatir, kebakaran akan merembet ke lokasi konservasi. Syukur, api yang membakar pohon dan tanaman kering, berhasil ditaklukkan.■

MEMAGARI PETERNAKAN DI LAHAN BEKAS TAMBANG

ESTI WIDYASARI
esti.widyasari@tambang.co.id

Lahan bekas tambang mineral dan batu bara bisa disulap jadi hijau kembali. Ternak kambing dan sapi mendapat habitat baru. Tapi bila tak dipagari, ternak bisa mengganggu dan merusak. Dan jika tak dipagari regulasi, ragu pun bisa menghadang perusahaan.

S uara lenguhan sesekali terdengar memecah su-nyi. Sekawan sapi berkeliaran bebas dan merumput di hamparan hijau nan luas. Menjelang petang, sapi-sapi itu digiring pulang ke kandang. Tak begitu jauh dari padang ternak dan kandang sapi itu, mesin-mesin riuh bekerja mengeruk tanah. Memuat batu bara ke dalam bak truk-truk gede, untuk diangkut lewat jalan tambang. Pemandangan kontras tersebut, bahkan terjadi dalam satu pagar kompleks besar sebuah perusahaan bernama Berau Coal.

Kata Doddy Herika, Manajer Penutupan Tambang PT Berau Coal, penggembalaan di siang hari perlu dikombinasikan dengan pengandangan di malam hari agar lebih mudah mengumpulkan kotoran sapi untuk pupuk. Cara tersebut dinilai efektif untuk mendapat manfaat optimal.





"Butuh waktu setidaknya tiga tahun untuk menyiapkan dan menghijaukan lahan, sebelum ternak sapi bisa masuk. Kami pun sebelumnya sudah melakukan berbagai kajian memastikan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik," Doddy bercerita.

Saat ini jumlah ternak sapi yang dipelihara di areal site Binungan milik Berau Coal sudah mencapai lebih dari 200 ekor, terdiri dari jenis sapi bali, sapi brahman cross, serta sapi donggala. Uji kualitas terus dilakukan secara berkala untuk menganalisa kandungan logam berat pada tanah, pada rumput pakan, hingga dalam darah. Kadar residu logam berat yang ditemukan sejauh ini masih berada dalam batas aman.

Peternakan terpadu juga menghasilkan biogas dari kotoran sapi. Sumber energi tersebut dipakai menghasilkan listrik untuk menghidupkan mesin pompa dan kompresor di area perusahaan.

Berau Coal tak memberikan sapi sebagai modal ber gulir bagi masyarakat sekitar tambang untuk digembala kan. Orang-orang yang menggarap peternakan terpadu itu bekerja dengan sistem upahan. "Ketika kegiatan tambang berakhir, peternakan diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di sekitar tambang," Doddy menegaskan.

Berau Coal merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan silvopastura dalam reklamasi lahan bekas tambang. *Silvopastura* berasal dari hutan (*silvo*) dan padang ternak (*pasture*). Konsep pengelolaan lahan dilakukan dengan memadukan penanaman pohon dan tanaman pakan ternak berupa rumput atau kacang-kacangan. Di lahan yang sama ditempatkan pula hewan ternak, yang dapat dilepaskan untuk merumput langsung atau dikandangkan, dan diberi pakan rumput potong.

Rerumputan yang ditanam bisa berupa rumput bahia (*Paspalum notatum*) atau rumput vetiver (*Vetiver zizoneoides*), yang mampu menetralisir tanah di lahan bekas tambang. Pepohonan yang ditanam bisa dari jenis sengon, trembesi, akasia, ataupun pohon agro-industri seperti kelapa sawit dan jarak pagar. Hewan ternaknya bisa yang berukuran besar seperti sapi dan kerbau atau yang berukuran lebih kecil seperti kambing dan domba.

Indonesia dengan iklim tropis khatulistiwa sebenarnya diuntungkan dengan ketersediaan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga masa produktif padang ternak bisa lebih panjang. Ironisnya, Indonesia sekarang justru harus mengimpor sapi dari negara lain, yang tergantung pergantian musim. Belakangan pemerintah pun menca nangkan program swasembada daging, dan lahan bekas tambang menjadi salah satu incaran untuk dimanfaatkan.

"Pemanfaatan lahan bekas tambang merupakan salah satu tindak lanjut dari Rencana Aksi Bukittinggi, untuk mencapai swasembada daging. Karena selama ini permasalahannya adalah keterbatasan lahan penanaman pakan ternak yang berkualitas," ujar Maradoli Hutasuhut, Kepala Sub Direktorat Mutu Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Pada 29 Oktober 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menca nangkan gerakan kemandirian pangan, di Padang, Sumatera Barat. Gerakan itu disebut sebagai 'Rencana Aksi Bukittinggi'.

Maradoli menyebut sederet peraturan perundungan yang membuka pintu bagi pemanfaatan lahan bekas tam-



Ternak sapi yang dipelihara di areal site Binungan milik Berau Coal.

bang, khususnya tambang batu bara dan timah. Mulai dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rujukan lain yang dipakainya adalah PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Kementerian Pertanian bahkan telah menghitung biaya untuk mendukung pengadaan ternak di lahan bekas tambang. Dalam anggaran rutin yang tercantum di Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN) 2015, angkanya mencapai Rp 4,2 miliar. Yang mendapat jatah adalah lahan bekas tambang PT BHP Lati Petangis, Kabupaten Paser, dan PT Kitadin di site Embalut, Kutai Kartanegara. Keduanya di Provinsi Kalimantan Timur. Serta lahan bekas tambang timah di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

Di luar itu, masih ada anggaran pengadaan ternak khusus yang dimasukkan dalam APBN-P 2015. Duitnya Rp 15 miliar, untuk menempatkan ternak di lahan bekas tambang di Provinsi Kalimantan Timur.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM hanya menerima laporan dari perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kalimantan Timur. Pemegang PKP2B diminta mengalokasikan lahannya untuk program "Dua Juta Ekor Sapi" yang digagas pemerintah provinsi setempat.

"Kami kemudian menyurati Dinas ESDM setempat agar memperhatikan, karena perusahaan tambang harus bisa memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi. Agar tidak mengganggu tempat reklamasi yang masih akan kami nilai," ungkap Lana Saria, Kepala Sub Direktorat Lindung dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Pihaknya sampai saat ini belum pernah duduk bersama instansi terkait untuk mengkaji pemanfaatan lahan bekas tambang untuk penempatan sapi-sapi itu. Meskipun demikian, ia tetap terbuka dan mempersilakan bila ada inisiatif dari sektor lain yang melihat potensi pemanfaatan lahan bekas tambang.

"Kami menyambut baik, tapi harusnya ada koordinasi *dong*. Kami bisa mengidentifikasi berapa luasan lahan yang bisa dipakai, dan lahan mana yang bisa dijadikan untuk tempat peternakan sapi. Kan luasan lahan konsesi itu juga terbagi-bagi peruntukannya," ia bertutur.





Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KemenLHK.

Meskipun tidak dalam bentuk penyusunan suatu regulasi, ia mengingatkan setidaknya perlu ada pengaturan teknis lintas sektoral. Kajian dan perhitungan harus diperlakukan secara matang, data-data kuantitatif itu menjadi dasar hingga nanti keberhasilannya juga terukur.

"Kami mendukung apabila itu sudah direncanakan dari awal. Reklamasi itu kan menata, memulihkan, dan memperbaiki areal bekas tambang sesuai peruntukannya, agar kembali fungsi ekosistemnya. Tidak harus dalam bentuk revegetasi. Bisa jadi permukiman, kolam, juga peternakan," jelasnya.

Perusahaan yang masih berproduksi juga boleh memanfaatkan sebagian lahan untuk peternakan. Sejak awal, perusahaan itu harus sudah merencanakan kegiatan pasca tambang, dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peternakan. Rencana reklamasi sendiri disusun dalam periode lima tahunan, dan bisa direvisi sampai dengan dua tahun sebelumnya.

Tabel Distribusi Anggaran Rutin dan Anggaran Khusus Pengadaan Ternak di Lahan Bekas Tambang

Anggaran Rutin Pengadaan Ternak untuk Lahan Bekas Tambang (APBN 2015)

Jumlah Anggaran = Rp4,2 miliar

Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Lahan (Hektare)	Jumlah Ternak (Ekor)
Kalimantan Timur	Paser	100	33
Kalimantan Timur	Kulai Kartanegara (Kitadin)	80	33
Bangka Belitung	Belitung Timur	20	9
TOTAL		200	75

Anggaran Khusus Pengadaan Ternak untuk Lahan Bekas Tambang (APBN 2015)

Jumlah Anggaran = Rp15 miliar

Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Lahan (Hektare)	Jumlah Ternak (Ekor)
Kalimantan Timur	Paser	100	50
Kalimantan Timur	Samarinda	200	100
Kalimantan Timur	Kutai Barat	100	50
Kalimantan Timur	Kutai Timur	100	50
TOTAL		500	250

Sumber: Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kementerian Pertanian

Tetapi kalau tiba-tiba hewan ternak ditempatkan di area revegetasi yang sedang diupayakan perusahaan, Lanjut mengkhawatirkan penilaian reklamasi tambang itu. Ia bukan berprasangka, tapi berkaca pada beberapa pengalaman.

Di suatu lahan bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur, sapi-sapi yang dilepas di justru menjadi musuh bagi pohon trembesi. Padahal, pohon-pohon kayu itulah yang pertumbuhannya akan dinilai sebagai parameter keberhasilan revegetasi.

Di sebuah lahan reklamasi kontrak karya (KK) di Pulau Sulawesi, sekitar 500 ekor sapi milik kelompok masyarakat diizinkan merumput. Akibatnya, rumput yang terinjak-injak kawanan sapi itu mati dan sulit tumbuh kembali. Dalam kasus serupa, salah satu IUP batu bara pun terpaksa harus berhadapan dengan masyarakat sekitar, karena sapi yang diberikan lewat program CSR melahap jenis tanaman di luar menu yang disiapkan perusahaan.

"Saran saya, kalau mau beternak sapi jangan *diagonal* di areal revegetasi. Karena kalau gagal dalam evaluasi, tidak bisa dicairkan jaminan reklamasinya. Bahkan kalau sampai dua tahun berturut-turut dinilai gagal reklamasinya, bisa terkena sanksi tidak boleh berproduksi, sementara pekerjaan reklamasinya diserahkan pada pihak ketiga. Kasihan kan," Lanjut mengomentari.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengaku belum pernah diajak berkoordinasi untuk memanfaatkan potensi hutan bekas tambang sebagai padang ternak. Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Silvopastura memang sudah diberlakukan, namun itu khusus untuk hutan produksi.

"Yang menjadi wewenang kehutanan kan memang lahan pinjam pakai. Kalau penambangannya sudah selesai dan lahan sudah diserahkan kembali ke negara, nanti bisa diusulkan permohonan pemakaian untuk silvopastura," ujar San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Aturan pengajuan izin pemanfaatan hutan untuk silvopastura itu sudah mengacu pada layanan terpadu satu pintu, yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pemohon izinnya boleh individu, koperasi, perusahaan, atau perusahaan dengan permodal asing. Sehingga, sebenarnya soal perizinan sudah diperpermudah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pemanfaatan hutan bekas tambang sebagai padang ternak, yang disebut Awang sebagai terobosan positif terkait swasembada pangan. Apalagi sebagai guru besar di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, ia tahu betul bahwa pola pemanfaatan lahan untuk hutan sekaligus padang ternak sudah teruji keberhasilannya. Karenanya, ia pun berharap agar hal ini dapat dikordinasikan terlebih dahulu.

"Kami hanya mengimbau agar segala sesuatunya dilakukan sesuai prosedur agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Kami tidak akan mempersulit. Silakan datang untuk berkoordinasi," tegasnya.

Memang pada kenyataannya banyak perusahaan tambang, yang masih ragu untuk menerapkan pola hutan ladang ternak untuk reklamasi. Tak hanya dari sisi aturan dan kebijakan, hal teknis pun kerap jadi sumber keta-



kutan. Di kalangan masyarakat, kekhawatiran untuk mengonsumsi daging yang merumput di lahan bekas tambang pun mungkin masih ada, terkait kemungkinan tingginya kandungan logam berat.

Graham Bird, peneliti dari Bangor University di Inggris, menjelaskan, soal kandungan logam di lahan bekas tambang sebenarnya tergantung pada karakteristik tambang masing-masing. Di daratan Inggris Raya, memang banyak tambang tua yang kini beralih fungsi jadi padang ternak.

"Yang juga harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang bisa dikendalikan dalam upaya remediasi dan pengendalian lahan untuk meminimalisir risiko. Misalnya, dengan pemilihan spesies tanaman, serta pemilihan jenis hewan dan pola beternak," ujar Graham Bird. Ia memaparkan rumus hitungan untuk meminimalkan risiko logam berat itu, dalam sebuah diskusi pertengahan Oktober lalu di Bogor.

Dalam kesempatan diskusi itu, hadir pula perwakilan dari asosiasi lingkungan tambang. Jeffrey Mulyono, Ketua Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (FRHLBT), menyambut baik adanya sosialisasi permanaan bekas tambang untuk peternakan. Bagi Jeffrey, yang pernah menjabat direktur utama PT Berau Coal, gagasan itu sebenarnya sudah tak asing apalagi untuk tambang batu bara yang relatif aman dari kandungan logam berat.

Tonny Gultom, Ketua Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Tambang, juga menanggapi positif. Hanya

saja, Tonny mengingatkan agar pemerintah bisa ikut pula menyosialisasikan batasannya kepada masyarakat. "Jangan sampai nantinya masyarakat sekitar tambang menuntut semua perusahaan untuk ikut membuka lahan peternakan di bekas tambangnya. Tak semua kondisi tambang cocok untuk itu," ujarnya.

Memang saat ini pola silvopastura belum terlalu populer di Indonesia, karena konsep kehutanan dan peternakan dianggap saling bertentangan. Namun Irdika Mansur, Direktur SEAMEO BIOTROP, lembaga pusat pengembangan biologi tropis Asia Tenggara, tetap optimistis akan potensi lahan bekas tambang di Indonesia untuk dijadikan hutan padang ternak. Kesalahpahaman akan konsep dan teknik silvopastura adalah semata karena kurangnya koordinasi.

Irdika menekuni reklamasi tambang selama 15 tahun terakhir ini. Ia yakin bahwa sudah selayaknya lahan tambang bisa membawa manfaat lebih ketika cadangan mineralnya sudah habis. Dengan perencanaan yang matang, persoalan teknis yang banyak dilaporkan harusnya bisa teratasi. Lalu, pemerintah pun harusnya bisa bersinergi, karena tuh pada prinsipnya semua menyambut baik. (*Lihat bagian wawancara khusus: "Mestinya Tidak Perlu Khawatir"*).

"Kami hanya ingin setiap jengkal tanah di negara ini produktif. Memang butuh kesabaran dan konsistensi, karena ini hal baru dan melibatkan banyak permangku kepentingan," pungkas Irdika.

Teknis Hutan Padang Ternak

Analisa kandungan logam berat pada tanah

Penanaman pakan ternak bisa dilakukan jika kandungan logam berat dalam batas aman, dengan pemilihan jenis tanaman yang benar-benar sesuai.

Analisa kandungan logam berat pada tanaman

Perlu dipastikan agar kandungan logam yang diserap tanaman juga dalam batas aman.

Penanaman bibit pohon kehutanan

Sesuai dengan aturan yang berlaku, jumlah minimum adalah 625 pohon per hektare dan 40%-nya dari jenis pohon lokal berdaur panjang.

Penanaman tanaman pagar di sekeliling blok reklamasi

Tanaman pagar bisa menggunakan jenis pohon kayu putih yang rasanya tidak disukai ternak, tetapi masih bisa diambil manfaatnya dengan penyulingan minyak kayu putih. Sebagai pagar, penanaman dilakukan dengan rapat sebanyak 2-3 lapis. Satu blok reklamasi dapat dipisahkan menjadi beberapa kompartemen seluas 10 hektare, agar secara berkala ternak dipindahkan untuk memberi kesempatan rumput tumbuh kembali.

Pembentukan kelembagaan

Persiapan matang juga diperlukan untuk mengatur siapa yang akan mengelola, memanen, serta memasarkan ternak. Pola kerjasama bisa akan menggandeng koperasi masyarakat sekitar juga harus dimatangkan.

Penyiangan rumput pakan ternak

Selama dua tahun pertama, ternak tidak boleh dile-



paskan di lahan hutan padang ternak. Rumput bisa disangi untuk pakan ternak yang dikandangkan.

Penggembalaan ternak kambing atau domba

Ternak berukuran kecil seperti kambing dan domba bisa dibebaskan merumput di hutan padang ternak setelah usia pohon kehutanan berusia lebih dari dua tahun. Namun penting untuk disesuaikan rasio jumlah ternak dengan luasan lahan dan ketersedian tumbuhan pakan.

Penggembalaan ternak sapi atau kerbau

Ternak berukuran lebih besar seperti sapi dan kerbau baru bisa dibebaskan merumput di hutan padang ternak setelah lebih dari empat tahun. Tentu juga diperhitungkan rasio jumlah ternak dengan luasan lahan dan ketersediaan tumbuhan pakan.

MESTINYA TIDAK PERLU KHAWATIR

Irdika Mansur, Direktur SEAMEO BIOTROP

RDIKA Mansur, 49 tahun, selama 15 tahun terakhir ini menggeluti reklamasi lahan bekas tambang. Ia meyakini, dengan perencanaan matang, lahan bekas tambang bisa mendatangkan banyak manfaat. "Setiap jengkal republik ini harus bisa mendatangkan manfaat," kata dosen Jurusan Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogorini.

Irdika meraih gelar master di School of Forestry University of Canterbury, Selandia Baru. Pendidikan doktorinya didapat di Bio-sciences University of Kent, Inggris. Irdika aktif dalam usaha-usaha pengembalian produktivitas lahan tambang di berbagai lokasi tambang di Indonesia, termasuk di PT Newmont Minahasa Raya dan PT Newmont Nusa Tenggara. Tahun 2010 bukunya yang berjudul "Teknik Silvikultur untuk Reklamasi Lahan Bekas Tambang" diterbitkan, dan sudah dicetak dua kali.

Kepada wartawan TAMBANG, Esti Widyasari, ia menuturkan pandangannya soal pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang.

Apa yang menjadikan sektor pertambangan sangat potensial untuk pengembangan silvopastura?

Dalam praktik penambangan yang baik, setelah suatu areal selesai ditambang, reklamasi wajib dilakukan. Setelah lahan ditata, kemudian ditanami dengan tanaman penutup tanah atau *cover crop* untuk mengendalikan erosi. Perusahaan tambang pun sudah banyak memakai teknologi *hydroseeding*, yaitu pelarutan bibit sehingga cukup disemprotkan dengan cepat ke area tanah yang akan ditutup dengan rerumputan. Jika arealnya masuk kawasan hutan, ditanami bibit pohon kehutanan. Jika arealnya berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), malah bisa ditanami jenis tanaman sesuai kebutuhan.

Tanaman penutup tanah itu tak hanya berguna mengendalikan erosi, melainkan juga bisa sebagai pakan ternak berkualitas. Ini bisa mengatasi salah satu masalah penting dalam pengembangan peternakan di Indonesia, karena tidak tersedianya lahan pakan yang cukup. Masa-lah lainnya, biaya angkut yang mahal untuk mendistribusikan pakan ternak serta hasil ternak itu sendiri ke berbagai wilayah di nusantara.

Lahan tambang memiliki hamparan luas. Sangat potensial untuk disulap jadi lahan hutan padang ternak, setelah selesai ditambang. Lahan bekas tambang merupakan lahan yang dapat direkonstruksi untuk menjadi lahan penggembalaan dengan pola *silvopastura*. Di lahan pasca tambang, lahan dapat didesain sejak awal saat penataan lahan. Lahan dapat dibuat datar, miring, atau berbentuk pulau yang dikelilingi parit yang lebar untuk menjaga ternak tidak keluar.



Lokasi tambang umumnya jauh dari kawasan pemukiman, sehingga memenuhi persyaratan jarak minimum antara peternakan dan perumahan. Tersebarlah lokasi tambang di hampir setiap penjuru negeri juga jadi potensi tersendiri. Jika setelah itu dimanfaatkan untuk peternakan, berarti pemerataan sentra-sentra produksi ternak. Biasanya perusahaan tambang juga sudah memiliki akses jalan ataupun pelabuhan memadai, yang bisa dimanfaatkan juga untuk transportasi ternak. Pada gilirannya, ini akan mengurangi biaya distribusi ternak atau daging.

Apa untungnya bagi perusahaan tambang?

Reklamasi adalah kewajiban perusahaan tambang. Dengan *silvopastura*, reklamasi lahan bekas tambang bisa memberi manfaat tambahan. Alih-alih dianggap hanya sebagai beban di mata anggaran perusahaan, pola reklamasi menjadi hutan padang ternak bisa jadi bentuk baru investasi.

Pertama, dengan kehadiran ternak berarti perusahaan mendapat sumber pupuk kandang dalam jumlah yang besar. Pupuk kandang dapat dikumpulkan jika dilakukan kombinasi antara penggembalaan di siang hari dan pengandangan di malam hari. Ini bisa menekan ongkos yang dikeluarkan untuk pengadaan pupuk dalam rangka melaksanakan kewajiban penanaman kembali. Kotoran ternak pun merupakan sumber energi biomassa, yang bisa dikonversi menjadi listrik.

Ternak di lahan reklamasi yang dikelola dengan baik dapat menekan biaya pemeliharaan tanaman penutup tanah. Karena rumput atau legum dimakan oleh ternak,



Dok. KPC

maka tidak sampai mengganggu bibit pohon yang telah ditanam. Ini tentu perlu perhitungan cermat agar ternak tidak justru merusak bibit pohon.

Bila usaha peternakan kemudian dikelola secara serius oleh anak usaha atau mitra kerja, maka ini tentu bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar tambang. Untuk menjadi tenaga kerja peternakan kan tidak harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi.

Silvopastura juga bisa dibuat dengan sinkronisasi antara divisi lingkungan dan CSR perusahaan tambang. Dana reklamasi diperuntukkan untuk penataan lahan, menyuburkan tanah, serta permeliharaan tanaman. Pengadaan bibit ternak bisa diambil dari dana CSR, bila perusahaan bekerjasama dengan koperasi masyarakat sekitar tambang. Ini sebagai persiapan pasca tambang, agar daerah tetap mendapat sumber manfaat berkelanjutan.

Dampaknya tentu sangat positif bagi pencitraan perusahaan tambang. Ini mematahkan anggapan tambang hanya bisa merusak hutan, dan setelah itu lahannya tak bisa lagi digunakan untuk kegiatan budidaya.

Tidak ada kekhawatiran menyalahi izin dan peraturan perundangan?

Pada umumnya perusahaan tambang masih khawatir bahwa praktek *silvopastura* ini menyalahi peraturan perundangan. Apalagi untuk perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), karena lahananya memang berada di kawasan hutan. Padahal, mestinya tidak perlu khawatir. Toh aturan penanaman 625 bibit pohon kehutanan per hektare tetap bisa dikerjakan, dan penanaman tanaman penutup tanah untuk mengendalikan erosi juga tetap dilaksanakan.

Kalau perusahaan pemegang izin usaha pertambangan kemudian cari untung dari jualan sapi, itu tidak benar. Tapi konsepnya kan tidak seperti itu. Saat ini, memang belum ada peraturan perundangan yang memungkinkan perusahaan tambang mengusahakan ternak di lahan pasca tambangnya secara komersial. Perlu disiapkan pembentukan kelembagaan dengan fungsi khusus yang akan menge-lo-la, meranen, dan memasarkan ternak yang dihasilkan. Mungkin nanti pemerintah malah perlu mendorong agar perusahaan tambang punya anak usaha khusus untuk itu, karena sejalan dengan program swasembada daging.

Sejauh ini, bagaimana perkembangan praktik *silvopastura* di lahan bekas tambang di Indonesia?

Lahan bekas tambang yang secara teknis memenuhi persyaratan banyak tersedia. Beberapa perusahaan pertambangan telah mencoba mengembangkan peternakan di lahan bekas tambangnya. Namun, pengembangan ternak ini belum bersifat komersial. Sifatnya masih sebagai uji coba atau etalase, meskipun jumlah ternaknya telah mencapai ratusan ekor. Perlu kepastian aturan yang mendukung serta pembinaan lebih lanjut untuk pengembangan peternakan komersial.

Apa saja kendala teknis yang biasa dihadapi perusahaan tambang dalam menerapkan pola *silvopastura*?

Introduksi ternak di lahan bekas tambang memerlukan perhatian khusus dan memerlukan pengetahuan tentang ternak. Padahal, masih jarang perusahaan pertambangan yang memiliki tenaga-tenaga profesional peternakan. Untuk itu tentunya perlu ada tambahan staf dengan kualifikasi punya pengetahuan tentang peternakan.

Perlu juga dibuat perencanaan bisnis yang baik agar peternakan di lahan bekas tambang tidak menjadi beban, tetapi malah menghasilkan bagi perusahaan. Belajar dari pengalaman beberapa perusahaan, ada risiko lahan reklamasi rusak akibat penggembalaan yang kurang terkoordinasi dengan baik. Karena tak diperhitungkan secara matang, akhirnya jumlah ternak melebihi kapasitas sehingga menjadi hama bagi bibit pohon kehutanan.

Bila tak dipagari, ternak juga mungkin berkeliaran di jalanan tambang dan mengganggu operasional tambang. Hal-hal itu bisa terjadi karena perencanaan yang kurang matang sejak awal. Jadi, sebenarnya kendala yang sifatnya teknis bisa diantisipasi.

Lantas, apa yang menjadi kunci sukses untuk menjadikan lahan bekas tambang sebagai hutan padang ternak?

Kunci sukses *silvopastura* di lahan bekas tambang tentunya jika program ini menjadi program perusahaan secara serius. Artinya, ada perencanaan bisnis peternakan yang baik, fasilitas yang memadai, sumberdaya manusia yang mumpuni, dan koneksi dengan pasar yang akan menyerap hasil ternak. T

MEMIMPIN DENGAN PENGALAMAN

Bing Tobing

CEO PT Baramutiara Prima



RUSLAN ISHAK AZHAR/TAMBANG

Pernah bekerja di perusahaan tambang multinasional. Kini memimpin tambang PKP2B yang luasnya 20.000 haktare lebih. Ke depan akan mengandalkan investasi di bidang listrik

Bagi pelaku industri pertambangan di Indonesia, nama Bing Tobing bukan nama baru yang berkecimpung di sektor ekstraktif ini. Tidak hanya karena lebih dari 35 tahun berkecimpung di Industri pertambangan, Bing, demikian ia biasa disapa, juga lahir dari keluarga yang berkecimpung di sektor pertambangan. Ayahnya adalah karyawan PT Timah.

Selama hampir 27 tahun, ia bekerja di PT International Nickel Company (Inco, kini Vale), sejak perusahaan yang mulanya berasal dari Kanada itu beroperasi di Indonesia, pada 1979. Ia mengawali karier dari asisten insinyur perencanaan tambang, kemudian berganti ke beberapa posisi lain, sampai akhirnya menduduki posisi tertinggi, menjadi presiden direktur atau CEO.

Lepas dari Inco, ia kemudian sempat menjadi konsultan beberapa perusahaan tambang, lalu diminta menjadi komisaris PT Timah. Pada 2012, ayah dua anak ini di-dapuk menjadi Presiden Direktur & CEO PT Baramutiara Prima, sebuah perusahaan batu bara, pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi 3.

Di saat banyak perusahaan tambang, tidak berproduksi atau bahkan ada pula yang melego konsesi tambangnya, Baramutiara Prima, justru memulai produksi.

Alumnus Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini benar-benar mengawali pekerjaan di Baramutiara dalam kondisi jauh berbeda dengan perusahaan sebelumnya. Sebelumnya ia berkariere di perusahaan multinasional dengan segala kesiapan yang sudah matang. Ketika masuk ke Baramutiara, selain perusahaan nasional, pemegang sahamnya belum pernah memiliki pengalaman di pertambangan. Di tangannya, meski dalam kondisi sulit, Baramutiara memulai produksi.

"Perlakukan orang lain, sebagaimana Anda ingin dipperlakukan," merupakan filosofi dalam menjalani kehidupan juga memimpin perusahaan. Semua orang diperlakukan sama, dengan prinsip ini, semua karyawan dalam level apapun, dengan mudah menemuiinya, tanpa sekat sedikit pun. Kepada wartawan Majalah TAMBANG, Alamsyah Puasaba, Bing banyak bercerita soal pandangannya mengenai dunia tambang batu bara yang lagi lesu saat ini.

Saat ini banyak perusahaan batu bara berhenti beraktivitas dan bahkan berhenti beroperasi. Mengapa justru Anda mulai berproduksi?

Kami berangkat dari kontrak PKP2B generasi III yang sudah didapatkan sejak 1997. Sejak itu praktis sekitar 15 tahun tidak ada kegiatan. Padahal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM selalu mempertah-



RUSLAN ISHAK AZHARI/TAMBANG

nyakan ini. Ini adalah tanggung jawab pemegang saham untuk segera memulai kegiatan produksinya, walaupun harga batu bara tengah menurun.

Maka skala produksinya pun masih relatif kecil. Saya ingat, waktu saya bergabung dengan Baramutira tahun 2012, harga batubara kami, kalorinya GAR 3500, masih US\$ 35 dolar per ton. Hari ini harganya, di bawah US\$ 18 dolar.

Kami memulai produksi saat ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan meski dengan skala kecil. Tetapi kami yakin, bahwa ke depan, permintaan batu bara akan naik. Menurut analis, sekitar 2017 atau 2018, harga baru akan pulih walaupun tidak seperti 2011.

Siapa pasar batu bara produksi Anda?

Pembelinya sejauh ini masih *spot*. Belum ada yang kontrak jangka panjang. Sulit mencari pembeli yang mau kontrak jangka panjang, dalam situasi harga tidak stabil seperti sekarang ini. Mereka cenderung *spot* walaupun memang semakin sulit untuk kami. Pembelinya ada yang domestik, ada juga yang ke Malaysia. Kami lagi menjajaki yang ke India.

Kami yakin, suatu saat, harga batu bara akan membaik. Pembangkit listrik masih banyak yang dari batu bara. Di dalam negeri sendiri, ada proyek 35 ribu MW, ini akan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan pembangkit listrik mulut tambang.

Apa strategi Baramutira, agar bisa terus berproduksi di tengah situasi yang masih belum membaik ini?

Kami menambang dengan nisbah kupas yang rendah. Kedua, kita harus efisien di ongkos penambangan. Kami punya kontraktor, kami bicarakan dengan mereka, dengan harga sekarang ini supaya bisa sama-sama terus kerja. Kami cari solusi yang baik bagi keduanya, harga yang terbaik, dengan masih memberikan untung meski sedikit. Suatu saat nanti kalau harga membaik, kami juga akan memperbaiki harga dengan kontraktor.

Nisbah kupas (SR) kami di bawah 2. Sementara ini, kami masih menambang di SR rendah sekitar 1:1. Dibandingkan dengan batu bara kalori rendah lainnya, kami termasuk salah satu yang paling rendah SR-nya. Semua perusahaan tambang saat ini, sedang mengurangi rasio untuk efisiensi.

Kami juga menekan *overhead*. Sementara ini tidak melakukan rekrutmen baru. Kami optimalkan tenaga kerja yang ada.

Selama ini, sering terjadi tumpang tindih antara pertambangan dengan sektor lain. Bagaimana dengan Baramutira?

PKP2B kami juga ada yang tumpang tindih, baik dengan perkebunan atau kehutanan. Kalau dengan kehutanan, kami sudah dapat izin pinjam pakai kawasan hutan (IPKH). Yang agak unik dengan perkebunan. Di atas lahan kami, banyak tanah yang dimiliki oleh Cargill, perusahaan asing di bidang komoditi.

Sejak 1997, antara kami dengan Cargill, tidak terjadi kesepakatan. Bahkan Cargill saat itu sudah sepakat untuk tidak memberi kesempatan kepada pertambangan untuk melakukan kegiatan. Pendekatan terus dilakukan. Pemegang saham, dalam hal ini Gunung Sewu, kemudian menemukan solusi yang saling menguntungkan. Sekarang



Cargill merupakan bagian dari Baramuttiara, dengan memiliki 25% saham. Sejak Desember 2012, semuanya bisa dikatakan lancar.

Baramuttiara ke depan akan seperti apa?

Baramuttiara memiliki luas wilayah hampir 20 ribu hektare dan baru digarap sekitar 2.000 hektare, masih mungkin untuk menambah produksinya. Dengan kualitas batu bara yang rendah, tentu laba kami juga tidak terlalu besar. Jadi kalau bicara tentang aliran kas, tentu kita akan bicara tentang volume. Sekarang kalau memungkinkan ingin sampai 10 juta ton setahun. Ini akan memberikan penghasilan bagus bagi perusahaan.

Ke depan, penjualan listrik mulut tambang menjadi yang utama. Selain bisa memberikan listrik kepada masyarakat, perusahaan bisa mendapatkan manfaat.

Kedua, kami menjajaki untuk meningkatkan kualitas batu bara. Saat ini kami bekerjasama dengan lima konsorsium Jepang. Mereka meneliti batu bara kami, untuk meningkatkan dari GAR 3.200 menjadi 5.000-an. Kami sudah mengirimkan sampel dua kali 16 ton ke Jepang. Kalau lancar akan ada semacam uji coba. Kalau sudah terbukti baru dalam skala komersial.

Untuk batu bara kalori rendah, ada juga teknologi lain seperti gasifikasi dan pencairan. Kami terbuka untuk itu.

Kapan rencananya untuk *upgrading*?

Masih butuh waktu, mungkin sekitar 2020 untuk skala komersialnya. Uji coba sekitar 2017. Kebetulan dengan Jepang, sangat terstruktur jadwalnya. Penjajakan dengan Jepang sudah sejak awal 2013. Sekarang kami masuk ke proses untuk uji cobanya. Ini skala swasta tetapi didukung oleh Nedo, semacam BPPTnya kalau di Indonesia. Awal 2017 mulai bangun untuk *pilot plant*. Kalau skala labnya sudah berhasil. Ada contoh batu bara kami yang sudah sampai 5.000 GAR.

Dok. BARAMUTIARA



Salah satu aktivitas dari Baramuttiara, yang memiliki luas wilayah hampir 20 ribu hektare dan baru digarap sekitar 2.000 hektare.

Jepang memang sangat hati-hati memilih *partner*. Kami termasuk yang kesekian kalinya. Mereka sudah bertemu sebelumnya dengan beberapa perusahaan, baik IUP maupun PKP2B. Ternyata mereka ingin dengan kami karena kami cukup serius. Ini akan bagus, tetapi dengan catatan harga batu bara harus bagus.

Kalau penjajakan untuk mulut tambang sudah sejauh mana?

Mulut tambang kami sebenarnya cukup jauh. Kami pernah ikut prakualifikasi untuk Sumsel I, dengan salah satu perusahaan Korea. Kami sudah lolos prakualifikasi. Ketika masuk ke tahap berikutnya, *partner* dari Korea mundur, bank yang mensupport mereka, membutuhkan jaminan pemerintah. Mereka mundur, kami agak kecewa juga. Sebetulnya perusahaan Korea sudah tahu sejak awal bahwa tidak ada jaminan pemerintah. Ketika pihak Korea mundur, sebenarnya ada beberapa yang mau, dari Cina, Spanyol, juga Thailand. Namun, mengganti konsorsium yang sudah berjalan apalagi sudah masuk tahapan pra kualifikasi, tidak dibolehkan PLN.

DIMINTA MENGEMBALIKAN UANG

RUSLAN ISHAK AZHARI/TAMBANG

Ada cerita menarik ketika Bing Tobing diminta menjadi komisaris di PT Timah. Selepas dari Inco, ketika terjadi pergantian pucuk pimpinan di perusahaan BUMN, ia beberapa kali ditelepon orang. Ketika pergantian dirut Antam, ia ditelepon dimintai CV dan dijanjikan untuk memimpin perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral itu. Pun demikian ketika pergantian pucuk pimpinan PTBA, pada zaman Sukrisno, ada telepon masuk, meminta CV dan bahkan sampai bertemu dengan seseorang. Namun ada *iming-iming* yang disampaikan, kalau sudah menjadi CEO, jika ada usulan proyek, agar diperhatikan. Akhirnya ia berpikir, tidak akan meladeni hal-hal seperti itu.

Sampai kemudian suatu ketika, ada telepon dari seorang yang mengaku staf khusus Menteri BUMN, Sofyan Djailil, dan meminta dirinya untuk menjadi komisaris PT



Apa yang membedakan, ketika Anda berada di perusahaan mineral berskala besar dan saat mengelola perusahaan batu bara dan memulainya dari awal?

Kalau di perusahaan besar yang sudah mapan, semua sistem kerja sudah teratur. Sedang di Baramulti saya mulai dari awal. Saya ingat, ketika saya masuk pertama di sini, Januari 2012, di tim kami cuma ada 7 orang, 2 orang manajer, selebihnya staf. Kami tidak punya H&R, relasi eksternal ada, tetapi lebih banyak mengurus lahan. Ketika masuk, saya harus menyiapkan uraian kerja satu-satu, untuk CFO, external, operasi, termasuk surveyor. Semua itu dilakukan berdasarkan pengalaman saja, sudah tidak sempat buka buku. Rekrutmen dibantu induk, Gunung Sewu. Pelan-pelan mulai.

Kira-kira sampai kapan akan terus berkecimpung di di industri pertambangan?

Wah itu pertanyaan yang cukup menarik juga tuh. Sampai kapan, sampai semampu saya memberikan sumbangsih buat perusahaan. Karena saya dulu waktu dari Inco, saya pensiun umur 53. Saya sudah bilang sama istri saya, sudah saya tidak mau kerja lagi. Kebetulan anak-anak sudah selesai sekolahnya. Saya bilang ke istri saya mau stop kerja, di rumah saja. Selama 5 bulan *ngga* kerja sama sekali. Sampai main golf juga sendiri, *ngga* ada teman. Pergi pagi jam 5 pulang jam 12. Main sendiri, hanya ditemani *caddy*, untung tidak terjadi apa-apa. *Hahaha*. Kalau *ngga*, menemani istri ke *supermarket*, baca atau lainnya. Tetapi, lama-lama bosan juga.

Yang memicu saya kembali bekerja waktu itu antara lain, saya diajak sebuah perusahaan nasional untuk melihat konsesi nikel di Sulawesi Tenggara. Mereka minta saya untuk membantu mereka untuk membuka tambang. Saya agak terharu saat itu, ketika ke *site*, saya lihat masyarakat sekitar miskin sekali, banyak anak-anak tidak sekolah, bapak-bapak banyak yang menganggur, tidak ada pekerjaan. Saya bayangkan kalau membuka tambang, paling tidak

akan mampu menyerap tenaga kerja. Pengalaman sebelumnya di Inco, bahwa kehadiran pertambangan, memberikan *multiplier effect* hingga 8 sampai 9 kali. Inilah yang mendorong saya untuk kembali ke pertambangan. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai semampu saya memberikan, pengalaman saya di sektor pertambangan. T

RUSLAN ISHAK AZHAR/TAMBANG



Pengalaman, bahwa kehadiran pertambangan, memberikan multiplier effect hingga 8 sampai 9 kali. Inilah yang mendorong saya untuk kembali ke pertambangan. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai semampu saya memberikan, pengalaman saya di sektor pertambangan.

TIMAH

Timah. Berbekal pengalaman sebelumnya, ia tidak menanggapi dengan serius tawaran tersebut. Saat pulang ke rumah, sekitar jam 6 sore, telepon dari staf khusus tersebut datang lagi. Meminta untuk segera ke kantor Kementerian BUMN, karena sudah ditunggu Menteri BUMN.

"Saya pikir wah ini bohong, mana mungkin menteri mau menunggu sudah jam 6 sore," ceritanya.

Setelah meminta pendapat istri, ia *ogah-ogahan* ke kantor Menteri BUMN ditemani puteranya. Setiba di kantor Menteri BUMN, kondisi sudah sepi, namun masih ada mobil yang menunjukkan kalau sang Menteri masih ada di kantor.

Keluar dari *lift*, ia sudah disambut oleh orang yang meneleponnya dan langsung diperkenalkan dengan Menteri BUMN, Sofyan Djalil yang ia sendiri, belum pernah bertatap muka sebelumnya. Di sebelah Sofyan Djalil, sudah ada beberapa staf juga bagian legal. "Pak Tobing pernah di

Bangka kan," demikian tanya Sofyan Djalil ketika itu. Ia menjawab bahwa ia lahir dan sekolah di Bangka Belitung. Ia bisa menjadi seperti saat ini, karena uang dari Timah, karena orang tuanya bekerja di PT Timah.

"Nah sekarang, bapak harus mengembalikan uang timah. Bapak harus membantu perusahaan ini supaya lebih efisien dan menghasilkan," demikian ceritanya menirukan apa yang disampaikan Menteri BUMN saat itu.

Ia mencoba berargumen tetapi Menteri BUMN tetap mengatakan bahwa ia harus mengembalikan uang timah dengan mau menjadi Komisaris di perusahaan BUMN tersebut. Ketika ia mengatakan, akan mencoba, surat pengangkatan langsung diberikan dan siap untuk ditandatangani. Esok harinya, RUPS dilakukan, resmi lah Bing Tobing menjadi komisaris independen di PT Timah untuk periode 2009-2014. T



Dok. PERTAMINA

PERTAMINA-SOJITZ BANGUN PLTG DI SUMUT

VICHARIUS DIAN JIWA
vichariusdianjiwa@tambang.co.id

Krisis listrik di Sumatera Utara seringkali jadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Minimnya fasilitas pembangkit dan pembangunan jaringan transmisi yang belum usai jadi faktor penghambat yang paling berpengaruh. Kondisi ini membuat BUMN energi, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan di Sumatera Utara.

PERTAMINA tidak berjalan sendirian di proyek itu. BUMN minyak dan gas ini menggandeng Sojitz Corporation dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan kapasitas sebesar 1x250 MW. Jumat (16/10) lalu manajemen Pertamina yang diwakili Wakil Presiden Komersialisasi Gas & Sumber Tenaga Pertamina, Ginanjar, menandatangani nota kesepahaman bersama General Manager, Departemen Proyek Sumber Tenaga Sojitz Corporation, Takuji Asano, dan Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, Tasirmin Muhammad Tasya.

Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan Plt. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry

Nuradi. Dalam sambutannya Erry mengatakan, penduduk Sumatera Utara mencapai 14 juta jiwa atau terbesar keempat di antara provinsi lainnya di Indonesia. Saat ini Sumatera Utara, kata Erry, menjadi daerah strategis yang dipilih investor untuk menanamkan modalnya. Ada empat proyek strategis yang berjalan, di antaranya, proyek jalan tol Medan Binjai, Deliserdang, kawasan agro di Tanah Karo, Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Tak hanya itu, industri pariwisata pun sedang berkembang pesat dengan magnet wisata Danau Toba yang terkenal hingga mancanegara. Perkembangan industri seperti ini membuat penambahan kapasitas listrik tak bisa lagi dihindari. "Kapasitas listrik saat ini hanya 1.850 MW. Angka itu sangat pas-pasan dan tidak memiliki cadangan. Banyak industri dan hotel yang butuh listrik tapi PLN belum bisa memenuhi, bahkan kantor DPRD Medan belum dipasok listrik," kata Erry.

Erry menyambut baik rencana Pertamina dan konsorsium untuk membangun pembangkit listrik di Sumatera Utara. Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum begitu baik namun ia mengharapkan pertumbuhan fasilitas ketenagalistrikan bisa mencapai 1,5 kali lebih besar. "Kalau dalam rumusannya kan fasilitas pembangkit harus satu setengah kali dari pertumbuhan ekonomi. Saya kira hal ini bisa diterapkan pada wilayah kami," ujarnya.

Sementara itu Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan langkah Pertamina untuk berinvestasi di pembangkit merupakan bagian dari upaya perseroan

dan para mitra untuk berkontribusi nyata dalam upaya mengatasi krisis energi di pulau Sumatera. Komitmen tersebut sekaligus merupakan bentuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun, Aceh, serta pipa transmisi gas akses terbuka Arun-Belawan.

Pertamina melalui afiliasinya telah mengoperasikan fasilitas terminal Arun yang tersambung dengan pipa transmisi gas akses terbuka Arun-Belawan. Menurut Wianda keberadaannya sangat diperlukan bagi ketahanan energi dan pembangunan ekonomi di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Saat ini, melalui fasilitas tersebut Pertamina telah mengalirkan gas milik PLN untuk pembangkit listrik di Belawan dengan volume sekitar 90 MMSCFD.

Ia menambahkan sebagai badan usaha yang dimiliki negara, Pertamina ingin berperan lebih untuk dapat membantu pemerintah dan pemerintah daerah mengatasi krisis energi di wilayah Sumatera Utara. Data PLN menunjukkan, Sumatera Utara memerlukan tambahan pasokan listrik sebesar 700-800 MW untuk benar-benar terhindar dari pemadaman bergilir.

"Untuk itulah kami menandatangani nota

kesepahaman bersama para mitra untuk merealisasikan pembangunan PLTGU IPP berkapasitas 1x250 MW. Langkah ini sekaligus dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur gas yang telah kami bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Tentu saja, pembicaraan konstruktif dan penuh komitmen dengan PLN sebagai pembeli tunggal sangat diperlukan untuk merealisasikan proyek ini," terang Wianda.

Sojitz Corporation merupakan perusahaan internasional pengembang listrik swasta yang memiliki reputasi baik, dan akan berperan penting dalam pembangunan PLTGU yang direncanakan berlokasi di Medan. Sementara itu PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara merupakan salah satu BUMD di Sumatera Utara yang akan berperan dalam mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara.

"Kami menargetkan PLTGU 1x250 MW ini dapat selesai pada tahun 2019 apabila proses-proses, seperti perizinan dan pengadaan IPP dapat dilakukan dengan tepat waktu," kata Wianda. Pertamina telah mengamankan pasokan gas yang diperlukan sebagai energi primer untuk PLTGU tersebut. Total volume gas yang diperlukan untuk PLTGU ini sekitar 35 MMscfd. ■

PLTU CIREBON EKSPANSI KAPASITAS 1×1.000 MW KELAR 2020

NOVA FARIDA
nova.farida@tambang.co.id

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Ekspansi kapasitas 1×1.000 megawatt (MW) ditargetkan bisa beroperasi secara komersial (COD) pada semester I 2020. Kepastian pembangunan tersebut muncul setelah dokumen perjanjian jual beli tenaga listrik itu ditandatangani oleh PLN dan kontraktor pembangunan pembangkit, yakni Konsorsium Marubeni Corporation, Indika Energy Tbk, Samtan Co. Ltd, Korea Midland Power Co. Ltd, dan Chubu Electric Power Co. Inc.

Penandatanganan kontrak yang dilakukan pada 23 Oktober itu dilakukan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dengan Presiden Direktur Cirebon Energy Prasarana, Heru Dewanto mewakili konsorsium, di PLN Kantor Pusat, Jakarta.

"Saya mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan, serta bantuan dari PLN agar impian kita ini bisa terlaksana dengan baik. Dan akhirnya bisa menyuplai tenaga listrik yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia," ujar Heru.

Ia menjelaskan, PLTU tersebut akan dibangun di Desa Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diprediksi masa pembangunan konstruksi itu kelar dalam 51 bulan. Karena proses pembebasan lahan lebih cepat, proyek itu diindikasikan bisa selesai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. "Ini berkat kerjasama dan bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tambahnya.

Kapasitas pembangkit ekspansi tersebut, sambungnya, lebih besar dari unit yang sudah ada, PLTU Cirebon 1 x 660 MW. Pembangunan unit baru bernilai investasi Rp26 triliun ini menggunakan teknologi ultra super critical boiler, dan diklaim lebih ramah lingkungan maupun hemat bahan bakar.

Dalam satu tahun, PLTU Cirebon Ekspansi diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 6,9 tera watt hour (TWh). Listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui Gardu Induk (GI) 500 kilo Volt Mandirancan.

"Kerjasama ini semoga membawa hasil positif dan kami berharap proyek ini akan membawa hasil yang lebih baik," ujar Sofyan.

Pemerintah Indonesia pada 4 Mei 2015 lalu meluncurkan Program 35.000 MW. Dari program ini, 10.000 MW atau 35 proyek akan dikerjakan oleh PLN dan 25.000 MW atau 74 proyek mengundang pihak swasta. Beberapa proyek bagian program 35.000 MW yang siap dibangun diantaranya PLTU Lontar Ekspansi (1x315 MW), PLTGU Grati Ekspansi 450 MW, dan PLTU Cilacap 1.000 MW.

Selama 70 tahun PLN beropersi, kapasitas terpasang di Indonesia mencapai sekitar 50.000 MW. Jumlah itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang tumbuh pesat. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% per tahun dan angka rasio elektrifikasi Indonesia saat ini 84%, kebutuhan listrik tumbuh sekitar 8 hingga 9% per tahun. Untuk itu setiap tahun dibutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 7.000 Megawatt atau dalam lima tahun ke depan dibutuhkan tambahan 35.000 Mega Watt. ■



Penandatanganan kesepahaman bersama PT ANTAM (Persero) Tbk. dan PT POS Indonesia (Persero), PLT Dirut PT POS Poernomo (kiri), dan Dirut PT ANTAM Tedy Badrujaman

KERJASAMA ANTAM DAN POS

RUKMI HAPSARI
rukmi.hapsari@tambang.co.id

PT ANTAM (Persero) Tbk akan melanjutkan ekspansi bisnis emas melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero). Rencana tersebut dituangkan dalam penandatanganan Kesepahaman Bersama yang diteken Direktur Utama Antam, Tedy Badrujaman, dan Plt Direktur Utama PT POS Indonesia (Persero) Poernomo, 26 Oktober 2015, di Bandung.

Sinergi antar-BUMN, kata Tedy, akan menguntungkan kedua perusahaan. Antam memiliki produk emas yang terjamin kualitas dan kemurniannya, serta mengelola satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang terakreditasi London Bullion Market Association (LBMA –Asosiasi Pedagang Emas Batangan London), dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Adapun PT Pos Indonesia memiliki jaringan kuat di seluruh Indonesia.

"Dengan kerjasama ini masyarakat dapat lebih mudah membeli emas Antam melalui kantor Pos di seluruh Indonesia," ujar Tedy. Selama ini Antam memasarkan emasnya melalui 11 butik emas LM. Dalam rangka ekspansi bisnisnya, Antam akan segera membuka lagi butik-butik emas LM di beberapa kota besar yang potensial.

Plt Dirut PT Pos, Poernomo mengatakan bahwa dirinya merasa tersanjung bekerjasama dengan PT Antam. Ia mengharapkan kerjasama ini tidak sekadar MoU, tapi ada tindak lanjutnya, sehingga bisa dilaksanakan.

"Paling lambat Novermber bisa ditandatangani detail kerjasama ini," ujarnya.

PT Pos mempunyai 4.600 kantor di 90% kecamatan di Indonesia, dan 100% di kabupaten di Indonesia. PT Pos diakuinya baru berbenah untuk operasional dan layanan agar pelanggan bisa puas.

Emas merupakan salah satu komoditas utama Antam, selain nikel dan bauksit. Lini bisnis emas Antam didukung oleh dua tambang emas yang dikelola perseroan, yakni tambang emas Pongkor (Bogor, Jawa Barat) dan tambang emas Cibaliung (Pandeglang, Banten), serta pabrik pengolahan dan pemurnian logam mulia di Pulogadung, Jakarta Timur.

Pada tahun 2014, Antam membukukan volume penjualan emas sebesar 9,9 ton emas senilai Rp 4,93 triliun. Hingga semester 1 2015, realisasi penjualan emas termasuk perhiasan mencapai 10,9 ton, dengan nilai Rp 5,65 triliun.

Antam menargetkan, kerjasama ini meningkatkan penjualan emas domestik sebesar 30-40%. ■

MKI KUMPULNKA PEMANGKU KEPENTINGAN SUKSESKAN PROGRAM 35.000 MW

Pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan pembangkit listrik di 2015. Namun, pembangunan listrik hingga kuartal ke III tahun ini masih jauh dari target yang ditentukan, yakni 3,8 gigawatt (GW). Di bawah pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, Indonesia tengah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur strategis yang sedang dilanjutkan adalah kelistrikan.

Hal inilah yang mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor kelistrikan. Sebagaimana yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pembangkit listrik hingga kuartal ke III 2015 hanya 1,6 gigawatt (GW) jauh dari target yang ditentukan.

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Supangkat Iwan Santoso, mengatakan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan di sektor ketenagalistrikan, perlu ada dorongan yang kuat dari pelaku dan pemangku kepentingan untuk merealisasikan pembangunan ketenagalistrikan 35.000 Megawatt.

Sebab itu, untuk ikut serta sukseskan pembangunan ketenagalistrikan 35.000 Megawatt, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia pada 3 sampai 5 November 2015 lalu menggelar acara Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional ke 70 di Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai.

Menurutnya, kegiatan seminar ini ditujukan guna memberikan 'inspirasi' bagi semua pemangku kepentingan dalam mendukung program pemerintah dalam pembangunan sarana ketenagalistrikan nasional sebesar 35.000 Megawatt dengan mengusung tema 'Kedaulatan Energi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan'.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum yang kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya di bidang energi. Acara ini dikuti lebih dari 500 peserta yang berasal dari semua pemangku kepentingan ketenagalistrikan yang berkiprah di Indonesia, baik pemerintah, swasta, maupun akademisi yang terdiri dari jajaran eksekutif, pimpinan industri, profesional dan personil teknik dari seluruh Indonesia. Serta 48 peserta pameran yang terdiri dari perusahaan terkemuka bidang energi dan ketenagalistrikan, asosiasi terkait, dan perguruan tinggi.

Kegiatan seminar dan pameran ini juga menampilkan kemampuan industri dalam negeri, kompetensi SDM, efisiensi, teknologi terkini. Menurut Sri Andini Ketua Panitia Seminar dan Pameran, hal ini dilakukan dalam rangka membangun kemitraan jangka panjang bagi para pelaku industri di tanah air dan

menunjang perkembangan kemajuan industri ketenagalistrikan dalam negeri di masa depan.

Acara yang juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, dan Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri, sukses dijalankan dengan baik.

Sri Andini berharap, rangkaian acara Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional ke 70 diharapkan dapat menghasilkan pemikiran guna menumbuh kembangkan industri ketenagalistrikan di Indonesia. "Karena forum ini dinilai sangat tepat untuk melakukan komunikasi, tukar pikiran dan kerjasama diantara para eksekutif, pimpinan industri, profesional, akademisi dan personil teknik di seluruh Indonesia," ucapnya

Tidak hanya itu, pameran ini juga ditujukan untuk membantu terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia, dan lebih luas lagi, mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia, mengingat kapasitas proyek yang besar, termasuk pemanfaatan komponen dalam negeri.

Perlu diketahui juga, fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam menggenjot pembangunan infrastruktur ditujukan guna menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Pemerintah percaya, bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari kegiatan penunjang utama sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi yang bakal mendorong pembangunan ekonomi Negara dan terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera. ■





TANTANGAN BISNIS HULU MIGAS : HOW TO SURVIVE?

Oleh: Eko Setiadi *)

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam penting yang dimiliki Indonesia. Di samping sebagai sumber pasokan energi dan bahan bakar bagi masyarakat, serta bahan baku (*feedstock*) bagi industri, pengelolaan sumber daya alam migas merupakan sumber penerimaan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak. Pada dekade 1970-1980-an, kontribusi minyak dan gas (migas) mencapai sekitar 70% dari total penerimaan negara.

Lifting minyak di periode tersebut masih cukup tinggi, bahkan mampu mencapai produksi sebesar 1,65 juta barel per hari (bopd) di tahun 1977. Namun, dua dekade terakhir, produksi minyak Indonesia menurun tajam, seiring menurunnya jumlah cadangan migas. Dari produksi minyak 1,4 juta bopd di tahun 1998, terus menurun hingga di bawah 1 juta bopd di tahun 2007 sampai hari ini.

Persentase penerimaan dari migas saat ini sekitar 20% terhadap keseluruhan penerimaan negara dalam APBN. Target produksi/*lifting* minyak nasional, harga minyak dan kurs tukar rupiah terhadap dolar Amerika, masih merupakan bagian dari asumsi utama dalam penyusunan APBN. Turunnya *lifting* minyak disertai anjloknya harga minyak mentah setahun terakhir ini, membuat kontribusi sektor hulu migas juga berkurang secara drastis.

Dalam APBN-P 2015, PNBP sektor hulu migas ditargetkan berkontribusi sebesar US\$ 14,9 miliar, sedangkan realisasi pada semester I tahun 2015, sebesar US\$ 7 miliar. Per 30 Juni 2015, *lifting* minyak bumi tercatat sebesar 763 ribu bopd atau 92,6% dari target APBN-P 2015 sebesar 825 ribu bopd. *Lifting* gas bumi sebesar 6.587 juta kaki kubik per hari (mmscfd) atau 96,4% dari target 7.079 mm scfd.

Kebijakan Meningkatkan Produksi Migas

Kegiatan eksploitasi sumber daya alam, termasuk migas, memiliki karakteristik berupa terjadinya penurunan alamia setelah jangka waktu tertentu. Beberapa tahun terakhir, produksi migas turun cukup tajam, disebabkan oleh sebagian besar (sekitar 90%) lapangan produksi yang ada adalah lapangan tua. Laju penurunan alamia rata-rata di sebagian besar lapangan produksi, sekitar 16% per tahun. Penambahan produksi dari lapangan baru, tidak bisa mengimbangi laju penurunan produksi.

Tanpa upaya pengembangan lapangan migas baru dan optimasi produksi pada lapangan eksisting, produksi minyak berkurang sekitar 110 ribu bopd setiap tahun. Diperlukan tiga langkah prioritas terkait kegiatan operasi & produksi migas, yaitu: 1. Upaya peningkatan produksi dari

lapangan eksisting; 2. Percepatan produksi lapangan baru atau yang sedang dalam tahap pengembangan; 3. Peningkatan jumlah cadangan migas.

Pemerintah melalui Inpres Nomor 02 Tahun 2012 sudah mengeluarkan arahan dan kebijakan untuk meningkatkan produksi migas nasional. Beberapa kebijakan strategis terkait sektor hulu migas yang langsung terkait dengan upaya peningkatan produksi, yaitu:

- Melakukan inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang menghambat upaya peningkatan produksi minyak bumi nasional, serta mengusulkan perubahan peraturan tersebut;
- Mendorong optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerja sama dan kebijakan terkait lainnya;
- Menyelesaikan permohonan rencana pengembangan (*plan of development*) I paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya usulan lengkap dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Koordinasi dengan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian hambatan produksi migas.

Kebijakan konkret yang ditujukan ke SKK Migas, yaitu: mempercepat proses persetujuan rencana pengembangan (POD), *work plan & budget* (WP&B), *authorization for expenditure* (AFE), dan pengadaan barang & jasa. Pemerintah juga mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan efisiensi operasi dan optimasi fasilitas produksi, optimalisasi lapangan produksi dan pengembangan lapangan dengan memanfaatkan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR), mempercepat produksi dari lapangan baru, pengembangan lapangan marginal, dan optimalisasi/re-opening sumur-sumur tua (*suspended well*).

Kebijakan strategis di atas, dapat dimanfaatkan sebagai payung regulasi dan mendukung langkah strategis perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan merosotnya harga minyak.

Tantangan Bisnis Hulu: How to Survive?

Merosotnya harga minyak mentah sejak pertengahan tahun 2014, amat telak menghantam industri hulu migas. Harga spot minyak brent US\$ 108 /barel di Juli 2014, turun hingga US\$ 49 per barel di akhir Oktober 2015. Pada

hal biaya produksi perusahaan minyak di Indonesia, sekitar US\$ 20-25/barel. Merosotnya harga minyak mentah dan gejolak ekonomi dunia membuat anjlok laba perusahaan minyak.

Harga minyak mentah ditentukan oleh dinamika pasar atas pasokan dan permintaan. Hal tersebut jauh di luar kendali perusahaan minyak itu sendiri. Menghadapi tekanan di atas, perusahaan minyak harus merumuskan strategi agar tetap selamat dengan tetap berupaya meningkatkan produksi dan langkah efisiensi seluruh kegiatan operasi.

Kebijakan yang diambil beberapa perusahaan minyak, antara lain: BP memotong anggaran belanja modal sebanyak US\$ 2 miliar, memangkas ribuan rencana kegiatan di seluruh dunia. Shell menunda proyek pembangunan kilang petrokimia senilai US\$ 6 miliar di Qatar. Chevron menjual assetnya senilai US\$ 15 miliar dan memangkas belanja modal sebesar US\$ 35 miliar di tahun 2015.

Grafik biaya produksi berdasarkan jenis minyak yang dihasilkan menunjukkan bahwa minyak konvensional masih bisa selamat dengan harga jual minyak mentah saat ini. Namun produksi dari minyak tidak konvensional, seperti: EOR, *deepwater*, *oil shales*, dan minyak dari teknologi *gas to liquids* dan *coal to liquids*, menjadi sangat tidak ekonomis dihadapkan dengan harga jual minyak mentah tersebut. Biaya produksinya di atas harga jual.

Menghadapi tantangan tersebut, maka beberapa langkah "Survive Strategy" yang dapat dilakukan perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, yaitu:

Optimalisasi Produksi. Ketika harga minyak masih di level US\$ 90-100/bbl, produksi minyak digenjot untuk mengejar laba, dengan biaya berapa pun, karena harga jual minyak masih jauh di atas biaya produksi. Dengan harga minyak turun di level US\$ 40-50/bbl, maka upaya optimalisasi produksi adalah prioritas utama yang bisa dikerjakan, sehingga produksi bisa diatur pada level optimum dengan biaya produksi yang masih ekonomis.

Perusahaan harus mereview secara detail setiap zона lapisan produksi, untuk mengidentifikasi potensi *subsurface*, sekaligus menghitung biaya produksi setiap lapangan. Lapangan dengan biaya produksi yang besar dengan tingkat produksi marginal, bisa ditunda untuk sementara, menunggu keekonomian lapangan positif. Lapangan produksi yang masih prospektif, diupayakan peningkatan produksi dengan *infill drilling*, kegiatan *workover*, maupun *well services*.

Perusahaan harus memastikan semua biaya yang dikeluarkan adalah tepat sasaran. Perusahaan bisa meningkatkan keuntungan dengan cara memangkas biaya yang tidak berdampak signifikan terhadap operasional. Langkah taktis yang dilakukan, yaitu: evaluasi keekonomian dan *review* rencana kegiatan dan biaya operasi. Melundur atau membatalkan proyek-proyek dengan biaya investasi yang besar namun berisiko tinggi, atau melanjutkan proyek tersebut dengan tingkat kepastian hasil maksimal. Negosiasi kontrak *services*, peningkatan kinerja aset, efisiensi organisasi menjadi lebih ramping dan lincah.

Dorongan laba. Penerimaan dari bisnis gas harus dioptimalkan, karena harga gas tidak diserahkan pada mekanisme pasar seperti harga minyak mentah, melain-

KONTRIBUSI HULU MIGAS PERIODE TAHUN 2009 – 2014



kan ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pemetaan peluang harus dilakukan untuk menambah penerimaan dari potensi gas di seluruh aset. Masih banyak gas yang terpaksa dibakar karena rendahnya permintaan atau ketiadaan pembeli.

Renegosiasi kenaikan harga gas untuk kontrak gas yang akan berakhir, mempercepat komersialisasi gas yang sudah memiliki perjanjian penjualan gas (GSA), penyelesaian *Place Into Services* (sebagai syarat cost recovery), mempercepat persetujuan *Plan of Development* (POD)-khususnya lapangan gas, dengan tujuan percepatan pembangunan fasilitas produksi sehingga mempercepat *on stream*.

Untuk mendorong peningkatan nilai tambah, perusahaan harus punya cara pandang terintegrasi, bahwa setiap kegiatan migas tidaklah berdiri sendiri, melainkan satu rantai proses bisnis yang utuh dan saling terkait dan mampu menciptakan "nilai tambah" dari setiap rantai bisnis tersebut. Contohnya: sinergi antar KKKS, konsorsium rig, pengadaan bersama, *material transfer agreement*, dan POD terintegrasi.

Indikator sejauh mana efektivitas "survive strategy", dapat diukur dengan membandingkan biaya produksi sebelum dan setelah langkah-langkah tersebut dilakukan.

Meski anjloknya harga minyak mentah sudah terjadi beberapa kali, dan dianggap sebagai siklus bisnis yang normal untuk kemudian kembali ke harga sebelumnya, namun sebagian besar kalangan perminyakan internasional menyebutkan bahwa merosotnya harga minyak setahun ini akan cukup lama untuk terkoreksi. Ada yang menyebut bisa sampai 2-3 tahun ke depan.

Oleh karena itu, dengan memahami lanskap bisnis hulu migas saat ini yang sangat dinamis, iklim bisnis yang mudah berubah, dan tak lagi mudah diprediksi, sektor hulu migas Indonesia diharapkan bergerak cepat memformulasikan strategi peningkatan produksi yang optimal, dikombinasikan dengan upaya-upaya "cost effectiveness".

^aBekerja di PT Pertamina Hulu Energi, sebagai Analyst Strategic Planning & Portfolio Evaluation – Planning, Project & Risk Management. Tulisan ini merupakan opini pribadi.

SUARA MOZART DI ISTANA MATAHARI TIMUR

ALAMSYAH PUA SABA
alam@majalah Tambang.com

Kesultanan Siak di Kabupaten Siak Indrapura, Riau, menjalankan pemerintahan berdasar agama Islam. Luwes bergaul dengan bangsa Eropa dan masyarakat Tionghoa. Di istana, masih tersimpan alat pemutar musik klasik dari Jerman, dan lukisan asli Napoleon. Datanglah ke istana Siak, selami kejayaannya.

Ika berkunjung ke Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, sempatkanlah bertandang ke Siak Sri Indrapura, ibukota Kabupaten Siak. Di sini kita bisa menyelami sejarah dan situs peninggalan salah satu kerajaan Melayu terbesar itu. Istana Siak, lazim disebut sebagai Istana Asherayah Al-Hasyimiyah, mulai dibangun pada 1889. Ia menjadi tujuan utama saya ketika menyambangi Siak Indrapura.

Jarak ke Siak dari Pekanbaru sekitar 135 kilometer. Perjalanan dapat ditempuh melalui jalur darat ataupun sungai. Dahulu, perjalanan darat bisa ditempuh sekitar empat jam. Demi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau pada 2013, jalan baru menuju Siak dibangun di lintasan kendaraan pengangkut sawit. Kini, dalam dua jam saja, pelawat sudah tiba di Siak.

Jauh lebih singkat, karena kendaraan tak perlu naik kapal untuk melewati sungai ketika tiba di Perawang. Di lokasi itu kini berdiri megah jembatan Sultan Sarif Hasim, yang diresmikan pada 2011.





Jembatan Sultan Syarif Hasim, Riau yang dibangun pada 2005

Jembatan Sultan Sarif Hasim mulai dibangun pada 2005, menjadi jembatan kedua terbesar dan terpanjang di Riau, setelah Tengku Agung Sultanah Latifah yang juga terletak di Siak. Jembatan ini diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 2007.

Memasuki daerah Perawang, kiri kanan jalan tak hanya ramai oleh pohon sawit. Kita disuguh peremandangan pipa minyak atau gas berukuran raksasa. Maklum, Siak merupakan daerah penghasil minyak dan menjadi lokasi beroperasinya wilayah kerja Coastal Plains and Pekanbaru Blok (Blok CPP), yang dikelola bersama (BOB) antara PT Burmi Siak Pusako (BUMD) dan PT Pertamina (BUMN). Wilayah kerja migas ini sebelumnya dikelola oleh PT Caltex Pacific Indonesia, perusahaan Amerika yang kini beralih nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia.

Perjalanan ke Siak juga bisa ditempuh melalui jalur sungai. Pelabuhan Sungai Duku di Pekanbaru, menjadi awal perjalanan menuju istana Siak. Ada sensasi berbeda ketika menggunakan perjalanan sungai ini.

Seringkali di tengah perjalanan, kita akan berpapasan dengan kapal berukuran raksasa yang mengangkut produksi perusahaan kertas. Gelombang air sungai dari kapal besar membuat goyangan cukup kencang di kapal lain yang berpapasan.

Sungai Siak sejak masa kerajaan menjadi bagian penting dan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Siak. Sungai Siak menjadi jalur utama berbagai produk perdagangan mulai dari kapur barus, timah, emas serta juga jalur eksportir kayu untuk pembuatan kapal serta bangunan. Di masa lalu, kedalamannya mencapai 30 meter. Akibat pengendapan, di sebagian ruas, kedalamannya kini tinggal 18 meter.

Setelah sekitar dua jam melewati sungai selebar 300 meter ini, kita akan tiba di pelabuhan Siak. Istana Siak berjarak 500 meter dari pelabuhan itu. Di depannya, kita bisa melihat jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, kokoh berdiri. Jembatan dengan panjang lebih dari 1 kilometer dan lebar 17 meter ini juga tujuan penting ketika menyambangi Siak Indra Pura.

Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan Melayu Islam yang didirikan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung. Beberapa catatan sejarah menyebutkan,

Kesultanan Siak, memiliki relasi yang kuat dengan Kerajaan Johor, Malaysia. Kesultanan Siak pernah hadir sebagai kerajaan bahari yang kuat dan diperhitungkan di pesisir timur Sumatera hingga semenanjung Malaya, di tengah kuatnya penjajahan bangsa Eropa.

Jangkauan kekuasaannya menyebar sampai ke Sambas, kini masuk Provinsi Kalimantan Barat. Kesultanan Siak juga menjadi pengendali jalur pelayaran antar Sumatera dan Kalimantan. Kesultanan Siak merupakan kerajaan pertama di luar Jawa yang mengakui dan bergabung dengan Republik Indonesia. Inisiatif tersebut dilakukan oleh Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II, yang kemudian diabadikan sebagai nama bandara di Pekanbaru.

Kesultanan Siak identik dengan Islam. Orang Siak selama ini dikenal sebagai orang yang ahli dalam agama. Di wilayah Sumatera secara umum, seseorang yang tekun dan taat beragama, sering dipanggil sebagai orang Siak. Di semenanjung Malaya, penyebutan Siak digunakan untuk jabatan seseorang dalam urusan agama Islam.

Istana Siak Sri Inderapura dibangun pada 1889-1893, merupakan kediaman resmi Sultan Siak pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim. Istana ini juga memiliki julukan Istana Matahari Timur. Luasnya 32.000 meter persegi, terdiri atas empat istana: Siak, Lima, Padang, dan Baroe. Istana Siak merupakan kediaman sultan dan keluarga, luasnya 1.000 meter persegi.



Patung yang menggambarkan suasana rapat antara sultan & pegawai kerajaan





ALAMSYAH PUASABA/TAMBANG

Istana Siak merupakan perpaduan antara arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Bangunannya terdiri dari dua lantai. Di lantai bawah, kita bisa menjumpai ruang tunggu tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, dan ruang tamu perempuan. Satu ruangan lain di samping kanan merupakan ruang sidang kerajaan yang juga dipakai sebagai ruang pesta.

Lantai atas terdiri dari sembilan ruangan, berfungsi sebagai ruang istirahat Sultan serta para tamu istimewa. Di puncak bangunan terdapat enam patung burung elang, simbol keberanian. Ketajaman matanya merupakan gambaran kewaspadaan dalam mengintai gerak-gerik musuh. Di halaman istana, delapan meriam kokoh berdiri mengelilingi semua sisi istana. Di sebelah kiri belakang, terdapat bangunan kecil yang dahulunya digunakan sebagai penjara sementara.

Riuh pengunjung akan terasa jika musim libur tiba atau di akhir pekan. Saat menyambangi Istana Siak setelah lebaran Idul Fitri 2015 lalu, ratusan pengunjung memadati hampir semua sisi istana. Baik di lantai dasar



Pengunjung tengah melihat meriam & foto-foto peninggalan Kesultanan Siak

ataupun di lantai dua, serta di halaman istana. Karcis masuk pun tidak mahal, hanya Rp 6.000 per orang. Sebanyak 15 petugas siap memberi informasi dan menjelaskan seluk beluk istana dan isinya.

Di dalam istana, terdapat beberapa patung yang menggambarkan suasana sidang yang dipimpin Sultan. Di hadapannya, duduk berhadapan para petinggi, mengenakan pakaian khas kesultanan. Di sebelah kiri patung pertemuan tersebut, terdapat meja makan dari kristal. Di sisi kiri dan kanan, 12 kursi makan dari kristal mengapitnya.

Di ruang kristal itu, beberapa cermin digantung di dinding. Cermin tersebut memiliki banyak fungsi, sebagai pemantul cahaya, sekaligus untuk "mata-mata" yang mengamati gerakan tamu di wilayah tersebut. "Mungkin sekarang seperti CCTV," kata seorang petugas.

Beberapa peninggalan kerajaan seperti meriam ataupun persenjataan yang biasa dipakai masa itu juga dipajang. Dokumentasi berupa foto-foto Sultan, khususnya sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dibingkai dengan rapi dan dipajang, disertai keterangan.

Masih di lantai I, pengunjung juga bisa melihat kursi singgasana Sultan yang konon terbuat dari emas murni 24 karat. Pakaian yang biasa dipakai Sultan juga dipajang di dalam bingkai kaca.

Di bagian tengah, dekat tangga menuju lantai dua, sebuah lemari besi hitam berdiri kokoh. Di dalam lemari besi tersebut, kabarnya, terdapat banyak rahasia dan pesan Sultan untuk rakyatnya. Tidak ada yang tahu pasti, apa saja isinya. Sejak awal, lemari tersebut tidak pernah bisa dibuka, meski telah dicoba dengan berbagai upaya.

Ada juga gendang tua yang ditutupi kain kuning, yang umurnya ratusan tahun. Gendang itu biasanya ditabuh saat pelantikan sultan, terakhir dikendang saat pelantikan Sultan Syarif Qasim II menjadi Sultan Siak pada 1914. Setelah Sultan Syarif Qasim II wafat, tidak ada lagi pengangkatan Sultan. Sejak saat itu, genderang ini tidak lagi dibunyikan.

Ada juga patung perunggu penguasa Kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina. Patung tersebut merupakan pemberian Kerajaan Belanda untuk Sultan. Koleksi lainnya yakni patung raja dari batu pualam bertatahkan berlian. Patung yang dibuat pada 1889 tersebut,



ALAMSYAH PUASABA/TAMBANG



Komet, salah satu alat musik yang tersedia didalam Istana Siak.

merupakan peninggalan Sultan Syarif Hasim I.

Jika ingin ke lantai dua, sebuah tangga baja berwarna kuning melingkar berdiri di ruangan tengah. Terdapat banyak ruangan ang dahulu dipakai sebagai ruang keluarga. Beberapa benda peninggalan dipajang di sini. Mulai dari peralatan masak yang terbuat dari kuningan, foto keluarga kerajaan, sampai foto Ratu Wilhelmina juga ada.

Sepatu permaisuri serta beberapa baju kebal dengan tulisan arab juga ikut dipajang. Juga terdapat lukisan asli Napoleon, yang konon dibawa saat Sultan bermuhibah ke Paris. Di sini juga terdapat maket kegiatan eksplorasi minyak ang dilakukan oleh Stanvac Oil, perusahaan minyak yang melakukan kegiatan eksplorasi minyak di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Sumatera.

Persentuhan dengan bangsa Eropa, baik Belanda ataupun Jerman ikut mempengaruhi selera musik Sultan. Terdapat gramofon, peninggalan Sultan Siak XI, Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil. ia membeli pemutar musik itu langsung dari Jerman, ia bawa sekembalinya dari lawatan pada pada 1896.

Alat musik itu mereknya Komet, tingginya 3 meter dengan lebar 1 meter, merupakan edisi terbatas. Hanya ada dua di dunia. Sebuah berada di Jerman, satu lagi di Siak. Musik klasik milik Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Richard Strauss bisa didengarkan dari gramofon raksasa tadi.

Suara musik berasal dari piringan hitam besi berbentuk lingkar dengan diameter sekitar 90 cm. Piringan baja hitam tersebut permukaannya tidak rata, seperti sisa pahatan. Dari lubang-lubang seperti sisa

pahatan itu, suara indah dan merdu tercipta. Lebih dari 10 piringan baja hitam tersedia.

Alat tersebut masih terawat dengan baik dan masih bisa berfungsi. Hanya saja, Komet diputar pada momen-momen tertentu, semisal kunjungan pejabat negara.

Setelah puas mengunjungi Istana Siak, tidak jauh dari lokasi tersebut atau dekat dengan pelabuhan, terdapat masjid dengan corak hijau dan kuning. Masjid Syahabuddin namanya, merupakan masjid kerajaan yang dibangun pada era Sultan Kasim I.

Di belakang masjid, ada makam Sultan Syarif Qasim II, Sultan Siak terakhir yang meninggal pada 23 April 1968. Makam tersebut berbentuk empat undakan yang terbuat dari tegel dan marmer. Nisan makam Sultan terbuat dari kayu bermotif suluran dengan bentuk bulat silinder, ujungnya berbentuk kelopak bunga teratai.

Selain itu, kita juga bisa temui sebuah monumen kapal dengan panjang 12 meter dan berat 15 ton. Kapal tersebut adalah kapal Kato, kapal besi berbahan batu bara merupakan kapal milik Sultan Siak yang biasa digunakan untuk berkunjung ke daerah kekuasaannya.

Pengunjung juga bisa bertandang ke balai karapatan. Bangunan bertingkat dua tersebut berdenah persegi empat dengan tiang utama berupa pilar berbentuk silinder. Lantai bawahnya terdiri dari tujuh ruang dan lantai atas tiga ruang. Bangunan ini menghadap ke arah sungai, dulu berfungsi sebagai tempat pertemuan atau sidang Sultan dengan panglimanya.

Pecinan

Tak jauh dari istana Siak, terdapat permukiman Tionghoa. Pecinan, demikian istilah yang disematkan untuk perkampungan tersebut.

Suasana Tionghoa kental terasa, mulai dari arsitektur bangunan dan warna merahnya yang khas. Lokasi permukiman sangat dekat dengan sungai yang menjadi denyut ekonomi warga Siak sejak masa kesultanan dahulu.

Warga Tionghoa sudah berada di Siak sejak penghujung abad-19. Cerita yang beredar, pembangunan Istana Siak juga memberdayakan warga Tionghoa tersebut. Di situ terdapat kelenteng Hok Siu Kiong, yang usinya lebih dari 200 tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, menyadari bahwa kehadiran Pecinan merupakan daya tarik lain wisatawan jika berkunjung ke Siak. Karena itu, Pemda Siak membangun perkampungan Cina di Siak Indapura.

Rumah dipugar, juga dicat ulang, sehingga lebih tertata dengan baik. Untuk menambah sentuhan Melayu, bangunan khas berwarna merah kemudian dipoles dengan cat berwarna kuning dan hijau sebagai warna khas Melayu. Perpaduan warna tersebut juga menggambarkan hubungan baik dan terpelihara selama ini antara warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi Siak.

Di kawasan Pecinan itu, terdapat kedai kopi yang khas dan terkenal nikmat. Jangan lupa mencicipinya. Ornamen khas Cina menjadi dekorasi dalam kedai tersebut. Kedai-kedai kopi itu kebanyakan merupakan warisan dari orang tua mereka. ■

NAHKODA BARU PERHAPI



Kongres IX Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Gedung Bidakara, Jakarta, memutuskan Tino Ardhyanto A.R. menjadi Ketua Umum PERHAPI periode 2015-2018. Tino mengantongi 151 suara. Ia mengalahkan Rizal Kasli yang mendapat 127 Suara.

Tino adalah direktur pemasaran PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, perusahaan pengangkutan dengan kapal laut di bawah kelompok Indika. Tino adalah alumni Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB), University of Denver Master of Business Administration (MBA), dan Colorado School of Mines Master of Engineering - Engineer of Mines (M.Eng.-EM). T

BRIGHT GAS 5.5 KG

PT Pertamina (Persero) meluncurkan Bright Gas dalam kemasan baru berukuran 5,5 kg, 23 Oktober lalu di Jakarta. Gas yang dikemas dalam tabung berwarna pink ini dijual promo di pompa bensin dan pasar modern dengan harga Rp 66 ribu per tabung.

Bright Gas 5,5kg merupakan varian baru yang akan melengkapi kemasan yang telah ada di pasar yaitu Bright Gas 12 kg. Kemasan baru lebih ringan, enteng diangkat, sekalipun oleh ibu-ibu.

Peluncuran Bright Gas 5,5kg kepada PT Pertamina Retail dihadiri oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang. T



SUNWARD BUKA KANTOR DI INDONESIA



PT SUNWARD, produsen alat berat asal Cina, awal bulan lalu resmi membuka kantor perwakilannya di Indonesia. PT Sunward Indonesia Machinery, demikian nama lengkapnya, akan serius membuka pasar alat berat di Indonesia. Pembukaan dilakukan oleh He Qinghua, Chairman dan CEO Sunward Group, didampingi jajaran manajemen. T

TOTAL GELAR LATIHAN PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK



Total E&P Indonesia (TEPI), operator Blok Mahakam, mengadakan Latihan Skala Besar 2015 berjudul "Penanggulangan Tumpahan Minyak – TIER 2" (tumpahan lebih dari 1.000 barel), pada Selasa (3/11).

Latihan ini melibatkan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Chevron – karena berada di wilayah area 6 (Area simulasi), SKK Migas, dan pemerintah daerah. Kegiatan ini melibatkan lebih dari seratus personil.

"Latihan besar ini diadakan dengan tujuan, antara lain untuk menguji kesiapan dan respon dari tim TEPI Emergency Organization terhadap situasi darurat, menguji efektifitas komunikasi antar Sites, TIEC (Total E&P Indonesia Emergency Committee) / MRT (Management Response Team), JHOEC (Jakarta Head Office Emergency Cell), dan kantor pusat, dan menguji intervensi bantuan pihak luar dalam penanggulangan tumpahan minyak TIER 2," jelas Hardy Pramono, President & General Manager Total E&P Indonesia. T

OLIMART DI SPBU

P Pertamina Lubricants bekerja sama dengan PT Pertamina Retail membuka Bright Olimart Modular (BOM) di SPBU Coco Cakung, Jl Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur, Senin (26/10/2015).

Menurut Andria Nusa, Director Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants, dioperasikannya titik pelayanan ini adalah wujud komitmen perusahaan minyak negara ini dalam melayani konsumen. Rencananya, ada sembilan Bright Olimart lagi yang dibuka tahun ini di SPBU milik PT Pertamina Retail.

Bright Olimart Modular memberikan layanan kepada pemilik kendaraan untuk ganti oli, servis ringan, isi ban dengan gas nitrogen, serta perawatan ban. T



PT BERAU COAL RAIH PENGHARGAAN TINGKAT ASEAN



P T Berau Coal menjadi juara dua Pertama dalam Kategori Pertambangan batubara terbuka tingkat ASEAN. Pernghargaan ini diberikan pada acara ASEAN Coal Award (ACA) 2015 pada 8-9 Oktober 2015 yang dilaksanakan di kota Ha Long Vitenam. ACA merupakan kegiatan rutin dua tahunan yang diselenggarakan oleh ASEAN Centre for Energy (ACE).

"Prestasi ini menjadi pemicu untuk lebih baik ke depan, selalu mempu berinovasi dan menjalankan efisiensi di setiap lini perusahaan," kata Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal Gatot Budi Kuncahyo. T

CINTA MATI MERAH PUTIH

BAGI sebagian orang bendera negara, merah putih mungkin tak lebih dari sekadar bendera biasa. Namun tidak bagi Joko Pramono, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam. Ia mengaku begitu menjawai merah putih bukan hanya sebagai bendera yang wajib dikibarkan tapi sebagai pelecut semangat dan rasa cinta Tanah Air.

Itu mengapa baik saat berada di ruang kerja ataupun di rumah, Joko tak pernah ragu memasang bendera merah putih. Ia bercerita bagaimana perasaan cinta mati itu mulai tumbuh ketika ia bergabung sebagai anggota pasukan pengibar bendera (Paskibra) tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sewaktu duduk di Sekolah Menengah Atas Negeri 3, salah satu sekolah unggulan di Yogyakarta yang dikenal sebagai "Padmanaba", Joko bersama teman-temannya seringkali menghabiskan waktu untuk berlatih mengibarkan bendera. Jadwal latihan semakin padat manakala waktu pelaksanaan upacara bendera sudah semakin dekat. Namun semua latihan berat itu terbayar saat mereka berhasil melaksanakan tugas dengan sempurna.

"Ada tradisi di Paskibra sebelum melaksanakan tugas, kami harus mencium bendera merah putih. Saat itu saya bisa meneteskan air mata, bukan karena capek tapi karena berhasil menuntaskan perjuangan selama pelatihan," kata Joko saat berbagi cerita dengan Majalah TAMBANG di kantornya.

Saat melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, perasaan cinta merah putih itu masih terus berlanjut. Joko bergabung dengan klub pecinta alam yang seringkali mendaki gunung dan alam bebas. Saat itulah ia merasa semakin dekat dengan tanah kelahirannya, Indonesia.

"Jadi dari awal masa pendidikan selalu ditanamkan masalah kejuungan baik yang sifatnya bela negara maupun nasionalisme," ujarnya.

Ketika mulai bekerja secara profesional, Joko memang tak mampu lagi meluangkan waktu untuk mendaki gunung sebagai penyaluran hobi. Namun menurutnya rasa cinta terhadap merah putih belum sedikit pun luntur dari dalam hatinya. Beruntung bagi Joko bergabung di perusahaan milik negara sehingga semangat membangun bangsa masih bisa ia ekspresikan melalui pekerjaannya sehari-hari.

"Nah semangat merah putih itu harus selalu ada baik di lingkungan tempat kerja ataupun tepat tinggal. Jangan sampai lambang negara itu hilang." ■

Joko Pramono
Sekretaris Perusahaan
PT Bukit Asam
(Persero) Tbk





RESEP MI BEBAS LILIN

Rhendy Purwadi Indradjaja

Chief of Representative Office
UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

"MASAKAN favorit saya itu mi instan yang berkuah, gurih, asin dan pedas." Ini adalah kalimat Rhendy Purwadi Indradjaja, Kepala Kantor Perwakilan Uvex Safety Singapore Pte. Ltd, perusahaan penyedia alat-alat keselamatan, di Jakarta.

Berawal dari kegemarannya menyantap mi, Rhendy pun gemar memasak makanan berbahan dasar mi untuk keluarganya di rumah. Ia gemar bereksperimen memasak mi dicampur berbagai bahan baku yang mudah didapat.

Namun, karena ia meyakini di dalam mi instan terkandung bahan sejenis lilin, ia memiliki cara tertentu agar mi instan aman untuk dimakan, terutama untuk kedua anaknya.

"Air sisa rebusannya dibuang, diganti air panas biasa saat disajikan," ujarnya.

Menurutnya, mi racikannya tetap mengandung bahan yang bergizi. Karena diberi tambahan sayur-sayuran dan bahan penyempurna lainnya.

Memasak adalah kegiatannya saat berakhir pekan bersama keluarga. Saat ini ia sering ditugaskan ke luar kota. "Pekerjaan saya saat ini mengharuskan saya untuk sering bepergian, sehingga saat saya bersama keluarga saya mencoba untuk memfokuskan perhatian saya ke mereka," katanya.

Selain sibuk urusan kantor, saat ini Rhendy juga menjadi dosen tamu di Binus Business School, Jakarta. Ia mengajar di program MM Young Professional, untuk mata kuliah dasar-dasar pemasaran.

Menurut Rhendy, tak ada yang sulit dilakukan asalkan kita dapat mengatur waktu dan irama kerja. Ia juga sudah merencanakan kegiatan dan kesibukannya setelah pensiun nanti. "Saya ingin tinggal di Bali, dan membuka kafe bersama istri," katanya. ■

INGIN TERBANG LEBIH TINGGI

Prayang Sunny Yulia (Ayang)

Dosen Perminyakan
Universitas Trisakti Jakarta

Foto & Naskah:
TAUFIKERROHMANTAMBANG

a tampil di acara temu profesi tahunan XXV dan Kongres IX Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), akhir Oktober lalu. Berbaju putih dan celana berwarna hitam yang serasi, ia didapuk menjadi pembawa acara pada acara tahunan itu.

Ia bukan sekadar permandu acara. Dara cantik bersuara merdu ini adalah dosen Teknik Perminyakan Universitas Trisakti Jakarta. Di situs berbagi video paling terkenal, *youtube*, perempuan yang akrab dipanggil Ayang ini mudah Anda temukan.

Ada video yang menunjukkan ia tengah menyanyi lagu terkenal "White Christmast" versi kercong. Ada juga film ketika ia menyanyikan lagunya Katy Perry, *Unconditionally*, ketika ia mengikuti final *X-Factor* di sebuah stasiun televisi. Ketika itu ia sempat masuk menjadi finalis 12 besar.

Ayang, 24 tahun, dikenal sebagai gadis berbakat dan aktif dalam berbagai kegiatan. Ia pernah menjadi finalis Abang None Jakarta Barat dan Juara I Putri Bahari 2013.

Berkat talenta dan prestasinya, lulusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti tahun 2014 ini mendapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikan pascasarjana, di almamaternya.

"Saya juga pernah menjadi duta kampus untuk mempromosikan Trisakti ke seluruh Indonesia," kata dara kelahiran Jakarta 8 juli 1991.

Ayang merasa bersyukur dengan anugerah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Misalnya, ia dapat keliling Nusantara. November ini ia ditugaskan ke Lombok NTB untuk presentasi di sebuah seminar.

Cita-cita dara berdarah Jawa-Sunda ini pun tidak muluk-muluk. Ia hanya ingin semua profesi yang ia tekuni, baik sebagai dosen, penghibur, maupun mahasiswa S-2, bisa ia lalui dengan baik dan lancar.

"Semua serba tak disangka. Saya berharap masih bisa diberikan kesempatan untuk meraih yang lebih tinggi lagi," ujar sulung dari dua bersaudara ini. **T**



MENGUBAH RACUN MENJADI BERKAH

Malam itu namanya disebut sebagai salah satu peraih penghargaan energi 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia adalah Tjokorda Gde Tirta Nindhia, Dosen Fakultas Teknik Universitas Udayana, Bali. Oktober lalu ia menerima penghargaan prakarsa untuk kategori perseorangan.

Sebagai guru besar, Tjokorda dinilai berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pelopor pembangunan, pendorong perubahan pola pikir, serta berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kemandirian energi dengan menciptakan teknologi *desulfurizer* dan pembotolan biogas dari limbah besi bubut, biasa disebut gram besi. Teknologinya sudah dimanfaatkan 83 kelompok masyarakat ternak pembibitan sapi Bali di Provinsi Bali. Hasil kerja kerasnya itu telah berkontribusi dan berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan masyarakat sekitar.

"Awalnya saya lihat di Bali sangat banyak yang menggunakan biogas untuk memasak. Namun mereka tidak menyadari bahwa biogas itu bukan bahan bakar yang aman, karena mengandung asam sulfida (H₂S)," katanya.

Menurut Tjokorda, biogas yang mengandung H₂S berbahaya bagi kesehatan. Makanan yang dimasak menggunakan biogas berpotensi terkena racun H₂S. Dengan teknologi yang murah dan mudah, si racun bisa dihilangkan, sehingga biogasnya menjadi ramah lingkungan.

Tjokorda memanfaatkan limbah gram besi dari proses pembubutan untuk digunakan memurnikan biogas dari pengotor gas hidrogen sulfida. Limbah gram besi dikumpulkan dan dipilih yang berbentuk spiral dan panjang. Limbah bubut itu dapat digunakan untuk menurunkan kadar H₂S dalam biogas.

"Alat ini bernama *desulfurizer*. Isinya 5 kg gram besi yang diambil dari lima pabrik pembubutan," terangnya. Ia meneliti sejak 2013. Alat yang sudah dipatenkan ini juga bisa digunakan untuk industri pertambangan dan pengolahan limbah.

Ia memastikan, dengan menggunakan alatnya, bahan bakar biogas aman untuk digunakan untuk mesin genset.

"Bahan bakar biogas ini bila langsung digunakan untuk mesin genset, dapat menyebabkan oli-nya menjadi cepat asam dan menjadikan genset cepat rusak. Dengan alat *desulfurizer*, biogasnya dimurnikan dari zat H₂S, sehingga aman untuk genset," tambahnya.

Dengan alat hasil ciptaannya ini, peternak sapi bali tidak perlu khawatir untuk memanfaatkan biogas hasil dari kotoran sapinya. Jika biogas dioptimalkan, akan dapat dijangkau oleh masyarakat secara mudah dan murah. Gasnya dan pupuknya bisa digunakan. ■

Tjokorda Gde Tirta Nindhia

Penemu Alat *Desulfurizer* dan Pemenang Penghargaan Energi 2015

Foto & Naskah:
TAUFIQUERROHMAN/TAMBANG



BENDERANG DARI SAMPAH



Sampah selalu identik dengan sesuatu yang tidak berguna dan dibuang. Kalaupun hendak dimanfaatkan paling dijadikan pupuk untuk tanaman. Setiap hari, warga Jakarta bertemu dan melihat truk-truk pengangkut sampah mengangkut sampah dari Jakarta. Muaranya di Bantargebang, sebuah kelurahan dan kecamatan di kota Bekasi. Di area ini bertumpuk sampah dari berbagai pelosok Jakarta dan Bekasi.





Mengelola sampah sungguh memerlukan manajemen yang kompleks. Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bahkan sampai harus bersitegang dengan DPRD Kotamadya Bekasi, pertengahan Oktober lalu, akibat urusan sampah ini. Ia bahkan menduga ada "main mata" antara pengelola Bantar Gebang dengan anggota DPRD Kotamadya Bekasi.

Bobby, salah satu pegawai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bantargebang mengatakan, setiap hari kurang lebih 6.000 ton sampah dibuang di lokasi ini. Jumlah yang tentu saja tidak sedikit. Jika tidak diproses, sampah akan menumpuk dan membentuk gunungan tinggi.

Salah satu pemanfaatannya adalah menjadikan sampah sebagai sumber listrik. Ini dilakukan dengan menggunakan teknologi biogas seperti dilakukan PT Navigate Organic Energy Indonesia. Manager Teknik PT Navigate Organic Energy Indonesia, Bobby Roring menjelaskan, dengan teknologi biogas, sampah akan menghasilkan gas metana yang bisa digunakan untuk pembakaran.

Bobby memanfaatkan teknologi biogas untuk mengolah gas metana dari sampah zona I, II, III, dan V. Total sampah yang dimanfaatkan mencapai 4.500-5.000 meter kubik/jam. Gas metana ini berasal dari sumur buatan yang ditanam di tumpukan sampah, kemudian dialirkan melalui pipa ke 10 mesin pembangkit listrik.

Tidak semua jenis sampah bisa dimasukan. Sampah itu harus dipilah, didaur ulang, lalu ditutup dengan selimut raksasa dan diberi sirkulasi air agar proses fermentasi menghasilkan gas. Surmum-surmum yang tertanam di tumpukan sampah berfungsi untuk menangkap partikel gas agar tidak menguap di udara bebas.





"Gas metana yang dihasilkan dilihat kualitasnya menggunakan alat ukur lalu dipanaskan di dalam suhu 40 derajat celsius. Gas metana itulah yang menjadi bahan bakar pembentuk energi listrik," terang Bobby.

Hingga kini, sampah di Bantargebang masih dikelola dengan cara menumpuk, istilah lain dari *landfill*. Cara ini sudah dimanfaatkan sejak 2010 dan berjalan sampai dengan sekarang. Ada dua teknologi lain, yakni gasifikasi, dan penguraian secara *anaerob*, juga dikenal sebagai *anaerobic digestion*. Sejauh ini yang diterapkan adalah penumpukan, karena dua yang lain mendapat tantangan, terutama dari pemulung. Mereka jumlahnya ribuan, dan sudah lama menadah rezeki dari Bantargebang.





Sejauh ini pemanfaatan teknologi biogas Bantargebang baru bisa menghasilkan listrik dengan 3,5 Megawatt. Padahal rencana dari landfill gas bisa mencapai 16 megawatt. Masih banyak yang harus dilakukan agar dari Bantargebang lebih banyak dihasilkan terang. 

Foto & Teks: Ruslan Ishak Azhari



PADJADJARAN UNIVERSITY

Society of Economic Geologist Student Chapter Unpad

SEG SC Unpad merupakan seksi mahasiswa yang berada di bawah naungan organisasi internasional SEG pusat di Colorado, Amerika Serikat. SEG SC Unpad diresmikan pada tanggal 1 Januari 2009 dan merupakan student chapter SEG pertama di Indonesia juga Asia Tenggara. Visi dari SEG SC Unpad sendiri yaitu untuk mengembangkan anggota yang berkualitas, bersatu, dan profesional.

Kegiatan SEG SC Unpad sendiri berupa *study club*, forum diskusi paper ataupun poster, *gathering*, pelatihan *softskill*, *team building*, dan English Club. Untuk memperdalam materi yang telah dipelajari tersebut diadakan pula *course* dengan pembicara dari tenaga profesional dari lembaga geologi maupun perusahaan. Tidak sampai di situ saja, SEG SC Unpad juga mengadakan *fieldtrip* mengenai materi terkait untuk pengenalan dan aplikasi lapangan. Terakhir, kegiatan rutin terbesar SEG SC Unpad yang diadakan secara nasional sebagai puncak kegiatannya yaitu **HARDROCK FESTIVAL**.

Hardrock Festival

Isu melemahnya harga jual minyak mentah dan bahan tambang seperti emas, perak, dan tembaga membuat kegiatan eksplorasi sumberdaya energi di Indonesia kian melesu. Dengan berkurangnya pendapatan negara melalui produksi batubara, ditambah isu emisi penggunaan batubara yang tidak ramah lingkungan, bahkan menjadi penyumbang besar pemanasan global juga mengurangi pendapatan negara dari komoditi terbesar ekspor Indonesia ini.

Efek domino dari ‘krisis’ pada dunia pertambangan juga berpengaruh pada kegiatan eksplorasi pada perusahaan dan instansi terkait yang akhirnya terpaksa mereduksi kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja Pertambangan untuk pembukaan lapangan baru. Hal ini juga berefek kepada pemangkasan tenaga kerja

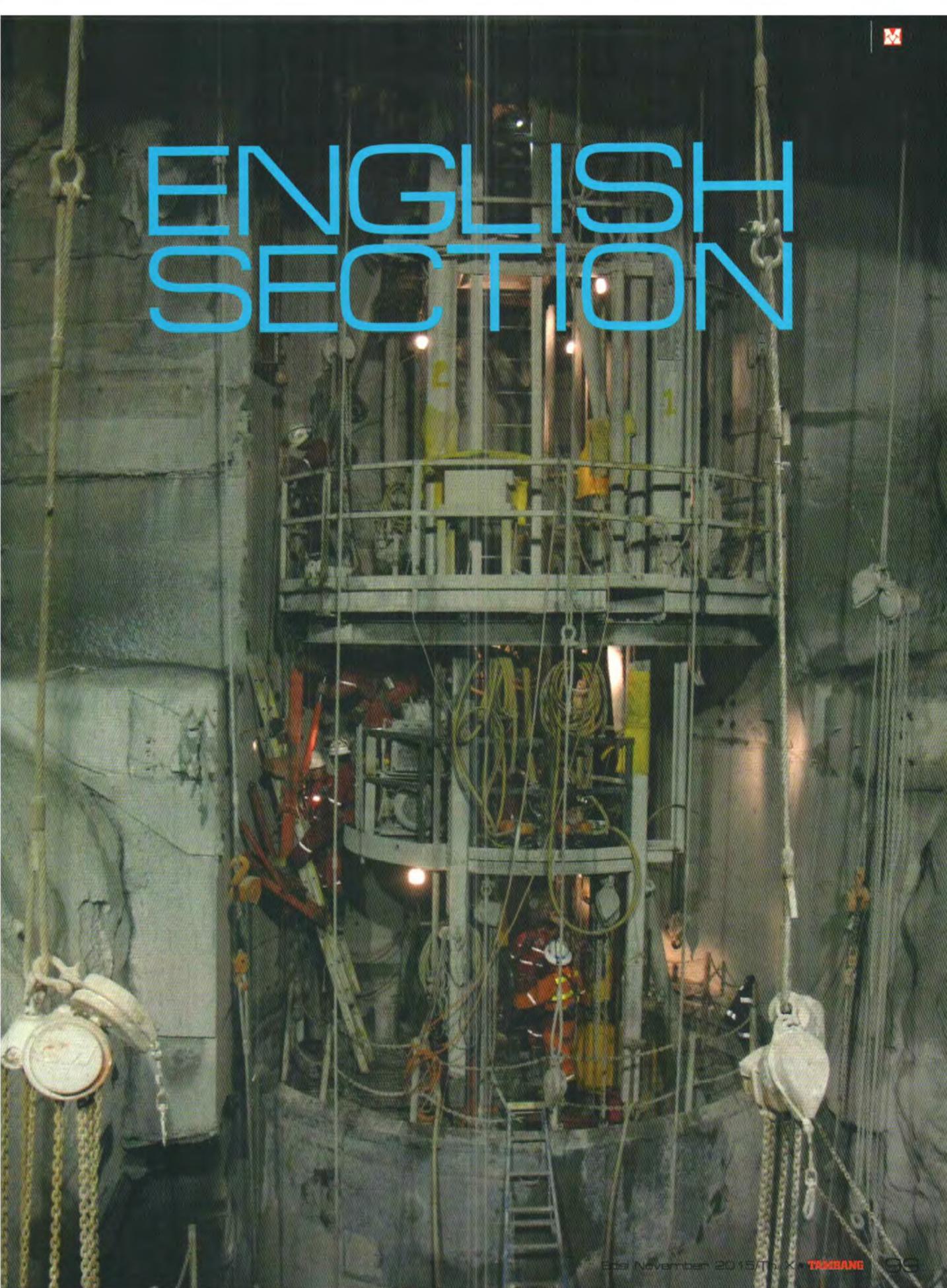
di bidang eksplorasi baik geologi, geofisika, maupun geokimia yang justru menjadi ladang kerja para geolog.

Masalah ini masih bersifat menyeluruh di belahan dunia, belum lagi ditambahnya kebijakan pemerintah Indonesia Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengharuskan perusahaan besar untuk membangun smelter demi meningkatkan nilai jual komoditi bahan tambang dari Indonesia yang siap diekspor. Hardrock Festival yang juga disingkat HRF merupakan kegiatan akhir tahun berupa seminar nasional, *fieldtrip*, serta *paper competition* yang diikuti oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dengan membahas topik yang menjadi isu hangat di bidang geologi ekonomi terutama pertambangan. Hardrock Festival juga mengundang pembicara ahli dan profesional dari berbagai instansi dan lembaga kegeologian.

Di bulan November ini, Hardrock Festival memiliki tema utama yaitu *Surviving Mining Crisis in Indonesia*. Acara ini dibuat agar peserta memiliki wawasan serta meningkatkan kepedulian tentang krisis pertambangan di Indonesia sehingga dapat memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Hal ini juga akan membuktikan bahwa generasi muda Indonesia yaitu mahasiswa memiliki perhatian tinggi dalam isu geologi ekonomi yang sedang terjadi. Dalam kegiatan seminar nasional isu ini akan dibahas oleh para ahli dalam tiga bagian sesuai wilayah potensinya, yaitu regional barat, tengah, dan timur Indonesia. Kemudian topik ini juga akan diaplikasikan langsung di lapangan dalam *fieldtrip* ke perusahaan bersama ahlinya. Sebagai hasil aplikasi pengetahuan ini, parah mahasiswa di Indonesia juga akan mempresentasikannya melalui karya tulis di *paper competition*.

Seminar nasional dan *paper competition* akan dilaksanakan di Universitas Padjadjaran kampus Jatinangor dan Bandung. Sedangkan untuk *fieldtrip* akan diadakan di tambang bawah tanah PT Cibaliung Sumber Daya, Banten. “Melalui tema ini, saya berharap agar mahasiswa/i terutama calon geologist yang menjadi penerus bangsa agar lebih peduli lagi akan isu pertambangan ini,” tambah ketua acara HRF 2015, Adinda Sovianty. Kompetisi karya tulis ini juga juga dibuat untuk menjalin hubungan yang baik antar institusi yang mendalami bidang geologi ekonomi. - (Vilia, Andhika)

ENGLISH SECTION



DIVESTMENT AND CONTRACT OF WORK

The discussions on divestment of shares of PT Freeport Indonesia have recently taken a huge portion in the media. Prior to that, another issue related to PT. Freeport, namely the extension of its Contract of Work, was also a hot topic in the media.

Freeport's ongoing contract will expire in 2021. According to existing ruling, the company can only apply for a contract extension two-years prior to the expiration of the current contract, i.e. in 2019. The company earlier proposed an extension of 10 years with flexibility in mind to provide more legal certainty.

President Joko Widodo however decided that there would be no extension given as he maintained that the extension should be made two years prior to the expiry of the current contract, in line with the provisions of the Government Regulation No. 77/2014.

Then issue of divestment followed. According to the provisions in the said regulation, until 2015, Freeport must carry out a 10 percent divestment of its shares. Later in 2019, the company's shares to be divested should reach 30 percent. Up to now, Freeport's shares that have been divested are 9.36 percent.

The polemic which has ensued has been primarily on the most effective way to divest. In accordance with the provisions of the Regulation No. 77/2014, at the time when divestment would take place, the central government would obtain the first option to be offered. Should this not be the case, the offer shall be directed to state-owned enterprises, prior to be offered to national private companies.

Another option came to surface, namely through Initial Public Offering, as it is considered more transparent.

However, such an option was not stipulated in the Government Regulation No. 77/2014.

Should the divestment be carried out via an IPO, then of course the main objective of the divestment, namely to encourage participation of national companies, would not be achieved.

Actually, it should not be really a matter who should get the shares, be it the government, the public or any private enterprises nationwide, so long as it has an integrity and it does not represent any foreign interests.

The participation in the ownership by a national entity would be a necessity. However, the operation or the management of operation could be done by anyone, including by Freeport as a mine operator.

What should become a common concern is the aspect of supervision, of how companies should be bound by the contracts with the government, whether the cooperation would be mutually beneficial and just, so that mining activities could be properly carried out and there would be no negative impacts on the environmental management.

The potentials of the natural resources owned by Indonesia must always be utilized for the greatest possible benefit of the people and the nation of Indonesia, as mandated by the 1945 Constitution.

Long live Indonesian mining! T

Herman Afif Kusumo

PROMISE FROM ARIZONA FOR PAPUA

The Indonesian government has made sure that any decisions taken from the discussion on the extension of operating license post-2021 will bear consequences.





RUSLAN ISHAK AZHARI/TAMBANG

EGENIUS SODA
egenius@magazintambang.com

As of now, the fate of PT. Freeport Indonesia's operating license post-year 2021 remains unclear. The Government through Minister of Energy and Mineral Resources Sudirman Said had suspended the granting of the extension of the operating license for the Phoenix, Arizona-based mining giant. The Government maintained that the current operating license would be valid until 2021, and in accordance with the existing regulations, the contract extension could only be given by 2019.

The government had also ensured that a revision to the Government Regulation (PP) No. 77/2014 on Activities of Mineral and Coal Mining would be carried out after the revision to the Mining Law. Although part of this year's national legislation program, given the very limited time remaining, most likely the revision to the Mining Law would not happen this year.

Time, however, should not be the issue here. Even if Freeport applies for the extension now, the decision would still be at the government's hands. Mining analyst R. Sukhyar was of the opinion that when deciding on operating license extension, not contract extension, the government should only look at the company's performance and compliance to the mandate of the Mining Law as well as other relevant regulations.

Mr. Sukhyar reminded that in the first MoU signed in 2014, it was clearly stipulated that the government would not impede any means to contract extension. However, all that would still be subject to the government's approval. "Approval will be granted if Freeport can meet its obligations, such as the six aspects stated during the renegotiation (of contract) and the expansion in the second MoU," he said.

Mr. Sukhyar retired from the position of Director General of Mineral and Coal of the ESDM Ministry last May. As the Director General, he was previously involved in negotiations with Freeport. He recalled that his team had to repeatedly consult with prosecutors and legal officers to ensure conformity with the existing regulation. "This was done to ensure that the language in the MoU does not conflict with that in the Mining Law," Mr. Sukhyar told reporters.

He looked assured when stating that during the negotiation, the term of "extended" was not used, bar the phrase of "will not hinder". Therefore, he opined that the government had to be more intense in monitoring and evaluating the performance of Freeport, especially on the fulfillment of its obligations. The government could then already possess a performance record at the time when it had to make decisions.

In a special interview with TAMBANG Magazine, Minister of Energy and Mineral Resources Sudirman Said stated that at present the government had been seriously

undertaking necessary assessments of several considerations. He noted that it would not be that straightforward to put a hasty end to Freeport's operating license.

He acknowledged that due to existing complexities in the mining operations, it would take a transition period of at least 5 to 6 years should an operating license not be renewed. Such a long period was intended to provide an ample time for proper re-arrangement of Freeport's assets. Afterwards, a new contractor or mining license holder could begin construction.

During the transition period, there would be no activities of any kind in Indonesia's largest mine. This would then affect the State and the local governments who would be missing the incomes from the mining activities.

Freeport has thus far been one of the mainstays to sustain the economy in Indonesia, specifically in the land of Papua. This is evident from a finding by the Institute for Economic and Social Studies, the University of Indonesia, which revealed that approximately 37.5% of Papua's gross domestic product had been contributed by Freeport. It was even greater for the Mimika regency at 91%. If Freeport is closed, the economic impact on Papua and especially Mimika would be really significant.

Mr. Said therefore stated that the calls not to renew PT. Freeport Indonesia's operating license could hurt Papua. "Whatever the scenario, stopping Freeport would be akin to paralyzing Timika, as Papua would drop for about 6 years," stated Minister Sudirman Said.



R. Sukhyar





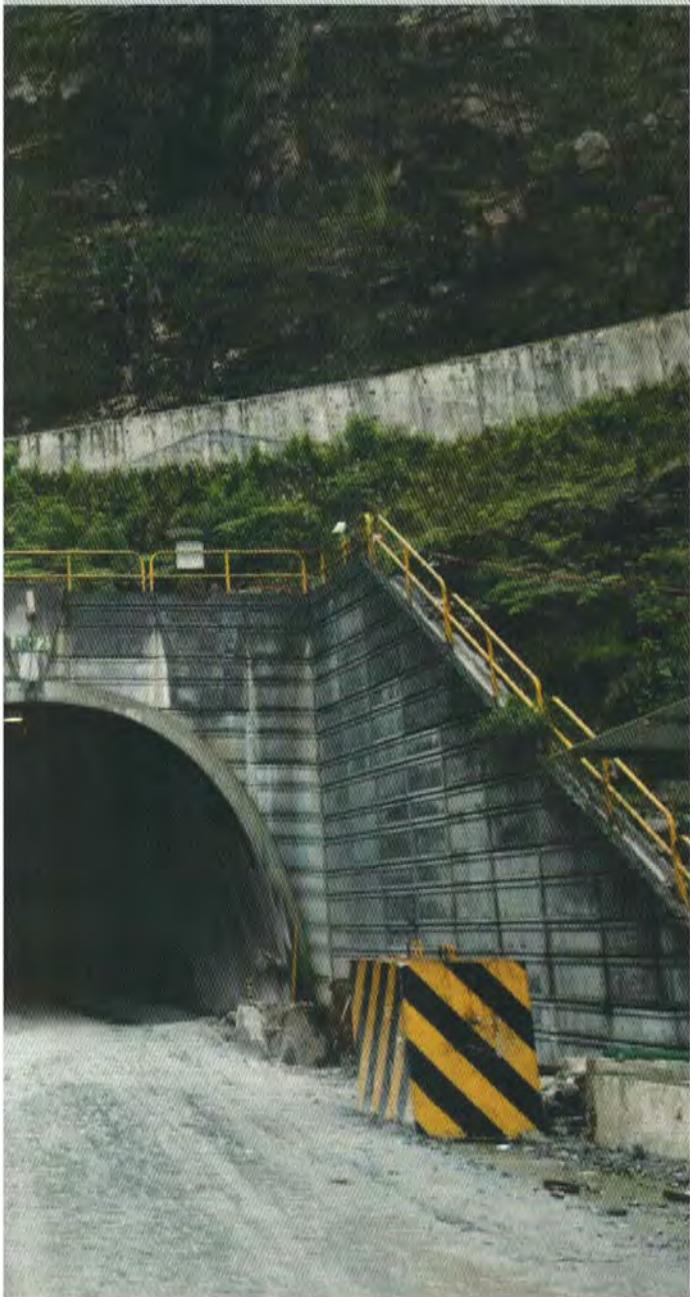
Therefore, an important future issue here is how the contribution of a company which has been operating for more than 60 years in Indonesia continues to improve. "Let us contemplate on the translation of in favor of Indonesia. Does ownership mean everything, or is it the tangible economic benefit that we are really after?" asked the Minister.

It indeed becomes necessary to improve future contribution by Freeport to the national economy. Among the measures is the improvement of an aspect which is related to the absorption of domestic products, better known as domestic component level. According to Mr. Said, the government had come up with a condition of an increase of 5% per year for the absorption of domestic content, and this would be properly audited.

Not everybody could actually agree with the notion of Freeport's contribution to the economy of Indonesia and Papua in particular. This was comprehended by Wilhelmus Pigai, an indigenous Amungme community leader who is also a member of the Provincial Parliament of Papua.

"There are those who agree and those who disagree with the presence of Freeport," he said. Those agreeable to Freeport's presence would see that it provides for enormous economic benefits. However, those opposing the notion would usually point at environmental aspects as well as control of areas under the tribal customary rights (ulayat), which potentially incites horizontal conflicts there.

"What is important here is to ensure that the benefits



faktafreeport.wordpress.com

from the company's presence here be more felt by the people of Papua," explained the member of the Economic Commission of the Provincial Parliament of Papua.

He acknowledged that the contribution of Freeport on the economy would not be just for Papua, but also for Indonesia in general. Therefore, it would not be wise to put Freeport's operations to an end unceremoniously. What is needed to carry out is to increase economic benefits for the people of Papua, and in particular the communities holding the tribal customary rights.

Freeport has by far assisted and provided special attention to the tribal customary rights holders, among other through institutions established jointly such as the Amungme and Komoro Community Development Insti-

tute (LPMAK). Should the mining giant secure an extension, its contribution to the land of Papua should be even greater. The management of communal institutions, such as that of the LPMAK, should also improve.

"Freeport must give greater attention to the people of Papua, in particular the younger generation. It must train them and later on employ them in the mines so that the benefits provided by Freeport to the community would be more significant and appreciated," added Mr. Pigai.

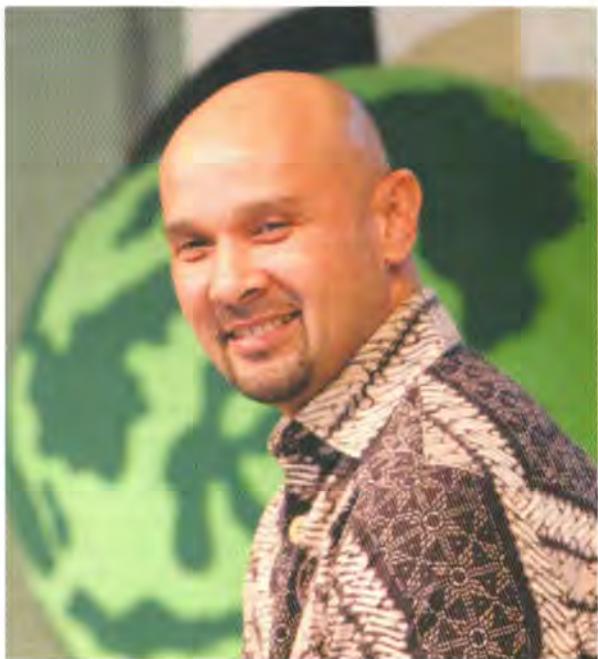
He also hoped that the local government and the local communities be more involved in the negotiations process of the contract with Freeport. "Freeport's contract will end in 2021. If the central government wants to discuss renewal of the contract, the provincial government, the Mimika regency and the society possessing the ulayat rights must be involved so that the interests of the local and indigenous people be more accommodated," he said.

Mr. Pigai also called for Freeport to build a smelter in Papua to accelerate the economic development of the region. If smelter is built, the impact to the economic turnaround in Papua would be even greater. "Freeport has long been exploiting the wealth of Papua and then processing them somewhere else. It is about time that Freeport build a processing plant in Papua," he argued.

Mr. Pigai who represents the Mimika regency where Freeport operates did not agree if the government build a smelter with other investors, while Freeport build smelters elsewhere. "If that's the case, the concentrate earmarked for government-owned smelter will be very small and will not be a priority. We still hope that Freeport would build smelter in Papua," he added. On divestment, he hoped that the local and provincial governments be more involved, so that they could be more in possession of the mining concessions.



Wilhelmus Pigai



Riza Pratama

FOR PT. Freeport Indonesia, the assurance of a contract extension is urgently needed. The company has already come up with an investment plan worth US\$ 18 billion until 2041, from building a copper smelter in Gresik, East Java to underground mine development.

Freeport's Public Relations Chief Riza Pratama explained that the company appreciated the government's guarantee that Freeport could continue to invest after 2021 to continue its mining operations. The management of Freeport has continued to negotiate in order to obtain an extension of the operating license, considering the value of investment involved.

The company's workforce currently reaches approximately 30,000 workers. More than 95% of them are Indonesians. Of the total number, more than 25% are Papuans. They occupy a variety of positions, ranging from junior level employees to vice president.

In terms of economic contribution, Mr. Pratama explained that based on a research by the Institute for Economic and Social Studies, Faculty of Economics of the University of Indonesia (LPEM-UI) in 2013, mining activities contributed to 91% of the GDP of the Mimika regency, and 37.5% of the Papua Province. Other forms of direct contributions by Freeport to the state revenues are taxes, royalties and dividends, paid in accordance with existing regulations.

Freeport's data also shows that in a span of the period between 1992-2014, the direct benefit for Indonesia in the form of taxes, royalties, dividends, fees and other payments could reach US\$ 15.8 billion. While indirect benefits in the form of salary or wages, domestic purchases, regional development and domestic investment could reach US\$ 29.5 billion.

Specifically for the development of the local communities, Freeport has budgeted an investment program to be managed directly by Freeport through a part-

nership with the Amungme and Komoro Community Development Institute (LPMAK), a partnership fund management institution for the community development in the fields of health, education, economy and culture. Members of this institution are chosen from the local government, Papuan leaders, leaders of indigenous people of Amungme and Kamoro, as well as Freeport's representatives.

In 2014, the number of investment funds for the development of the society, both managed directly or through partnerships with the LPMAK reached US\$ 92.2 million. Meanwhile, the total investment fund for community development from 1992 to 2014 could reach US\$ 1.3 billion.

Looking ahead, Freeport would commit to increasing its roles, among others by increasing the utilization of the local content. Freeport has currently made a purchase of domestic goods by 71%, with a use of domestic services by 90%. "We would welcome if any State Owned Enterprises (BUMN) be involved in promoting the use of the local content," said Mr. Pratama.

Another contribution promised by Freeport is the construction of additional copper smelter in Gresik, East Java. "This is a manifestation of our support to the downstreaming program in the country, so that later on 100% Freeport copper concentrate could be processed domestically," he added.

Until now the company had signed a memorandum of understanding (MoU) to acquire additional adjoining location with PT. Smeting within the industrial area of PT. Petrokimia Gresik. "We are very serious to establish the smelter," said Managing Director of PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. The construction of the project had been slightly delayed as the land in the designated location turned out to be too mushy. "We have been carrying out soil reinforcement works there," said Mr. Sjamsoeddin.

Currently, approximately 40% of Freeport's copper concentrate are processed at PT. Smeting Gresik, founded by Freeport with a Japan consortium in 1996. The processed concentrates are dispatched to many smelters located in Asia.

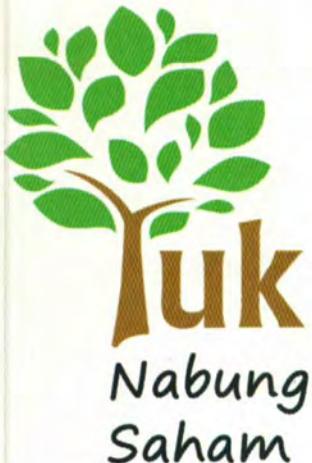
Indeed, construction of the smelter is fairly slow. Until July 2015, the progress of the construction had only reached 11%. This has become a reason for some to doubt the seriousness of Freeport to build a smelter. However, it is also understandable that Freeport has yet to be that determined in building the smelter as its fate post-2021 remains unclear.

Mr. Riza Pratama informed that elaboration on divestment had been agreed upon. National share ownership in Freeport would be raised to 30%. The shares would be offered for purchase at reasonable value by any national parties, preferably through an IPO at the Indonesian Stock Exchange. "Details of such a mechanism are still being discussed," he explained.

It is also worth noting that the offering of Freeport's divestment should actually be submitted no later than 14 October 2014. When it comes to shares, things tend to become really complicated. Not only big profits targeted, it would also involve mega-investments which, if improperly handled, can become a boomerang to those involved. ■



Investor Summit And Capital Market Expo 2015



9-13 November 2015

Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Kenali pasar modal dan perusahaan tercatat yang secara langsung menjabarkan kinerja dan rencana kerja mereka.

- **Public Expose Perusahaan Tercatat**
- **Pameran, yang diikuti oleh Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, dan Perusahaan Tercatat**
- **Berbagi pengalaman mengenai investasi dari :
Hary Tanoezdibjo | Adiwarman A. Karim | Andien
Giring NIDJI | dan lain-lain**

Untuk mengikuti *Public Expose* Perusahaan Tercatat, lakukan pendaftaran secara online melalui :
www.idxinvestorsummit.com

Sekretariat

Naya | Telepon : 021-7244657, 7204811 Fax : 021-7204811
0812 8391 6631 | Email : pendaftaran@idxinvestorsummit.com

Media Partner :

INDOPOS

Warta Ekonomi

INVESTOR DAILY

INAPAHAM DALAM BERINVESTASI

Bisnis Indonesia

KONSEP BISNIS INVESTASI

PropertyBank

The President Post



Benchmark

THE INDONESIAN ENERGY & MINING REVIEW
TAMBANG

e-BURSA.COM

iBCM

Property-in

REPUBLIKA

A TALE OF A NICKEL SMELTER

RUKMI HAPSARI
rukmi.hapsari@tambang.co.id

The free-falling nickel prices has become an obstacle for operators of processing and refining plants. Many who almost begin construction choose to back off.

Among those who feel the heat due to the constantly weakening nickel price is PT. Macika Mineral Industries (MMI) who build a nickel smelter in Konawe, Southeast Sulawesi. The construction of the smelter was already concluded in September 2015. However, the company has to delay its commissioning. Ramli Halim, PT. MMI's Director, stated that the current market price of nickel was unfavorable for his company, therefore it would delay production trials until early next year. "We will see how it goes," he said to TAMBANG Magazine.

He pointed out that the company would not import coke as raw material due to financial constraints. He admitted that he was unsure when the facility would begin to operate. To purchase raw materials, the company would try securing loan from a non-bank third party, namely a foreign trade company. Previously, PT. MMI had tried seeking the possibility of funding from the national banks. However it was proven difficult as the banks demanded actual instances of exports already.



Dok. ANTAM



The banks was known to be keen to provide funding only if the company could come up with production and export already. As a matter of fact, should the loan comes after the company starts the production, financing would be considered too late. Several other names in the industry, meanwhile, were known to invite direct funding from China.

Technically, if a smelter has started operation, it must remain in operation. A sudden halt to the operation would be really costly when it comes to re-starting the operation. Heating of furnaces and preparation of materials have proven to take the largest portion of production costs. "If we complete (construction) early and already be in production, then we must keep on going," explained Mr. Halim.

The use of coke for nickel smelters is currently alleged at 60%, although its price is more expensive than another raw material, nickel ore. PT. MMI could obtain nickel ore from PT. Macika Mada Madana (MMM), the parent company of Macika Minerals in cooperation with Chinese company PT. Brilimetal. PT. MMM is the owner of a production business license (IUP) covering an area of 700 hectares with nickel reserves approximated at 8 million tons.

Due to the stalled construction, the foreign workers who would help operate the smelter have now gone back to China. Their expertise was needed by the company to operate the technology of blast furnish. Mr. Halim argued that since the technology in use was a Chinese innovation, "There is nothing wrong with employing operators from the owner (of the technology)," he said.

It does not affect only Macika Minerals. Other companies in the refining business are also experiencing setbacks, not only in terms of construction or price, but also technical problems. Jonatan Handojo, Vice-Chairman of the Association of Processing and Refining Companies of Indonesia (AP3I), notified that another nickel smelter which was also forced to halt construction was PT. Heng Tai Yuan.

Mr. Handojo explained that the current average price of nickel was US\$ 10,470 per metric ton. The figure was still considered too low, even though it would not cause existing plants to cease operations.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) had projected that out of 35 factories being currently built, only two would be completed by 2016. Director General of Mineral and Coal at the ESDM Ministry, Bambang Gatot Ariyono, explained that this would be an impact from the decelerating global economic growth. He also recognized that the program to improve added value had not gone too well. In addition to those of nickel's, other smelters had also experienced stagnant development.

According to a data from the Directorate General of Mineral and Coal, there are 35 nickel smelters by 44 companies operating under mining permit (IUP). Five smelters have shown a level of progress between 6-10%, with a total input capacity of 2.3 million tons per year. Those with a progress rate between 11-30% are 12 smelters, with a total input capacity of 10.5 million tons per year.

For the level of 31-50%, there are nine smelters with a total input capacity of 5.3 tons per year. For the level of 51-

Mineral Smelters

No.	Commodity	Number of IUP	Number of Facilities Processing
1.	Nickel	44	35
2.	Bauxite	11	6
3.	Iron	8	8
4.	Mangan	3	3
5.	Zircon	13	11
6.	Lead and Zing	4	4
7.	Kaolin dan Zeolite	4	4
Total		87	71

Source: Directorate General of Mineral and Coal, ESDM Ministry





Bambang Gatot Ariyono

80%, there are five smelters with a total input capacity of 3 million tons per year. Lastly, there are four smelters with 81-100% progress level with a total input capacity of 6.6 million tons per year.

Nickel Prices

The Chinese government is still looking for ways to improve the economy. The manufacturing and construction industries as the economic drivers have been shaky with consumption level steadily going down. Quoting from Bloomberg (26/10), the nickel price for a three-months contract delivery at the London Metal Exchange fell 0.4% to US\$ 10,470 per metric ton. However, in the last week the price rose 0.8%.

The nickel price has still not improved following a decision by the People's Bank of China (PBOC) to cut interest rates. Investors are now even more concerned on the economic conditions in China, as the world's largest nickel consumer, following the PBOC's policy.

Lending interest rates also fell to 4.35% from the previous 4.6%, while deposit rates were down to 1.5% from the previous 1.75%. Since November 2014, the country recorded cuts to interest rates six times already, aimed at encouraging public spending and easing borrowing costs of companies.

Meanwhile in Indonesia, the confusion felt by the businesses and the investors surrounding the decline in commodity prices have only added to the long list of the government's homeworks. In addition to the free-falling prices, many rulings currently collide with each other. It is also time consuming to take care of a permit. Lots of adjustments are therefore required.

To build a smelter, investors must apply for a permit. The problem is, the permit could be applied to two ministries, namely the ESDM Ministry and the Ministry of Industry. In fact, the two ministries clearly have different





roles. The ESDM Ministry would handle upstream businesses, whereas downstream businesses would be in the Ministry of Industry's domain.

Mr. Bambang Gatot Ariyono once announced that any smelters using mining raw material should obtain a Mining Permit for Production Processing and Refining Operations (IUP OP PP). With such a permit, between the mines and smelters would be duly integrated notwithstanding any raw materials problems. However, separate processing would still take place.

Meanwhile, the Ministry of Industry considers that smelters would produce semi-finished materials to process further for the downstream industries. The Ministry of Industry feels that it is authorized to issue industrial business license (IUI) to investors in order to build a smelter. Unfortunately, this could lead to supply constraints.

In response to the dragging problem, the government has mediated by processing permit for smelters through a one door integrated services (PTSP) launched by the Investment Coordinating Board (BKPM). Negotiations whoever are still underway involving the ESDM Ministry and the Ministry of Industry.

Macika Mineral Industries (MMI) is a holder of the IUP OP PP, as from the beginning, the company had applied for such a permit to the ESDM Ministry. "As far as I am concerned, some companies did apply for the Industrial Business License (IUI). For the IUP OP PP, it would indeed appear to be more stringent," added Mr. Ramli Halim.

In China, any companies could buy raw materials from anywhere. Whereas in Indonesia, many mining companies find it difficult to sell their products. One owner of the IUP OP in North Sulawesi, for instance, complained that the company's nickel ore could not be sold to other companies who have smelters. The company had lodged its complaint to the Directorate General of Mineral and Coal.

"According to the law, we reserve the right to dig, transport and sell the mined products from our IUP region," wrote the company's management in a letter to the Director General of Mineral and Coal, dated 12 August 2015.

In the letter, the company reported that the Head of Mining Regional Office of Southeast Sulawesi had prohibited the selling of ore to owners of IUIs. On the other hand, holders of the IUI is legal according to the law. This has resulted in the companies as producers and holders of IUI as manufacturers who have invested and built factories facing legal and business uncertainties.

"We request for a letter of recommendation from the Director General of Mineral and Coal so that we can sell nickel ore to holders of IUI," said the management of the unnamed company. The plea had been responded by the ESDM Ministry, who would gather agency heads to discuss the matter.

Macika Mineral would not worry about its supply of nickel ore as there is already an agreement with Macika Mada Madana which requires the latter to supply nickel ore to Macika Mineral. However, so long as there are better price and quality on offer, then PT. MMI would choose to buy from other suppliers.

That is for sure. ■

HAND-IN-HAND FOR MEMPAWAH PROJECT

NOVA FARIDA
nova.farida@tambang.co.id

The decline in aluminum prices as a result of the worsening world economic conditions does not make INALUM change its course. The state-owned enterprise has continued the expansion to strengthen its business lines.

Mid-October, one of the meeting rooms of the Ministry of State Owned Enterprises on Jalan Medan Merdeka Selatan, Central Jakarta, seemed to be more crowded than usual. Some key officials of the Ministry were involved in a serious conversation. The most important agenda of the discussion was for PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), also widely known as Inalum, to prepare for the construction of an alumina-grade smelter for production of aluminum at Mempawah Regency in West Kalimantan.

Inalum's Director, Winardi Sunoto, stated that the construction of the processing plant to produce alumina out of bauxite was meant to strengthen the company's business lines in the upstream aluminum industry in Indonesia. The operation of the plant could reduce the company's dependence on imports of alumina.

To strengthen its business expansion, Inalum had invited PT. Aneka Tambang Tbk. (Antam), for a cooperation. Both state-owned companies have come up with a cooperation scheme, outlined in an agreement between the shareholders. The move was deemed necessary prior to the establishment of a joint venture with future strategic partners. At present, several names of candidates to be invited as partners have emerged from China, Russia and the United Arab Emirates.

"Such a partnership is necessary, since Inalum will continue diversifying its products to pursue greater profits. An integrated business expansion such as this will increase added value and competitiveness of our aluminum products," Mr. Sunoto told TAMBANG Magazine at Inalum's representative office in Jakarta.

Inalum and Antam signed a memorandum of understanding in July, followed by signing of a contract. President Director of Antam, Tedy Badrujaman, revealed that the construction of the smelter was part of the downstreaming activities to increase the value of Antam's bauxite reserves.





Inalum and Antam signed a memorandum of understanding in July, followed by signing of a contract.

The processing plant with a capacity of 2 million tons per year was targeted to begin construction in 2016 and become operational by late 2019. To meet the requirement, the bauxite ore needed could reach 6 million wet metric tons (wmt) per year. "The plan is to build it gradually. At the initial stage, the capacity would be of one million tons, firstly," he said.

To meet the electricity needs of the processing plant, Inalum is currently building a thermal power plant with a capacity of 1,050 MW. Its construction is also done gradually. The first phase would see an electricity generation of 750 MW. The rest would follow after 2025.

According to Mr. Sunoto, such a move could help INALUM realize its plans to increase its aluminium production capacity to 500 thousand tons per year by 2020. In addition to that, Inalum would be able to reduce its alumina imports.

Mr. Sunoto, previously a director of operation at PT. Antam, recognized that the supply of raw materials had so far been secured from Australia, as there is no single alumina processing plant existing here. The development of a new bauxite-into-alumina processing plant belonging to Harita Group, meanwhile, is still currently only 40% finished.

"We import raw materials from Australia, and currently we also seek a cooperation with India," he added. India also sells high quality alumina at a quite competitive price.

Mr. Sunoto stated that the contract with the Australian would be renewed every two years, at a price which has been agreed upon. Within a year, to meet the production of aluminum ingot of as much as 260 thousand

tons, alumina needed could reach 520 thousand tons. "The amount of the raw material can be twice as much as that of the total production," he said.

He also shared that within a month, Inalum could secure up to two shipments of alumina at a volume that has been agreed upon. Thus far, approximately 70% of the produced aluminum ingot are dedicated for the domestic market. The remaining amount would be exported.

Referring to a data from the Association of Metal Casting Industry of Indonesia (Aplindo), the demand for aluminum ingot this year would increase 15% from that of 2014, at approximately 800 thousand tons.

A data from the Ministry of Industry meanwhile shows that the consumption of primary and secondary aluminum ingot until the first quarter of 2015 had reached 208.9 thousand tons. As a matter of fact, the domestic production could only reach 153.9 thousand tons. "Export of domestic aluminum products reaches 2,500 tons," said Budi Irmawan, Director for Basic Materials of Metal Industry of the Ministry of Industry.

As for aluminum extrusions, or aluminum which are formed in specific shape and size, the consumption has reached 18,600 tons a year. Consumption of aluminum sheets meanwhile is 39,200 tons. Mr. Irmawan stated that to meet the needs of the market so far, Indonesia still needs to import aluminum ingot from other countries.

Mr. Winardi Sunoto added that this could be a great chance for Inalum. As the only aluminum producer in Indonesia, the company would be keen to rule the aluminum industry here. At present, Inalum has continued to increase production gradually. "We are projecting to reach a level of 300 thousand tons," said Mr. Sunoto.



www.bloomberg.com



In the first half of 2015, Inalum could only sell ready-for-process aluminum bars at 80 thousand tons. With a sales target of 260 thousand tons by the end of the year, there would be 180 thousand tons of aluminum ingot remaining to pursue. "I am not worried. Current sales are still on average figures," he added. Last year alone, the company's aluminum ingot production reached 199,692 tons, a 41% increase from 2013.

After the devaluation of the yuan, the price of aluminum fell directly. At the end of September, it even reached US\$ 1,549 per metric ton, the lowest price since 2009 as a result of the weakening Chinese economy. Some analysts had predicted that the demand for aluminum certainly could not be increased in the near future.

Mr. Sunoto had instructed Inalum's management to come up with some precautionary measures, among other by maximizing sales, improving market performance and increasing operational efficiency. "We among others look for quality raw materials at competitive prices. Business negotiations must be carried out to secure good prices," he added.

Ultimately, by having its own power station, Inalum could reduce production costs. To operate the factory, which is located in the district of Toba Samosir in North Sumatra Province, Inalaum has utilized the water from Lake Toba.

There are two hydropower plants in use there, namely the Siguragura plant and Tangga plant. The power generated from the two plants would be channeled to a smelting plant in Kuala Tanjung through as many as 271 tower units sustaining a transmission line of approximately 120 kilometers. "Of the total electricity generation of 603 MW, 90 MW of which are sold to the PLN (State Electricity Company) to meet electricity demand in North Sumatra," explained Mr. Sunoto.

In addition to seriously building an alumina smelter, Inalum has also been working on plants to produce alu-

minum alloy (mixture) and billets (bars), targeted for conclusion at the end of 2016. Although the plants' construction has just reached 20%, Mr. Sunoto was optimistic that by the end of next year, the plants could be operational. "Our business expansion requires only addition and extension of the existing plants. (We only) need to add machineries, (and there is) no need for additional operator," he explained.

The company is currently awaiting the results of a tender to determine which contractor who would further develop the billets and alloy aluminum products. "There have been further discussions ongoing. Possibly it is a European (company) from Switzerland," he shared some details.

The production capacity of aluminum alloy and billet is targeted to reach 30 thousand tons and 90 thousand tons respectively per year. For the initial phase, however, the new plant could produce aluminum alloy at 2,000 tons and 3,000 tons of billet. "The biggest production would be aluminum ingots, but each year the production of alloy and billet will increase," added Mr. Sunoto.

He was optimistic that there would be high demands for the use of both products, considering the large number of ongoing construction projects and the development in the automotive industry. However, he stated that it was unfortunate that there has been no developer able to process Inalum's aluminum alloy and billet into finished products in the country. "We are forced to export (the products) first, as (the customer) in Indonesia does not exist," he said.

In 2017, the company could come up with other products such as aluminum slab, rod, auto-parts, and extrusion. The addition of these derivative products, he said, could reduce ingot production. He pointed out that with a planned total production of 500,000 tons by 2020, there would only be 180,000 tons ingot to produce from the total production of aluminum ingots in the same year. T